

Teori & Konsep Dasar

AKUNTANSI

DI BERBAGAI SEKTOR



Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M
Fithriah Napu, S.E., M.Si, Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak
Evi Martaseli, S.E., M.Ak, Harnavela Sofyan, S.E., M.M., PIA
Sigit Mareta, S.E., M.Ak, Henky Hendrawan, Drs., M.M., M.Si
Rita Andini S.E., M.M, Ika Wulandari, S.E., M.M
Lestari, S.E., Ak., M.Ak, Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak., CA
Imam Hasan, S.Pd., M.Pd., CAAT
Tutut Dewi Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA

Penerbit: **SONPEDIA**
Publishing Indonesia

Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M, dkk

TEORI & KONSEP DASAR

AKUNTANSI DI BERBAGAI SEKTOR

SONPEDIA

Publishing Indonesia

TEORI & KONSEP DASAR AKUNTANSI DI BERBAGAI SEKTOR

Penulis :

Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M
Fithriah Napu, SE., M.Si
Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak
Evi Martaseli, SE, M.Ak
Harnavela Sofyan, S.E., M.M., PIA
Sigit Mareta, S.E., M.Ak
Henky Hendrawan, Drs., M.M., M.Si
Rita Andini S.E., M.M
Ika Wulandari, S.E., M.M
Lestari, S.E., Ak., M.Ak
Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak., CA
Imam Hasan, S.Pd., M.Pd., CAAT
Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak.,CA., CTA., ACPA
Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

TEORI & KONSEP DASAR AKUNTANSI DI BERBAGAI SEKTOR

Penulis :

Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M
Fithriah Napu, SE., M.Si
Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak
Evi Martaseli, SE, M.Ak
Harnavela Sofyan, S.E., M.M., PIA
Sigit Mareta, S.E., M.Ak
Henky Hendrawan, Drs., M.M., M.Si
Rita Andini S.E., M.M
Ika Wulandari, S.E., M.M
Lestari, S.E., Ak., M.Ak
Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak., CA
Imam Hasan, S.Pd., M.Pd., CAAT
Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak.,CA., CTA., ACPA
Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA

ISBN : 978-623-09-2642-6

Editor:

Efitra
Andra Juansa
Sepriano

Penyunting :

Tim Sonpedia

Desain sampul dan Tata Letak:

M. Yusuf, S.Kom., M.S.I

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com Website: www.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "Teori & Konsep Dasar Akuntansi di Berbagai Sektor". Tidak lupa kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teori dan konsep dasar akuntansi yang berlaku di berbagai sektor.

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, sebuah organisasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Buku ini mengulas secara lengkap mengenai berbagai tentang penerapan akuntansi di berbagai sektor, di dalamnya dijelaskan tentang, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya, Akuntansi Audit, Akuntansi Publik, Akuntansi Pemerintah, Akuntansi UMKM, Akuntansi Perbankan, Akuntansi Perpajakan, Akuntansi Koperasi, Akuntansi Pendidikan, Akuntansi Forensik dan Investigasi dan Akuntansi Syariah.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi, maupun pihak-pihak yang tertarik dalam bidang akuntansi di berbagai sektor, serta memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan konsep dasar akuntansi.

Terima kasih kepada para pembaca yang telah memilih buku ini sebagai sumber inspirasi dan pengetahuan. Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Jika terdapat

kesalahan dalam penulisan buku ini, mohon maaf dan akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Salam hormat,

Jambi, Maret 2023

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN 1 PENGANTAR AKUNTANSI.....	1
A. DEFINISI DAN PENGERTIAN AKUNTANSI	1
B. DISIPLIN dan BIDANG AKUNTANSI	9
C. PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI	11
BAGIAN 2 AKUNTANSI KEUANGAN	16
A. DEFINISI AKUNTANSI KEUANGAN.....	16
B. MANFAAT AKUNTANSI KEUANGAN.....	18
C. TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN	20
D. ASAS-ASAS AKUNTANSI KEUANGAN	22
E. RUMUS AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN	24
F. PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN	27
G. APLIKASI AKUNTANSI.....	28
BAGIAN 3 AKUNTANSI MANAJEMEN	31
A. KARAKTERISTIK AKUNTANSI MANAJEMEN.....	31
B. SISTEM AKUNTANSI BIAYA	33
C. ANALISIS BIAYA DAN VOLUME LABA	36
D. ANGGARAN.....	38
E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	41
F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS	43
BAGIAN 4 AKUNTANSI BIAYA	47
A. TEORI AKUNTANSI BIAYA.....	47

B.	KONSEP BIAYA DAN PERILAKU BIAYA.....	50
C.	BIAYA PRODUKSI.....	51
D.	HARGA POKOK PRODUKSI	55
BAGIAN 5 AKUNTANSI AUDIT		61
A.	PENGANTAR AKUNTANSI AUDIT	61
B.	PERSYARATAN AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL	63
C.	AUDIT SIKLUS TRANSAKSI	65
D.	AUDIT ATAS PENGUKURAN DAN ESTIMASI.....	66
E.	PELAPORAN HASIL AUDIT	67
F.	ETIKA DAN INTEGRITAS PRAKTIK AUDIT.....	68
G.	PERAN TEKNOLOGI DALAM PRAKTIK AKUNTANSI AUDIT	70
H.	TANTANGAN DAN RISIKO AKUNTANSI AUDIT	71
BAGIAN 6 AKUNTANSI PUBLIK.....		73
A.	ORGANISASI PUBLIK	73
B.	PERAN AKUNTANSI DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK	75
C.	ENTITAS DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	77
D.	FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK.....	80
BAGIAN 7 AKUNTANSI PEMERINTAH		85
A.	PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN	85
B.	MODEL DAN CIRI AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	88
C.	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN AKUNTANSI KOMERSIAL.....	89
D.	Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan.....	91
E.	JENIS DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	93
F.	CONTOH PENJURNALAN DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN .	95

BAGIAN 8 AKUNTANSI UMKM	97
A. AKUNTANSI UMKM.....	97
B. BUDGETTING UNTUK UMKM	102
C. PEMBIAYAAN UNTUK UMKM	104
D. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK UMKM.....	107
E. KOPERASI DAN PERKEMBANGANYA DI INDONESIA	108
F. AKUNTANSI KOPERASI.....	109
BAGIAN 9 AKUNTANSI PERBANKAN.....	113
A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI BANK	113
B. AKUNTANSI GIRO NASABAH.....	115
C. AKUNTANSI TABUNGAN NASABAH	117
D. AKUNTANSI DEPOSITO BERJANGKA	121
E. AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN.....	123
BAGIAN 10 AKUNTANSI PERPAJAKAN	126
A. TAHAPAN AKUNTANSI PAJAK	126
B. BAGAN AKUN (<i>CHART OF ACCOUNTS</i>)	131
C. AKUNTANSI PEMOTONGAN PPH.....	137
D. AKUNTANSI PEMUNGUTAN PPH	138
BAGIAN 11 AKUNTANSI KOPERASI.....	140
A. KOPERASI	140
B. RUANG LINGKUP PERATURAN KOPERASI.....	142
C. JENIS KOPERASI	146
D. PERMODALAN KOPERASI.....	148
E. AKUNTANSI KOPERASI.....	149
F. LAPORAN KEUANGAN KOPERASI.....	152

BAGIAN 12 AKUNTANSI PENDIDIKAN.....	162
A. HAKITAT PENDIDIKAN.....	162
B. PENTINGNYA KEUANGAN PENDIDIKAN.....	163
C. KONSEP AKUNTANSI PENDIDIKAN.....	164
D. SISTEM AKUNTANSI PENDIDIKAN.....	166
E. LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI PENDIDIKAN	171
BAGIAN 13 AKUNTANSI FORENSIK DAN INVESTIGASI	178
A. PENGANTAR FORENSIK DAN INVESTIGASI	178
B. AKUNTANSI FORENSIK DAN AKUNTAN FORENSIK.....	180
C. FRAUD TREE.....	182
D. FRAUD TRIANGLE.....	185
E. FRAUD AKUNTANSI.....	188
BAGIAN 14 AKUNTANSI SYARIAH.....	191
A. PERKEMBANGAN KONTEMPORER AKUNTANSI SYARIAH.....	191
B. ASPEK YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN AKUNTANSI DI NEGARA-NEGARA ISLAM.....	194
C. URGENSI AKUNTANSI SYARIAH	197
D. PERBANDINGAN AKUNTANSI SYARIAH & AKUNTANSI KONVENSIONAL.....	200
E. AKUNTABILITAS DALAM SUDUT PANDANG ISLAM	201
F. FILOSOFI PENDIDIKAN AKUNTANSI SYARIAH	203
G. AKUNTAN ISLAMI.....	204
DAFTAR PUSTAKA	206
TENTANG PENULIS	217

BAGIAN 1

PENGANTAR AKUNTANSI

(Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M)

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN AKUNTANSI

Teori Akuntansi sebagai sekumpulan prinsip-prinsip yang menyajikan suatu kerangka acuan umum dimana praktek akuntansi dapat dinilai dan mengarahkan pengembangan praktek dan prosedur baru. Teori Akuntansi dengan pendekatan tradisional terdiri dari Non Teoritis (Praktik, Pragmatis) dan Teoritis (Deduktif, Induktif, Etis, Sosiologis, Economis, dan Eklektik atau Gabungan). (Belkaoui, Ahmed Riahi. 2001).

Akuntansi adalah proses mempersiapkan dan menganalisis laporan keuangan berdasarkan transaksi yang dicatat melalui proses pembukuan. Akuntansi melampaui pembukuan dan pencatatan ekonomi informasi untuk memasukkan ringkasan dan pelaporan informasi ini dengan cara yang dimaksudkan untuk mendorong pengambilan keputusan dalam bisnis. (Label, Wayne A. 2006).

Akuntansi adalah suatu sistem atau disiplin yang dipergunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi penting yang diperlukan atau bermanfaat dalam usaha mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta evaluasi terhadap hasil kegiatan atau usaha suatu organisasi maupun

unit usaha sebagai fokus perhatian dalam penyelenggaraan akuntansi. (Harnanto. 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Akuntansi adalah suatu teori dan praktek berupa proses yang diawali dari; pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan seluruh transaksi perusahaan yang bernilai secara finansial, meliputi: pertanggungjawaban, prinsip, standar aturan, kelaziman beserta semua aktivitas; perihal yang ada kaitannya dengan para akuntan; seni pencatatan, penggolongan, dan serangkaian proses akuntansi keuangan serta penganalisaan dari kegiatan transaksi terhadap suatu kesatuan dalam ekonomi.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) atau **Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika:** adalah organisasi profesi akuntansi yang bertugas mempersiapkan, pembentukan dan penegakan kode etik profesi, dan bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam merumuskan Standar Akuntansi. **Akuntansi** adalah 'Seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan metode tertentu untuk pengukuran, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umum terjadi, serta dalam penafsiran-penafsiran yang bersifat finansial'.

Financial Accounting Standards Board (FASB) atau **Dewan Standar Akuntansi Keuangan:** menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti untuk penyusunan laporan keuangan.

Akuntansi ‘merupakan kegiatan dari jasa yang tugas pokoknya menyajikan informasi keuangan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif guna dijadikan sebagai acuan bahan pengambilan keputusan ekonomi’.

Laporan Keuangan: Laporan yang disiapkan oleh perusahaan tentang keuangan status bisnis mereka (Neraca, Pendapatan Laporan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Saldo Pendapatan).

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau **Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)**: Aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan serta laporan perubahan yang mengacu kepada aturan-aturan ini dikembangkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants*, Financial Dewan Standar Akuntansi, Komisi Keamanan dan Pertukaran, dan instansi pemerintah lainnya.

Akuntansi ‘menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berisikan posisi hasil aktivitas usaha, dan juga laporan perubahan yang mengacu pada prinsip akuntansi’. Akuntansi merupakan prosedur pembukuan dimana pembukuan tersebut mencatat dan melacak transaksi bisnis yang nantinya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Sebagian besar prosedur pembukuan telah disistematisasikan, dan dalam banyak hal kasus, dapat ditangani oleh program komputer yang terintegrasi dengan teknologi.

Sedangkan Pembukuan adalah bagian hal penting yang dari proses akuntansi, tetapi itu hanyalah awal dari prosedur akuntansi.

Tujuan utama Teori Akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi.

Akuntansi dalam bahasa bisnis adalah proses perekaman, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa ekonomi melalui dokumen-dokumen tertentu atau laporan keuangan. Seperti bahasa lainnya, akuntansi memiliki miliknya sendiri syarat dan aturan. Untuk memahami bagaimana menafsirkan dan menggunakan menyediakan informasi akuntansi,

Akuntansi merupakan serangkaian kegiatan termasuk pendokumentasian, pengukuran atau kuantifikasi, analisis, pencatatan, dan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan terhadap efek atau akibat dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi atau unit usaha sebagai suatu informasi keuangan menyangkut organisasi atau unit usaha terkait. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi melalui penyusunan Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Kas Arus).

Akuntansi memberikan informasi keuangan baik kuantitatif maupun kualitatif yang membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktivitas bisnis untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan perusahaan mereka.

Perbankan menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan tentang pemberian Pinjaman. Instansi pemerintah mendasarkan peraturan mereka pada informasi akuntansi. Informasi akuntansi bahkan dapat berguna untuk entitas non-bisnis dengan minat pada bagaimana bisnis memengaruhi komunitas lokal, nasional, atau asing dan anggota komunitas.

Bisnis menggunakan informasi akuntansi untuk perencanaan dan penganggaran dan untuk membuat keputusan tentang pinjaman dan investasi. Secara keseluruhan, akuntansi membantu bisnis dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Securities and Exchange Commission (SEC) atau **Komisi Sekuritas dan Pertukaran:** Badan yang salah satu tugasnya adalah menetapkan prinsip-prinsip akuntansi dan praktik yang harus diikuti oleh perusahaan yang masuk yurisdiksinya (menegakkan undang-undang dan mengembangkan peraturan baru).

Jenis-Jenis Informasi Akuntansi, antara lain:

- (1). Informasi yang disiapkan secara eksklusif oleh orang-orang di dalam perusahaan (manajer, karyawan, atau pemilik) untuk digunakan sendiri.
- (2). Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah tersebut sebagai *Internal Revenue Service (IRS)*, *Securities and Exchange Komisi (SEC)*, dan Komisi Perdagangan Federal (FTC).

- (3). Informasi umum tentang perusahaan yang diberikan kepada orang diluar perusahaan (investor, kreditur, dan serikat pekerja).

Komponen Akuntansi yang dijumpai, antara lain:

- (1). Akuntansi menggunakan penyajian dengan simbol-simbol (debit dan kredit), dan semua terminalogi yang digunakan merupakan simbol yang cocok dan unik untuk bidang akuntansi.
- (2). Akuntansi menggunakan aturan-taturan penterjemahan, pensandian yang merupakan suatu proses pengubahan baik dari maupun ke simbol-simbol.
- (3). Akuntansi menggunakan aturan manipulasi atau rekayasa untuk menetapkan profit yang mengacu kepada aturan akuntansi tersebut.

Katagori Kegiatan Pokok Akuntansi, antara lain:

- (1). Identifikasi Data atau Fakta,
Fakta yang relevan dengan kebutuhan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2). Pengolahan atau Analisis Data,
Data yang dianggap relevan.
- (3). Pelaporan atau Pengungkapan,
Hasilnya sebagai suatu informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan

Fungsi Akuntansi adalah penyampaian informasi dalam bentuk data-data keuangan dalam suatu kegiatan organisasi yang dijadikan dasar guna pengambilan keputusan.

Tujuan Akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang akan membantu membuat keputusan keuangan yang tepat. Memberi informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis seefisien mungkin sementara memaksimalkan keuntungan dan menjaga biaya tetap rendah, antara lain:

- (1). Mengukur sumber daya yang dimiliki oleh satuan usaha,
- (2). Menunjukkan kepentingan semua pihak dalam satuan usaha,
- (3). Mengukur perubahan sumber daya dan tuntutan kepentingan
- (4). Menetapkan perubahan dalam periode waktu tertentu,
- (5). Menyatakan hal-hal tersebut diatas dalam nilai uang sebagai satuan umum.

Manfaat Informasi Akuntansi, antara lain:

- *Marketing and Sales* (Pemasaran dan Penjualan),
- *Production* (Produksi),
- *Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan),

Tanpa informasi akuntansi yang tepat jenis keputusan ini akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk membuatnya.

Bankir terus menggunakan informasi akuntansi. Mereka berada dalam bisnis mengurus uang dan menghasilkan profit pengelolaan uang, jadi mereka mutlak harus membuat keputusan yang baik. Akuntansi adalah dasar bagi mereka keputusan membuat proses.

Manfaat Informasi Akuntansi bagi Bankir, antara lain:

- Pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah individu dan nasabah perusahaan,
- Menginvestasikan dana nasabah,
- Menetapkan suku bunga,
- Memenuhi peraturan otoritas moneter untuk melindungi komoditas dana nasabah.

Akuntabilitas dalam Akuntansi Laporan Keuangan Bisnis juga bisa sangat menarik bagi anggota lainnya dari masyarakat lokal atau nasional. Ketika ekonomi menjadi lebih kompleks, begitu pula transaksi dalam bisnis, dan proses pelaporannya keberbagai pengguna dan pembuatan agar menjadi dimengerti walaupun lebih kompleks.

Pengetahuan yang kuat tentang akuntansi sangat membantu untuk individu, manajer, dan pemilik bisnis yang membuat keputusan mereka berdasarkan informasi dokumen yang disediakan akuntansi. Prosedur untuk merekam semua transaksi ini dikenal sebagai 'Pembukuan'.

Dengan kata lain **Pembukuan** dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berkaitan dengan pencatatan data keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha secara tertib. Pembukuan adalah fase pencatatan akuntansi. Akuntansi didasarkan pada sebuah sistem pembukuan yang efisien.

Akuntansi adalah analisis dan interpretasi pembukuan catatan. Ini mencakup tidak hanya pemeliharaan akuntansi catatan tetapi juga

persiapan keuangan dan informasi bidang ekonomi yang melibatkan pengukuran transaksi dan lainnya yang berkaitan dengan penginputan.



*Gambar 1.1. Aktivitas dalam Akuntansi
(Sumber : diolah Penulis)*

B. DISIPLIN dan BIDANG AKUNTANSI

Akuntansi aktivitasnya sebagai suatu penyedia jasa berupa informasi akuntansi untuk keperluan perusahaan atau organisasi,

Disiplin dan Bidang Akuntansi, diantaranya:

(1). ***Management Accounting*** (Akuntansi Manajemen),

Aktivitasnya kegiatannya berorientasi untuk keperluan pihak internal manajemen sebagai pihak pengelola (jenis informasi, tipe informasi, dan jumlah informasi) perusahaan atau organisasi yang dapat mendukung jalannya fungsi-fungsi manajerial serta dapat digunakan sebagai acuan rencana (jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang) dalam pembuatan keputusan.

- (2). ***Financial Accounting*** (Akuntansi Keuangan),
Aktivitas kegiatannya berorientasi untuk keperluan pihak eksternal manajemen terdiri dari Investor, Pemerintah, Kreditur, pihak lainnya) sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dalam bentuk Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi, Neraca, Arus Kas. Laporan Perubahan lainnya).
- (3). ***Cost Accounting*** (Akuntansi Biaya),
Aktivitas kegiatannya berorientasi pada pengendalian biaya-biaya (bahan baku, produksi, tenaga kerja, biaya lainnya) yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk data-data (mulai dari pencatatan, penggolongan, pelaporan seluruh transaksi).
- (4). ***Budgeting Accounting*** (Akuntansi Anggaran),
Aktivitas kegiatannya berorientasi pada penyusunan rencana keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang (membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil operasional).
- (5). ***Tax Accounting*** (Akuntansi Perpajakan),
Aktivitas kegiatannya berorientasi pada pelaporan keuangan untuk mengetahui besaran penetapan pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan.
- (6). ***Auditing Accounting*** (Akuntansi Pemeriksaan),
Aktivitas kegiatannya berorientasi pada pemeriksaan secara independen dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan atas

data-data akuntansi berupa laporan keuangan suatu perusahaan.

(7). ***Government Accounting*** (Akuntansi Pemerintahan),

Aktivitas kegiatannya berorientasi pada instansi pemerintahan berupa pencatatan pelaporan data keuangan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan terhadap permasalahan keuangan negara.

(8). ***Public Accounting*** (Akuntansi Publik),

Aktivitas kegiatannya berorientasi pada instansi atau lembaga pemerintahan dalam pengelolaan laporan pemeriksaan keuangan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

C. PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

Prinsip Akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi dan yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi (aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi).

Asumsi-Asumsi Akuntansi terdiri dari beberapa prinsip, konsep dan konvensi yang dapat dianggap sebagai dasar dari akuntansi. Kebutuhan akan prinsip akuntansi yang diterima secara umum muncul dari dua alasan:

(1). Bersikap logis dan konsisten dalam mencatat transaksi,

- (2). Agar sejalan serta sesuai dengan praktik dan prosedur yang ditetapkan.

Asumsi-Asumsi dan Prinsip-Prinsip dalam Akuntansi menurut **Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)**, antara lain:

- (1). ***Economic Entity Principles*** (Prinsip Entitas Ekonomi),
Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa semua kejadian ekonomi dapat dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas (perusahaan: perorangan, persekutuan, perseroan terbatas), lembaga pemerintah, yayasan, dan sebagainya) tertentu.
- (2). ***Monetary Unit Principles*** (Prinsip Satuan Moneter),
Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa setiap kejadian ekonomi diperlakukan harus dapat diukur dengan ukuran moneter tertentu dalam bentuk mata uang sebagai alat ukur.
- (3). ***Going Concern Principles*** (Prinsip Berkesinambungan atau Kelangsungan Hidup),
Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa keterbelangungan entitas ekonomi tetap berjalan.
- (4). ***Revenue Recognition Principles*** (Prinsip Pengakuan Pendapatan atau Akrua),
Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa pengakuan pendapatan perusahaan dalam bentuk uang tunai jika telah diserahkan kepada pelanggan.
- (5). ***Materiality Principles*** (Prinsip Material),
Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa seluruh komponen unit yang bersifat material yang dicatat dalam laporan keuangan

dengan mengacu standar prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum.

(6). ***Period Principles*** (Prinsip Periode),

Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa aktivitas perusahaan memiliki batas dalam jangka waktu atau periode waktu (mingguan, bulanan, triwulan, kuartal, semesteran, tahunan).

(7). ***Historical Cost Principles*** (Prinsip Biaya Historis),

Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa waktu pencatatan penambahan aset saat pembelian yang catatkan pada biaya (tunai maupun setara kas lainnya).

(8). ***Consistency Principles*** (Prinsip Konsistensi),

Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa perlakuan metode akuntansi harus sesuai dengan yang telah ditetapkan sejak awal.

(9). ***Mactching Principles*** (Prinsip Mencocokkan),

Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa pelaporan aktivitas pengeluaran dengan aktivitas pendapatan harus dicocokkan dan dibandingkan sehingga terlihat pada laporan laba rugi perperiode tertentu (bulanan, triwulanan, kuartal, semesteran, dan tahunan).

(10). ***Full-Disclosure Principles*** (Prinsip Pengungkapan Penuh),

Asumsi prinsip ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas entisitas diinformasikan yang mudah dipahami oleh Stakeholder untuk dicantumkan dalam laporan keuangan dimaksud.

Ada berbagai **Terminologi** yang digunakan dalam **Prinsip Dasar Akuntansi** yang dijelaskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Assets} \text{ (Harta)} = \mathbf{Liability} \text{ (Utang)} + \mathbf{Equity} \text{ (Modal)}$$

(1). **Assets** (Harta),

Sesuatu sumber daya (uang tunai atau setara kas, persediaan, mesin, perlengkapan/perabot, bangunan, dan tanah, dan lainnya) yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional guna memberikan manfaat ekonomis dimasa depan.

(2). **Ekuitas** (Modal),

Dalam arti luas, istilah ekuitas mengacu pada total klaim terhadap perusahaan.

Owner's Equity (Modal Sendiri),

Adalah sisa hak terhadap Asset (harta) suatu perusahaan, atau Asset (sumber daya) dikurangi kewajiban dari perusahaan adalah modal sendiri,

(3). **Liability** (Kewajiban),

Jumlah kewajiban utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain (pihak ketiga).

(4). **Revenues** (Pendapatan),

Adalah kenaikan harta berupa nilai moneter dari produk atau layanan dijual kepada pelanggan selama periode tertentu atas hasil dari penjualan, layanan dan keuntungan (hasil penjualan, bunga, dividen dan komisi).

- (5). **Expenses** (Pengeluaran/Biaya/Beban),
Adalah penurunan harta berupa nilai moneter yang disebabkan oleh aktivitas atau pengeluaran (bahan baku, bahan habis pakai dan gaji, dan lainnya) oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan.
- (6). **Drawing Private Withdrawal** (Pengambilan untuk Keperluan Pribadi),
Adalah pengambilan Asset atau harta dalam aktivitas bisnis (uang kas atau setara kas maupun non kas) untuk keperluan pribadi pemilik.
- (7). **Investor** (Pemilik Investasi),
Orang atau organisasi yang menginvestasikan uangnya atau dana dan siap menanggung risiko dari aktivitas bisnis.
- (8). **Debitor** (Penerima Pinjaman),
Seseorang atau lembaga yang telah menerima pinjaman dengan perjanjian kontraktual dari peminjam (kreditur) bisa perorangan maupun lembaga atas transaksi barang atau jasa,
- (9). **Creditor** (Pemberi Pinjaman),
Seseorang atau lembaga yang telah memberikan pinjaman dengan perjanjian kontraktual kepada penerima pinjaman (debitur) bisa perorangan maupun lembaga atas transaksi barang atau jasa.

BAGIAN 2

AKUNTANSI KEUANGAN

(Fithriah Napu, SE., M.Si)

A. DEFINISI AKUNTANSI KEUANGAN

Akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, merekam, mengukur, mengklasifikasi, menganalisis, serta melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis. Tujuan akuntansi ialah untuk memberikan informasi yang akurat serta relevan tentang keuaangan suatu entitas bisnis kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah (Wahlen et al., 2022)(Warren et al., 2020).

Akuntansi meliputi berbagai jenis aktivitas, termasuk di dalam pembuatan jurnal, buku besar, laporam keuangan, analisis laporan keuangan, dan audit keuangan. Beberapa konsep dasar dalam akuntansi meliputi asas keteraturan, asas kesatuan usaha, asas keberlanjutan, asas pengukuran dengan biaya historis, dan asas kewajaran.

Dengan informasi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi, manajemen dapat membuat keputusan strategis serta mengelola keuangan dengan lebih efektif. Sementara itu, para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi untuk menilai kinerja

keuangan suatu entitas bisnis serta membuat keputusan investasi (Gabe Richard & Elizabeth Sugiarto Dermawan, 2022).

Persamaan akuntansi ialah suatu konsep dasar dalam ilmu akuntansi yang menggambarkan hubungan antara asset, kewajiban, serta ekuitas sebuah entitas bisnis. Persamaan akuntansi menyatakan bahwa jumlah total asset suatu perusahaan sama dengan jumlah total kewajiban serta ekuitasnya. Persamaan akuntansi ditulis sebagai berikut:

$$\text{Asset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

Artinya, total asset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Asset ialah segala sesuatu yang dimiliki oleh entitas bisnis serta memiliki nilai ekonomi. Liabilitas ialah sebuah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh entitas bisnis kepada pihak lain dalam bentuk uang atau jasa. Sedangkan, ekuitas ialah bagian dari asset yang dimiliki oleh pemilik atau *shareholder* suatu entitas bisnis.

Persamaan akuntansi tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis harus mempengaruhi setidaknya dua unsur dari persamaan tersebut, yaitu asset dan liabilitas atau ekuitas. Misalnya, jika suatu entitas bisnis membeli sebuah asset, maka nilai asset akan meningkat serta pada saat yang sama, nilai liabilitas atau ekuitas juga harus meningkat sebesar jumlah yang sama (Acset & Tbk, 2022; Schaltegger & Burritt, 2017).

Dalam pencatatan transaksi, persamaan akuntansi ini digunakan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan benar serta sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi. Hal ini juga membantu dalam menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisnis dipercaya serta dapat memberikan informasi yang akurat tentang keuangan perusahaan.

B. MANFAAT AKUNTANSI KEUANGAN

Akuntansi mempunyai berbagai manfaat bagi suatu entitas bisnis, diantaranya:

1. Mengontrol dan Membantu Keuangan

Dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik, entitas bisnis dapat mengontrol dan memantau arus keuangan yang masuk serta keluar. Hal ini memungkinkan entitas bisnis untuk mengambil keputusan finansial yang tepat serta efektif.

2. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan

Informasi keuangan yang tercatat dalam sistem akuntansi dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan strategi bisnis, investasi, serta pengurangan biaya. Dalam hal ini, akuntansi membantu manajemen untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang akurat.

3. Memenuhi Kewajiban Hukum

Entitas bisnis wajib memenuhi persyaratan hukum terkait pelaporan keuangan. Akuntansi memungkinkan entitas bisnis untuk Menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut.

4. Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

Laporan keuangan yang disusun dengan baik serta akurat dapat meningkatkan kredibilitas entitas bisnis di mata investor, kreditor, dan pelanggan. Hal ini dapat membantu entitas bisnis dalam mengumpulkan dana dan menarik pelanggan.

5. Memperlihatkan Kinerja Keuangan

Akuntansi memberikan gambaran tentang kinerja keuangan entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan entitas bisnis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan strategi bisnis mereka serta membuat perubahan yang diperlukan.

6. Memantau Efisiensi Biaya

Sistem akuntansi dapat membantu entitas bisnis untuk memantau efisiensi biaya serta mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan penghematan. Dengan melakukan hal ini, entitas bisnis dapat meningkatkan keuntungan serta mengurangi biaya operasional.

Secara keseluruhan, akuntansi ialah alat penting bagi suatu entitas bisnis untuk mengelola keuangannya dengan baik dan mencapai

tujuan bisnisnya. Dengan memahami manfaat akuntansi, entitas bisnis dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

C. TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN

Didalam penjabaran akuntansi dijelaskan bahwa tujuan utama dari akuntansi ialah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan terpercaya tentang suatu entitas bisnis kepada pengguna informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut meliputi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas (Hariyani, 2016; Schroeder et al., 2022). Berikut ini beberapa tujuan dari akuntansi secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. Menyajikan Informasi Keuangan yang Akurat

Tujuan utaman dari akuntansi ialah untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengandalkan informasi tersebut untuk membuat keputusan.

2. Membantu Pengambilan Keputusan

Informasi keuangan yang tercatat dalam akuntansi dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengelola bisnis, seperti mengevaluasi kinerja keuangan serta dapat membuat keputusan investasi.

3. Mengontrol Keuangan

Sistem akuntansi yang baik dapat membantu entitas bisnis untuk mengontrol arus keuangan yang masuk serta keluar dari bisnis,

sehingga meminimalkan risiko kecurangan serta kesalahan (Asana et al., 2022).

4. Memenuhi Persyaratan Hukum

Entitas bisnis harus mematuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Akuntansi memungkinkan entitas bisnis untuk Menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan hukum tersebut.

5. Meningkatkan Kredibilitas

Laporan keuangan yang disusun dengan baik serta akurat dapat meningkatkan kredibilitas bisnis di mata investor, kreditor, dan pelanggan. Hal ini dapat membantu entitas bisnis dalam mengumpulkan dana serta menarik pelanggan.

6. Menilai Kinerja Keuangan

Informasi keuangan yang tercatat dalam akuntansi dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan entitas bisnis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan strategi bisnis mereka serta membuat perubahan yang diperlukan.

7. Memantau Efisiensi Biaya

Sistem akuntansi dapat membantu entitas bisnis untuk memantau efisiensi biaya serta mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan penghematan. Dengan melakukan hal itu, entitas bisnis dapat meningkatkan keuntungan serta mengurangi biaya operasional.

Secara keseluruhan, tujuan akuntansi ialah untuk memberikan informasi keuangan yang relevan serta dapat diandalkan kepada pengguna informasi keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Akuntansi juga membantu entitas bisnis untuk mengontrol keuangan mereka serta memenuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

D. ASAS-ASAS AKUNTANSI KEUANGAN

Asas-asas akuntansi merupakan prinsi-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh para akuntan dalam merekam, mengukur, mengklasifikasi, menganalisis, dan juga melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis (Weygandt et al., 2018, 2019). Beberapa asas akuntansi yang penting antara lain :

1. Asas Keteraturan (*Regularity*)

Asas ini menunjukkan bahwa dalam pencatatan suatu transaksi, selalu harus dilakukan secara teratur, sistematis dan berurutan.

2. Asas Kesatuan Usaha (*Business Entity Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dianggap sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemilik atau pengelola bisnis tersebut. Dalam hal ini, transaksi bisnis harus dipisahkan dari transaksi pribadi pemilik.

3. Asas Keberlanjutan (*Going Concern Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa bisnis dianggap akan berlanjut untuk waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disiapkan dengan asumsi bahwa bisnis akan terus beroperasi dan tumbuh dalam jangka panjang.

4. Asas Pengukuran dengan Biaya Historis (*Historial Cost Concept*)

Asa ini menunjukkan bahwa asset serta kewajiban harus diukur dengan biaya historis atau biaya perolehan pada saat transaksi terjadi.

5. Asas Kewajaran (*Fairness Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa laporan keuangan harus adil serta akurat serta mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya.

6. Asas Konsistensi (*Consistency Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa akuntansi yang digunakan harus konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan metode yang sama dalam merekam transaksi yang serupa.

7. Asas Materialitas (*Materiality Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa laporan keuangan harus mencantumkan seluruh informasi yang material atau penting dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

8. Asas Pertimbangan Entitas (*Entity Concept*)

Asas ini menunjukkan bahwa transaksi harus dicatat serta dilaporkan atas nama entitas bisnis, bukan atas nama orang atau kelompok tertentu.

Kepatuhan pada asas-asas akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, transparan dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

E. RUMUS AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN

Berikut adalah beberapa rumus akuntansi beserta pengertiannya:

1. Pendapatan (*Revenue*) = Harga x Kuantitas

Rumus ini digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan atau total penjualan suatu produk atau jasa. Harga merupakan harga per unit produk atau jasa, sedangkan kuantitas merupakan jumlah produk atau jasa yang terjual.

2. Biaya (*Cost*) = Harga x Kuantitas

Rumus ini digunakan untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Harga merupakan biaya per unit produk atau jasa, sedangkan kuantitas merupakan jumlah produk atau jasa yang diproduksi atau disediakan.

3. Laba atau Rugi (*Profit or Loss*) = Pendapatan – Biaya

Rumus ini digunakan untuk menghitung laba atau rugi yang dihasilkan oleh entitas bisnis pada periode tertentu. Pendapatan ialah total penjualan atau pendapatan yang diterima oleh perusahaan, sedangkan biaya ialah total dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa.

4. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

$$= (\text{Pendapatan}-\text{Biaya})/\text{Pendapatan} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk menghitung persentase keuntungan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan produk atau jasa. Rumus ini akan menghasilkan margin laba kotor dalam bentuk persentase dari pendapatan.

5. Piutang Usaha (*Accounts Receivable Turnover*)

$$= \text{Total Penjualan Kredit} / \text{Saldo Piutang Rata-rata}$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Total penjualan kredit adalah total penjualan yang dilakukan dengan sistem pembayaran kredit, sedangkan saldo piutang rata-rata ialah rata-rata saldo piutang pada periode tertentu.

6. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$= \text{Total Aset Lancar} / \text{Total Kewajiban Lancar}$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek menggunakan aset lancar. Aset lancar ialah asset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun, sedangkan kewajiban lancar ialah kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

7. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (*Debt-to-Equity Ratio*)

$$= \text{Total Kewajiban} / \text{Total Ekuitas}$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Hutang ialah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan ekuitas ialah bagian dari asset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik.

8. Pengembalian atas Investasi (*Return on Investment/ROI*)

$$= (\text{Laba Bersih} / \text{Total Investasi}) \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur keuntungan atau pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Laba bersih ialah laba yang dihasilkan setelah dikurangi biaya, sedangkan total investasi ialah jumlah uang.

F. PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

Berikut ialah contoh dari penerapan akuntansi didalam sebuah entitas bisnis.

1. Pembuatan Jurnal

Entitas bisnis harus merekam seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam jurnal. Jurnal harus mencakup tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi, dan akun yang terlibat di dalam transaksi. Contoh transaksi yang dicatat didalam jurnal ialah pembelian bahan baku, penjualan barang, pembayaran hutang, dan penerimaan piutang.

2. Pengisian Buku Besar

Setelah transaksi direkam dalam jurnal, entitas bisnis harus mengisi buku besar dengan informasi tersebut. Buku besar mencakup semua akun yang terkait dengan entitas bisnis, seperti kas, piutang, persediaan, serta asset tetap. Seitan transaksi yang dicatat didalam jurnal harus dipindahkan ke buku besar yang sesuai dengan akun yang relevan.

3. Penyelesaian Laporan Keuangan

Setelah semua transaksi dicatat dalam buku besar, entitas bisnis dapat menyelesaikan laporan keuangan, seperti neraca, laporan labu rugi, dan laporan arus kas. Neraca mencantumkan seluruh asset. Kewajiban dan ekuitas perusahaan pada akhir periode

akuntansi tertentu. Laporan arus kas mencatat semua arus kas masuk serta kas keluar selama periode akuntansi.

4. Penyesuaian & Koreksi

Selama proses penyusunan laporan keuangan, entitas bisnis dapat menemukan kesalahan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Dalam hal ini, entitas harus membuat penyesuaian serta koreksi yang diperlukan sebelum menyelesaikan laporan keuangan.

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi dapat berbeda-beda antara entitas bisnis, tergantung pada ukuran, jenis bisnis, dan struktur organisasi mereka. Namun, prinsip-prinsip dasar akuntansi tetap sama serta harus diikuti untuk memastikan informasi keuangan yang akurat serta dapat dipercaya.

G. APLIKASI AKUNTANSI

Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi akuntansi yang banyak yang digunakan :

1. QuickBooks

QuickBooks ialah salah satu aplikasi akuntansi yang paling populer digunakan oleh bisnis kecil serta menengah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mengelola keuangan, membuat laporan keuangan, mengelola faktur serta pembayaran, serta melacak inventaris.

2. Xero

Xero adalah aplikasi akuntansi online yang juga digunakan oleh bisnis kecil serta menengah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk mengelola faktur, pembayaran, inventaris, pengeluaran serta laporan keuangan. Selain itu, *Xero* juga memungkinkan integrasi dengan banyak aplikasi bisnis lainnya.

3. Sage

Sage adalah aplikasi akuntansi yang digunakan oleh banyak bisnis besar serta menengah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan, melakukan pengeluaran, dan membuat laporan keuangan. Selain itu, *Sage* juga menyediakan fitur untuk mengelola sumber daya manusia serta pesediaan.

4. Wave

Wave adalah aplikasi akuntansi gratis yang digunakan oleh banyak bisnis kecil. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola faktur, pembayaran, pengeluaran, serta laporan keuangan. Selain itu, *Wave* juga menyediakan fitur untuk memproses kartu kredit serta memantau pembayaran.

5. Zoho

Zoho Books ialah aplikasi akuntansi online yang digunakan oleh bisnis kecil serta menengah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk mengelola faktur, pembayaran, inventaris, dan laporan keuangan. Selain itu, *Zoho Books* juga memungkinkan integrasi dengan banyak aplikasi bisnis lainnya.

Masih terdapat beberapa aplikasi akuntansi keuangan, namun seluruh aplikasi akuntansi mempunyai fitur yang hampir sama, namun mungkin mempunyai perbedaan dalam harga, antarmuka pengguna, dan kemampuan untuk mengintegrasikan dengan aplikasi lain.

BAGIAN 3
AKUNTANSI MANAJEMEN
(Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak)

A. KARAKTERISTIK AKUNTANSI MANAJEMEN

1. Menurut Maher et al. (2011), Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan yang efektif dalam mengelola bisnis.
2. Tujuan Akuntansi Manajemen
 - Tujuan Primer: adalah membantu manajemen dalam pembuatan keputusan manajemen.
 - Tujuan Sekunder:
 1. Membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi
 2. Membantu manajemen dalam menjawab masalah organisasi
 3. Membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen.
 4. Membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen.
3. jenis-jenis akuntansi biaya
 - a. Job Order Costing

Job Order Costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa yang diproduksi dalam jumlah kecil atau sedikit variasi dalam proses produksinya.

b. Process Costing

Process Costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa yang diproduksi secara massal atau berulang-ulang dalam proses produksinya.

4. Tahapan dalam Sistem Akuntansi Biaya

- a. Pengumpulan Data Biaya, Data biaya diambil dari beberapa departemen dalam perusahaan seperti bagian produksi, bagian tenaga kerja, bagian pabrik, bagian pembelian, dan bagian keuangan.
- b. Pengelompokan Biaya, Setelah data biaya dikumpulkan, biaya-biaya tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis biaya yang ada seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
- c. Mengalokasikan Biaya, Biaya-biaya yang sudah dikelompokkan kemudian dialokasikan ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan.
- d. Membuat Laporan Biaya, Setelah biaya dihitung dan dialokasikan, laporan biaya dibuat untuk menunjukkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

B. SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Sistem akuntansi biaya adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya pada perusahaan. Sistem akuntansi biaya dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan penentuan harga produk, perencanaan laba, pengendalian biaya, dan lain sebagainya.

Berikut adalah beberapa konsep dan teknik yang terkait dengan sistem akuntansi biaya:

1. Biaya Bahan Baku

Biaya bahan baku adalah biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku dan pengiriman bahan baku ke pabrik. Biaya bahan baku dapat dihitung dengan mengalikan jumlah bahan baku yang digunakan dengan harga per unit bahan baku.

Contoh : Suatu perusahaan membeli 1.000 unit bahan baku A seharga Rp 10.000 per unit dan 500 unit bahan baku B seharga Rp 15.000 per unit selama periode tertentu. Selama periode tersebut, perusahaan menggunakan 800 unit bahan baku A dan 400 unit bahan baku B dalam produksi.

Untuk menghitung biaya bahan baku selama periode tersebut, kita dapat menggunakan rumus berikut:

Biaya Bahan Baku = (Jumlah Bahan Baku yang Digunakan × Harga per Unit Bahan Baku)

Maka, biaya bahan baku A = (800 unit x Rp 10.000 per unit) = Rp 8.000.000

Biaya bahan baku B = (400 unit x Rp 15.000 per unit) = Rp 6.000.000

Jadi, biaya bahan baku selama periode tersebut adalah Rp 14.000.000 (Rp 8.000.000 + Rp 6.000.000).

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan mengalikan jumlah jam kerja dengan tingkat upah per jam.

Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi 100 unit produk selama periode tertentu dan menghabiskan 2.000 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi produk tersebut.

Gaji rata-rata pekerja pada perusahaan tersebut adalah Rp 10.000 per jam. Dalam hal ini, biaya tenaga kerja langsung dapat dihitung sebagai berikut:

Biaya Tenaga Kerja Langsung = (Jumlah Jam Tenaga Kerja Langsung x Gaji per Jam Tenaga Kerja Langsung)

Jadi, biaya tenaga kerja langsung untuk produksi 100 unit produk adalah:

Biaya Tenaga Kerja Langsung = (2.000 jam x Rp 10.000 per jam)
= Rp 20.000.000

Jadi, biaya tenaga kerja langsung untuk produksi 100 unit produk selama periode tertentu adalah Rp 20.000.000.

3. Overhead Pabrik

Overhead pabrik adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi, tetapi masih terkait dengan operasi pabrik. Beberapa contoh biaya overhead pabrik adalah biaya sewa pabrik, biaya listrik, dan biaya perawatan mesin.

Anggaplah suatu perusahaan memiliki biaya overhead tetap sebesar Rp 2.000.000 per bulan dan biaya overhead variabel sebesar Rp 5.000 per unit produk. Selama periode tertentu, perusahaan memproduksi 500 unit produk.

Untuk menghitung biaya overhead selama periode tersebut, kita dapat menggunakan rumus berikut:

- $\text{Biaya Overhead} = (\text{Biaya Overhead Tetap} + (\text{Jumlah Unit Produk} \times \text{Biaya Overhead Variabel per Unit}))$
- Maka, biaya overhead = $(\text{Rp } 2.000.000 + (500 \text{ unit} \times \text{Rp } 5.000 \text{ per unit})) = \text{Rp } 4.500.000$
- Jadi, biaya overhead selama periode tersebut adalah Rp 4.500.000.

4. Metode Costing

Metode costing adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan. Beberapa metode costing yang umum digunakan adalah job order costing, process costing, dan activity-based costing.

5. Break Even Analysis

Break even analysis adalah teknik yang digunakan untuk menentukan titik impas atau break even point dari sebuah produk atau jasa. Break even point adalah titik di mana pendapatan dari penjualan produk atau jasa sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk atau jasa tersebut.

C. ANALISIS BIAYA DAN VOLUME LABA

1. Biaya variabel dan biaya tetap

Analisis Biaya dan Volume Laba (Break-Even Analysis) adalah suatu teknik analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impas atau Break-Even Point (BEP) pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Teknik ini dilakukan dengan menghitung jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya produksi dan mencapai keuntungan nol.

Tujuan dari analisis biaya dan volume laba adalah untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan terkait dengan harga jual, jumlah produksi, dan biaya produksi.

Beberapa istilah yang terkait dengan analisis biaya dan volume laba, antara lain:

1) Biaya Tetap (Fixed Cost)

Merupakan biaya yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu, meskipun jumlah produksi atau penjualan mengalami perubahan.

2) Biaya Variabel (Variable Cost)

Merupakan biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi atau penjualan yang dilakukan.

3) Harga Jual (Selling Price)

Merupakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan.

4) Volume Penjualan (Sales Volume)

Merupakan jumlah produk atau jasa yang terjual dalam periode waktu tertentu.

2. Titik Impas dan Margin Keuntungan

Titik impas adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sementara margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Analisis titik impas dan margin keuntungan dapat membantu manajemen dalam menentukan volume produksi yang optimal dan harga jual yang sesuai (Hilton dan Platt, 2013).

1) Titik Impas (Break-Even Point)

Titik Impas (Break-Even Point) adalah titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total, di mana perusahaan tidak menghasilkan laba maupun rugi.

Rumus untuk menghitung titik impas adalah:

➤ Titik Impas (Break-Even Point) = $\frac{\text{Biaya Tetap}}{(\text{Harga Jual per Unit} - \text{Biaya Variabel per Unit})}$

2) Kontribusi Margin per Unit

Kontribusi Margin adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit.

3) Margin Keuntungan (Profit Margin)

Margin keuntungan (Profit Margin) adalah persentase keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari pendapatan. Margin keuntungan dihitung dengan membagi keuntungan dengan pendapatan.

Rumus untuk menghitung margin keuntungan adalah:

- $\text{Margin Keuntungan (Profit Margin)} = \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$
- Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya total.

4) Margin Keamanan (Safety Margin)

Margin keamanan (Safety Margin) adalah selisih antara jumlah penjualan aktual dan titik impas. Margin keamanan mengukur seberapa jauh penjualan aktual dari titik impas.

Rumus untuk menghitung margin keamanan adalah:

- $\text{Margin Keamanan (Safety Margin)} = \text{Penjualan Aktual} - \text{Titik Impas}$

D. ANGGARAN

Anggaran adalah rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk perusahaan. Anggaran membantu manajemen dalam merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan.

1. Tujuan anggaran

Anggaran bertujuan untuk mengukur, mengendalikan, dan memantau pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Dengan

memiliki anggaran yang baik, perusahaan dapat merencanakan pengeluaran dan pendapatan dengan baik dan menghindari kerugian finansial.

2. Manfaat anggaran

Anggaran memiliki manfaat yang penting bagi perusahaan, di antaranya:

- Sebagai alat perencanaan: Anggaran membantu perusahaan merencanakan kebutuhan dana dan memprioritaskan pengeluaran yang akan dilakukan.
- Sebagai alat pengendalian: Anggaran membantu perusahaan mengontrol pengeluaran dan mencegah terjadinya pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu.
- Sebagai alat evaluasi: Anggaran membantu perusahaan mengevaluasi kinerja dan hasil yang dicapai selama periode tertentu.
- Sebagai alat motivasi: Anggaran dapat digunakan sebagai motivasi bagi karyawan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Jenis-jenis anggaran

Jenis-jenis anggaran meliputi anggaran pendapatan, anggaran biaya, anggaran laba rugi, dan anggaran modal. Anggaran-anggaran tersebut harus dibuat dengan hati-hati dan akurat untuk mencapai tujuan perusahaan (Horngren et al., 2018).

Ada beberapa jenis anggaran yang biasa digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

- Anggaran Operasional: Anggaran yang berkaitan dengan pengeluaran rutin perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya sewa, dan biaya listrik.
- Anggaran Modal: Anggaran yang berkaitan dengan pengeluaran besar yang diperlukan untuk pengembangan bisnis, seperti pembelian mesin atau gedung baru.
- Anggaran Kas: Anggaran yang memproyeksikan aliran kas masuk dan keluar perusahaan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.
- Anggaran Proyek: Anggaran yang dibuat khusus untuk proyek tertentu, baik itu proyek pemerintah maupun swasta.
- Anggaran Fleksibel: Anggaran yang dibuat dengan menghitung kemungkinan perubahan dalam kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.

4. Proses penyusunan anggaran

Proses penyusunan anggaran terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan, dan pengawasan. Setiap tahap harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan anggaran akurat dan tercapainya tujuan perusahaan (Drury, 2013).

Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Identifikasi kebutuhan dan sumber dana
- b. Penentuan target dan sasaran
- c. Penentuan angka-angka

- d. Penyusunan anggaran
- e. Monitoring dan evaluasi

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan bisnis adalah proses pemilihan diantara beberapa pilihan yang tersedia dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tertentu. Keputusan bisnis harus didasarkan pada fakta, data, dan informasi yang relevan. Dalam proses pengambilan keputusan bisnis, manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan bisnis, sumber daya yang tersedia, biaya, risiko, dan peluang.

1. Tahapan Pengambilan Keputusan Bisnis

Tahapan pengambilan keputusan bisnis meliputi:

- a. Identifikasi masalah
- b. Pengumpulan data dan informasi
- c. Analisis data dan informasi
- d. Identifikasi pilihan
- e. Evaluasi pilihan
- f. Pemilihan pilihan terbaik
- g. Implementasi keputusan
- h. Evaluasi hasil

2. Pendekatan dalam pengambilan keputusan

Beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah:

- a. Pendekatan rasional

- b. Pendekatan normatif
- c. Pendekatan heuristik
- d. Pendekatan politik

3. Teknik-Teknik dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Beberapa teknik dalam pengambilan keputusan bisnis adalah:

- a. Analisis *SWOT*
- b. Analisis biaya-manfaat
- c. Analisis risiko
- d. Analisis regresi
- e. Analisis korelasi

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Bisnis

- a. Tujuan bisnis
- b. Lingkungan bisnis
- c. Sumber daya
- d. Biaya
- e. Risiko
- f. Pengaruh individu

5. Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah:

- a. Bias konfirmasi
- b. Overconfidence
- c. Heuristik berlebihan
- d. Pengabaian terhadap risiko
- e. Kesalahan dalam penilaian

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS

Pengambilan keputusan bisnis adalah proses pemilihan tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Keputusan bisnis dapat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan (Hansen dan Mowen, 2018).

1. Informasi Keuangan dan Pengambilan Keputusan

Informasi keuangan adalah data yang terkait dengan keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan-catatan atas laporan keuangan.

2. Tujuan utama dari informasi keuangan adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemilik, karyawan, pemasok, pelanggan, dan pemerintah.

3. Jenis-jenis Informasi Keuangan

Beberapa jenis informasi keuangan yang umumnya disajikan dalam laporan keuangan adalah:

- Laporan laba rugi: laporan yang menunjukkan penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu.
- Neraca: laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Laporan arus kas: laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu.
- Catatan atas laporan keuangan: catatan tambahan yang memberikan informasi lebih detail tentang laporan keuangan.

4. Analisis Informasi Keuangan

Analisis informasi keuangan adalah proses memeriksa informasi keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan bisnis. Beberapa metode analisis informasi keuangan adalah:

- Analisis rasio keuangan: menghitung rasio yang berkaitan dengan kinerja keuangan, seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio utang.
- Analisis tren: membandingkan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat tren yang terjadi.
- Analisis perbandingan: membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau industri yang sama.

5. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan

Pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan melibatkan evaluasi informasi keuangan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan adalah:

- a. Tujuan perusahaan
- b. Risiko
- c. Biaya
- d. Konsekuensi jangka panjang

6. Pengambilan Keputusan Mengenai Harga Jual Produk

Pengambilan keputusan mengenai harga jual produk melibatkan analisis biaya produk dan permintaan pasar.

Berikut adalah beberapa konsep dan teknik yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai harga jual produk:

a. Analisis Biaya-Volume-Laba (Cost-Volume-Profit Analysis)

Analisis biaya-volume-laba merupakan teknik untuk menghitung jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas (break-even point) atau keuntungan yang diinginkan.

b. Strategi harga

Strategi harga mencakup beberapa pendekatan, seperti penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan permintaan, dan penetapan harga berdasarkan persaingan.

c. Penentuan Harga Produk Baru

Penentuan harga produk baru melibatkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, harga pesaing, permintaan pasar, dan tingkat inovasi produk.

d. Diferensiasi harga

Diferensiasi harga merupakan praktik penetapan harga yang berbeda untuk kelompok pelanggan yang berbeda.

e. Analisis Pengejaran Margin Kontribusi (Contribution Margin Analysis)

adalah teknik untuk mengoptimalkan keuntungan dengan mengevaluasi kontribusi margin produk atau layanan terhadap biaya tetap.

f. Evaluasi Tingkat Elastisitas Permintaan (Elasticity of Demand Analysis)

Elastisitas permintaan adalah konsep yang menggambarkan respons konsumen terhadap perubahan harga.

BAGIAN 4

AKUNTANSI BIAYA

(Evi Martaseli, SE, MAK)

A. TEORI AKUNTANSI BIAYA

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi, sama halnya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak, dan sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya dengan akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji data-data biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan biaya produksi.

Jusup (2011:4) “menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”. Akuntansi secara garis besar digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan merupakan tipe akuntansi sendiri yang terpisah dari 2 tipe akuntansi tersebut diatas, namun merupakan bagian dari keduanya. Mulyadi (2014:2-5) menjelaskan bahwa “akuntansi dibagi menjadi dua tipe pokok yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen untuk memenuhi kebutuhan manajer”.

1. Pengertian Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai. Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukut pengorbanan nilai masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran.

Dilihat dari segi fungsi, akuntansi biaya merupakan alat bantu bagi manajemen didalam fungsi perencanaan dan pengendalian. Perencanaan ini maksudnya kegiatan kegiatan sedemikian rupa sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Perencanaan dan pengendalian berhubungan dengan akuntansi biaya. Dalam perencanaan, akuntansi biaya membantu manajemen dalam pembuatan anggaran, sedangkan dalam pengendalian akuntansi biaya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan khususnya menyangkut dimasa yang akan datang.

2. Tujuan Akuntansi Biaya

Tujuan akuntansi biaya yaitu perencanaan pengendalian biaya. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan teliti. Pengambilan keputusan manajemen membutuhkan informasi yang relevan untuk masa yang akan datang. Terdapat tiga tujuan pokok akuntansi, Mulyadi (2014:7) sebagai berikut: a. Penentuan biaya produk. b. Pengendalian biaya. c. Pengambilan keputusan khusus.

Kholmi & Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan manajemen (pihak internal) dalam mengelola usaha untuk: a. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. b. Perencanaan dan pengendalian biaya. c. Pengambilan keputusan bagi manajemen

Mursyidi (2010:11) menjelaskan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu sistem dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yaitu:

- 1) Menentukan harga pokok produk atau jasa.
- 2) Mengendalikan biaya.
- 3) Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.

B. KONSEP BIAYA DAN PERILAKU BIAYA

1. Pengertian Biaya

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, Mulyadi (2014:8) menyatakan bahwa: “Pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:

- a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
- b. Diukur dalam satuan uang.
- c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
- d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Secara terminologi biaya dapat dibedakan antara biaya (*Cost*) dengan beban (*expenses*) *Cost* atau *unexpired cost* merupakan pengorbanan sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, seperti pembelian bahan baku, sedangkan *expenses* atau *expired cost* adalah pengorbanan sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan penghasilan. Beban ini terjadi dalam periodes terjadinya transaksi dan dapat langsung memberi manfaat pada periode yang bersangkutan, seperti beban penjualan, beban sewa. Dari setiap periode beban dikurangkan dari lapran rugi laba untuk menentukan

laba periode tersebut. Agar perusahaan tetap eksis dalam bisnisnya, pendapatan harus melebihi beban.

2. Objek Biaya

Masiyah Kholmi & Yuningsih (2004:12) Dalam sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut objek. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek dan aktivitas. Dimana biaya diukur dan dibebankan.

Pada akuntansi kontemporer, aktivitas muncul sebagai objek biaya. Aktivitas adalah suatu unit dasar dari pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Aktivitas memainkan peranan penting dalam pembebanan biaya ke objek biaya lainnya dan merupakan unsur penting dari sistem akuntansi manajemen kontemporer. Contoh aktivitas meliputi pemasangan peralatan untuk produksi, pemindahan bahan dan barang, pembelian komponen, pemenuhan pemesanan, perancangan produk, dan pemeriksaan produk.

C. BIAYA PRODUKSI

Mulyadi (2015:16) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.

- **Unsur-unsur biaya produksi**

Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi ke dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.

a) Biaya Bahan Baku

Mulyadi (2015:275) “Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Mursyidi (2010:51) mendefinisikan biaya bahan langsung adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung”.

b) Biaya tenaga kerja langsung

Mulyadi (2015:319) “Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi”. Mursyidi (2010:213) “Biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (direct labor) dan (2) biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi”.

c) Biaya overhead pabrik

Mulyadi (2015:194) “Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”.

Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya menurut Mulyadi (2015:194) Dalam perusahaan yang produksinya

berdasarkan pesanan,” biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya *overhead* pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1) Biaya bahan penolong

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya *relative* kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.

2) Biaya reparasi dan pemeliharaan

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (*spareparts*), biaya bahan habis pakai (*factory supplies*) dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk kepaduan pabrik.

3) Biaya tenaga kerja tidak langsung

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari:

- a) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembaruan, seperti departemen departemen pembangkit tenaga listrik, uang, bengkel, departemen gudang.
- b) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik tersebut.

4) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap.

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan peralatan, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan pabrik.

5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan peralatan, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial-run.

6) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai.

Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan pengelolaan biaya

overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi.

D. HARGA POKOK PRODUKSI

Dalam sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil perlu menentukan harga pokok bagi produk yang dihasilkan, karena harga pokok itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual dasar dari suatu produk. Selain itu, harga juga digunakan untuk menentukan besarnya yang diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk tersebut.

1. Pengertian harga pokok produksi

Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Harga pokok produksi sangat penting bagi dalam suatu perusahaan, karena merupakan salah satu elemen yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.

Mulyadi (2010:17-18) menyatakan bahwa metode penentuan harga pokok produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu *full*

costing dan *variabel costing*. *Full costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan demikian harga pokok produksi menurut *full costing* terdiri dari unsur biaya produksi. Sedangkan *variabel costing* adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa harga pokok produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Harga pokok memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Harga pokok sebagai penetapan harga jual.
- b) Harga pokok merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh perusahaan karena harga pokok dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan harga jual produk tertentu.
- c) Harga pokok sebagai dasar penetapan laba. Apabila perusahaan telah membuat perhitungan harga pokok maka perusahaan dapat menetapkan laba yang diharapkan yang akan mempengaruhi tingkat harga jual suatu produk tertentu. c. Harga pokok sebagai dasar penilaian efisiensi. Harga pokok dapat dijadikan dasar

untuk mengontrol pemakaian bahan, upah dan biaya produksi tidak langsung.

- d) Harga pokok sebagai dasar pengambilan berbagai keputusan manajemen. Harga pokok merupakan suatu pedoman penting sekaligus sebagai suatu dasar untuk pengambilan keputusan khusus perusahaan, misalnya:
- 1) Menetapkan perubahan harga penjualan.
 - 2) Menetapkan penyesuaian proses produksi.
 - 3) Menetapkan strategi persaingan di pasaran luas.
 - 4) Merencanakan ekspansi perusahaan.
 - 5) Pengambilan keputusan manajemen.

2. Perhitungan harga Pokok.

Perhitungan Harga Pokok Produksi Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang.

a. Biaya Bahan Baku

Mulyadi (2014:275) menjelaskan pengertian bahan baku adalah sebagai berikut: “Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor”. Masiyah Kholmi Yuningsih (2004:29) “Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau hasil dari pengolahan sendiri”.

b. Biaya Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam membuat barang. Mulyadi (2015:319) menjelaskan pengertian “biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubahbahan baku menjadi produk jadi”.

c. Biaya Overhead Pabrik

Biaya overhead Mulyadi (2015:194) sebagai berikut: “Biaya biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadibeberapa golongan berikut ini: 1) Biaya bahan penolong 2) Biaya reparasi dan pemeliharaan 3) Biaya tenaga kerja tidak langsung 4) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.

Yuningsih (2004:55) Biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut:“ Biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung atau semua biaya produksi tak langsung” 1) Bahan tak langsung 2) Upah tak langsung 3) Listrik dan air 4) Sewa gedung pabrik 5) Penyusutan bangunan pabrik peralatan atau mesin-mesin pabrik 6) Reparasi dan pemeliharaan 7) Pajak Bumi dan bangunan pabrik 8) Asuransi pabrik

Penggolongan biaya overhead pabrik Yuningsih (2004:56) menurut sifatnya :

- 1) Biaya bahan penolong Bahan yang tidak atau menjadi bagian produk relatif kecil dibandingkan dengan bahan baku langsung. Contoh perusahaan Mebel, plitur, cat, paku.
- 2) Biaya reparasi dan pemeliharaan Biaya yang berupa suku cadang (*spare part*), biaya bahan habis pakai, biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan aktifa tetap yang digunakan untuk keperluan pabrik misalnya mesin, kendaraan, equipment dan bangunan pabrik.
- 3) Biaya tenaga kerja tidak langsung Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk tertentu, misalnya karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen tenaga listrik, uang, bengkel, dan departemen gudang.
- 4) Biaya yang timbul akibat penilaian aktifa tetap Misalnya biaya-biaya penyusutan, emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin perkakas laboratorium, aktiva lain yang digunakan pabrik.
- 5) Biaya yang terjadi akibat berlakunya waktu. Misalnya, biaya asuransi gudang dan departemen, equipmen. Asuransi kendaraan, asuransi karyawan, dan sebagainya

Yuningsih (2004: 57) “Biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan”. BOP dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu biaya overhead pabrik tetap, variabel, dan semi

variabel. 1) BOP tetap adalah biaya yang tidak berubah selama dalam kapasitas penuh. Contoh beban penyusutan gedung, mesin dengan pendekatan metode garis lurus. 2) BOP variabel adalah biaya yang mengalami perubahan sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 3) BOP semi variabel adalah biaya yang mengalami perubahan tidak sebanding dengan volume kegiatan. Contoh biaya reparasi dan pemeliharaan, beban listrik dan air.

3. Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi

Mulyadi (2014:17-19) menjelaskan metode penentuan biaya produksi merupakan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam cost produksi, terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing.

a. Metode *Full Costing*

Metode *Full Costing* menurut Mulyadi (2014:17-18) sebagai berikut: “Fullcosting merupakan metodes penentuan kos produksi yang memperhitungkan ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap”.

b. Metode *Variable Costing*

Mulyadi (2014:18-19) *Variabel costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam *cost* produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.

BAGIAN 5

AKUNTANSI AUDIT

(Harnavela Sofyan, S.E., M.M., PIA)

A. PENGANTAR AKUNTANSI AUDIT

Bidang audit akuntansi memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang konsep dasar, prinsip, dan praktik audit. Bagian penting dari profesi akuntansi, audit memeriksa dan mengevaluasi catatan keuangan perusahaan untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan tidak mengandung kesalahan atau perbedaan.

Dalam periode globalisasi yang semakin meningkat dan persaingan bisnis yang semakin ketat, peran audit internal menjadi semakin krusial. Meningkatnya volume transaksi keuangan internasional dan evolusi standar akuntansi yang cepat telah meningkatkan standar kualitas audit. Oleh karena itu, penting bagi para profesional akuntansi dan audit untuk memahami praktik terbaik untuk melakukan audit dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi saat ini.

Dengan memahami konsep dan praktik audit yang baik, para profesional di bidang akuntansi dan audit dapat membantu entitas-entitas memenuhi persyaratan audit dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, akuntansi audit

memiliki nilai penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas praktik audit.

Profesional di bidang akuntansi dan audit juga dapat membantu bisnis dalam memenuhi persyaratan audit dan memberikan jaminan kepada mereka yang membutuhkannya jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang landasan teoritis audit dan aplikasi praktisnya. Dengan demikian, audit dalam akuntansi memiliki nilai besar untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas praktik.

Tak hanya itu juga membahas peran teknologi dalam praktik audit. Misalnya, auditor sekarang dapat menggunakan data analitik, AI, dan teknologi lainnya untuk membantu mereka dalam pekerjaan. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik audit. Agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, auditor membutuhkan pengetahuan kerja tentang teknologi yang sekarang digunakan dalam industri audit.

Tak kalah penting juga bagaimana tantangan dan perkembangan dalam praktik audit. Seiring berkembangnya regulasi dan kemajuan teknologi, begitu pula tantangan yang dihadapi oleh praktik audit, seperti sulitnya memeriksa aset digital dan kompleksitas lingkungan bisnis. Jadi, auditor perlu memahami tantangan ini dan menyesuaikan praktik audit mereka untuk memberikan umpan balik yang relevan dan dapat ditindaklanjuti kepada orang-orang yang paling membutuhkannya.

B. PERSYARATAN AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam praktik audit, terdapat hubungan yang erat antara persyaratan audit dengan audit internal. Persyaratan audit adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas yang diaudit agar catatan keuangan entitas dapat diaudit secara efektif dan efisien. Namun, audit internal, juga dikenal sebagai pengendalian, adalah sistem atau proses yang digunakan bisnis untuk memastikan bahwa operasi dan keuangan mereka sendiri dikelola dengan baik dan didokumentasikan dengan baik.

Pengendalian internal yang efektif membantu organisasi mematuhi persyaratan audit dan memastikan bahwa laporan keuangannya dapat diaudit secara adil. Inilah sebabnya mengapa persyaratan audit dan pengendalian internal berjalan beriringan (Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017). Pelatihan internal yang efektif juga dapat membantu organisasi dalam menurunkan kemungkinan penipuan dan kesalahan dalam operasi dan keuangan mereka.

Di antara persyaratan audit umum yang harus dipenuhi oleh entitas yang diaudit (AICPA, 2018; IFAC, 2020) adalah untuk:

- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)
- Menyimpan dan mengajukan catatan keuangan yang lengkap dan akurat
- Memberikan auditor akses terhadap catatan dan data keuangan

Sementara itu, pengendalian internal (Louwers, Robert J. Ramsay, David H. Sinason, Jerry R. Strawser, & Thibodeau, 2015; Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017; Gramling, Steven M. Glover, & Prawitt, 2018; COSO, 2013) mencakup hal-hal seperti:

- Menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi,
- Menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk operasi dan keuangan,
- Secara rutin memantau operasi dan keuangan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko
- Serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan didokumentasikan dengan benar dan diverifikasi secara independen.

Dalam praktik audit, auditor akan memeriksa prosedur verifikasi entitas internal untuk memastikan mereka efektif dan sejalan dengan persyaratan audit yang berlaku. Masalah serius mungkin timbul dalam praktik audit jika auditor menemukan kekurangan dalam kontrol internal atau tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari entitas. Oleh karena itu, entitas harus memastikan bahwa audit internal mereka efektif dan mematuhi persyaratan audit yang berlaku untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka dapat diaudit secara akurat.

C. AUDIT SIKLUS TRANSAKSI

Tujuan dari Audit Siklus Transaksi adalah untuk memeriksa dan menilai semua transaksi bisnis yang terjadi di seluruh siklus operasional organisasi. Siklus transaksi menggabungkan beberapa tahap bisnis, termasuk perolehan barang atau jasa, produksi, distribusi, penjualan, penerimaan uang tunai, pencairan uang tunai, dan pelaporan transaksi keuangan (Whittington & Pany, 2021).

Selain itu pula audit siklus transaksi berguna untuk menilai efisiensi pengendalian internal dan kesesuaian transaksi dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini dilakukan melalui kombinasi tinjauan dokumen, wawancara dengan karyawan, dan analisis kuantitatif.

Di antara banyak langkah audit untuk siklus penjualan (Jr, Glover, & Prawitt, 2018; Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017; Moroney, Campbell, & Hamilton, 2020) adalah:

1. Tetapkan siklus transaksi yang akan diaudit.
2. Mengetahui proses bisnis dan mampu mengenali risiko selama siklus transaksi.
3. Memeriksa dokumen transaksional termasuk tagihan penjualan, tanda terima, dan akta kelahiran.
4. Melakukan audit internal yang mencakup bidang-bidang seperti akses sistem, validasi data, dan persetujuan transaksi.
5. Melakukan pengecekan mendalam, termasuk membandingkan volume transaksi dengan dokumentasi pendukung dan pengecekan integritas data.

6. Lakukan analisis hasil audit dan berikan saran untuk perbaikan.

Dengan demikian tujuan audit siklus transaksi keuangan untuk memastikan bahwa proses bisnis perusahaan efektif dan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit juga dapat membantu menemukan kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan menyediakan cara untuk meningkatkan efektivitasnya.

D. AUDIT ATAS PENGUKURAN DAN ESTIMASI

Salah satu bidang audit yang paling penting adalah dengan penilaian data keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan, dan ini termasuk audit perkiraan dan proyeksi. Nilai-nilai seperti nilai aset, nilai kewajiban, pendapatan, dan nilai beban diperkirakan dan diukur untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi, asumsi yang mendasarinya, penilaian risiko, dan pilihan teknik pengukuran hanyalah beberapa elemen yang mungkin mempengaruhi keakuratan angka laporan keuangan. Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan akurat, tepat waktu, dan kredibel, auditor memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prosedur akuntansi yang digunakan oleh manajemen perusahaan (IFAC, 2020; AICPA, 2018; Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017).

Saat melakukan audit perhitungan dan estimasi, auditor harus melakukan sejumlah langkah (Gramling, Steven M. Glover, &

Prawitt, 2018; Louwers, Robert J. Ramsay, David H. Sinason, Jerry R. Strawser, & Thibodeau, 2015; Messier, Steven M. Glover, & Prawitt., 2021):

- Seseorang harus terlebih dahulu memahami dan menilai teknik dan asumsi pengukuran dan estimasi manajemen.
- Kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi yang digunakan dalam proses penghitungan dan estimasi.
- Ketiga, meninjau dokumen pendukung untuk proses estimasi dan perhitungan, seperti kontrak, statistik, dan dokumen lainnya.
- Mengidentifikasi risiko terkait pengukuran dan estimasi, dan kemudian merencanakan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut, adalah bagian dari langkah ini.

E. PELAPORAN HASIL AUDIT

Pelaporan hasil audit merupakan tahapan krusial dalam proses audit. Setelah audit selesai, laporan yang merinci temuan harus diberikan kepada klien atau pihak lain yang berkepentingan. Laporan audit perlu memberikan detail yang cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pemikiran auditor tentang legalitas dan keakuratan laporan keuangan perusahaan.

Laporan hasil audit (Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017; Whittington & Pany, 2021; Louwers, Robert J. Ramsay, David H.

Sinason, Jerry R. Strawser, & Thibodeau, 2015) biasanya mencakup bagian berikut:

1. Tahap perencanaan, yang mencakup informasi tentang entitas yang diaudit, tujuan audit, ruang lingkup audit, dan tanggung jawab auditor.
2. Kompilasi hasil audit yang komprehensif dan pendapat auditor tentang keakuratan dan kelengkapan informasi keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan.
3. Analisis dan pertemuan, yang berisi rincian peristiwa dan diskusi utama yang dilakukan auditor selama audit. Termasuk dalam kategori ini adalah pelanggaran terhadap peraturan internal, pelaporan keuangan yang tidak memadai, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rekomendasi, termasuk saran dan saran untuk meningkatkan proses dan prosedur bisnis internal.
5. Lampiran dokumen, yang berisi informasi rinci tentang metodologi audit, audit data, dan dokumentasi pendukung.

F. ETIKA DAN INTEGRITAS PRAKTIK AUDIT

Seorang auditor bertanggung jawab untuk memberikan saran yang akurat dan objektif sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan, menjadikan etika dan integritas sebagai prinsip penting dari profesi audit. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai etika dan integritas dalam praktik audit tercantum di bawah ini (Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017; IAI, 2021; IFAC,

2016; Arens, Randal J. Elder, & Beasley, 2017; Whittington & Pany, 2021; Louwers, Robert J. Ramsay, David H. Sinason, Jerry R. Strawser, & Thibodeau, 2015):

1. Etika Profesi Setiap auditor bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Misalnya, Kode Etik IAI untuk Akuntan Publik (KAP) dan Kode Etik IFAC untuk Akuntan Publik (KEP-AP).
2. Auditor harus objektif dalam berpikir dan tindakan mereka. Ikatan finansial atau nonfinansial dengan klien yang dapat membahayakan objektivitas mereka dalam membuat rekomendasi dilarang.
3. Profesionalisme sangat penting dalam semua yang dilakukan auditor. Mereka harus mematuhi standar profesional dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.
4. Kerahasiaan, Auditor harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama audit. Mereka dilarang mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan tertulis dari klien.
5. Kejujuran sangat penting buat Auditor yang harus selalu mengatakan sebenarnya. Mereka tidak dapat mengubah kebenaran atau mengecualikan informasi yang dapat mengubah pikiran mereka.
6. Auditor memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan efek dari tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka perlu memikirkan dampak dari keputusan audit mereka terhadap manusia dan lingkungan.

G. PERAN TEKNOLOGI DALAM PRAKTIK AKUNTANSI AUDIT

Selama beberapa tahun terakhir, teknologi telah memainkan peran yang semakin penting dalam praktik audit. Penggunaan teknologi dalam praktik audit berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan audit. Beberapa dari banyak cara teknologi berperan dalam praktik audit meliputi:

1. Audit Data Analytics (ADA), yang memungkinkan auditor untuk menganalisis dan memanfaatkan kumpulan data besar dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan ADA dalam praktik audit dapat membantu auditor dalam melihat pola dan outlier dalam data, yang mengarah pada temuan audit yang lebih bermakna (AICPA, Audit Data Analytics Guide. , 2019).
2. Teknologi Audit Online (OAT) memungkinkan auditor untuk mengakses data klien dan dokumentasi audit dari jarak jauh, merampingkan proses audit. Selain itu, OAT berpotensi meningkatkan keamanan data dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penempatan dokumen fisik (AICPA, Online Audit Technology Guide, 2020).
3. Teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi data, dan membantu menurunkan risiko penipuan. Dalam praktik audit, blockchain dapat digunakan untuk menyegel transaksi dan membantu auditor dalam memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan klien (ISACA, 2019).
4. Kecerdasan buatan (AI) dapat membantu auditor melakukan analisis data yang lebih mendalam dan kompleks, serta

menemukan pola atau outlier yang akan sulit ditemukan dengan tangan dalam kumpulan data besar. Kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan dalam praktik audit untuk memproses dokumen dan data, dan untuk memprediksi hasil audit (Thornton, 2019).

5. Teknologi Cloud memungkinkan auditor untuk mengakses data dan dokumen klien dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi selama proses audit (Ernst & Young, 2020).

H. TANTANGAN DAN RISIKO AKUNTANSI AUDIT

Seperti kegiatan bisnis lainnya, akuntansi audit menghadirkan tantangan dan risiko uniknya sendiri yang harus dimitigasi. Beberapa kesulitan dan bahaya audit akuntansi antara lain:

1. Kemajuan pesat dalam teknologi dapat merampingkan proses audit, tetapi mereka juga meningkatkan taruhannya dalam hal keamanan data dan penipuan. Pengetahuan dan keterampilan seorang auditor harus terus diperbarui agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang pesat.
2. Kompleksitas peraturan yang berlaku dapat menyulitkan auditor untuk memahami dan menerapkan prosedur audit yang diperlukan. Pemahaman menyeluruh tentang peraturan yang berlaku sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan benar.
3. Keterbatasan waktu dan uang dapat menyulitkan auditor untuk melakukan pekerjaannya secara menyeluruh dan akurat. Untuk

memastikan bahwa audit dilakukan secara akurat, auditor harus dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan bijak.

4. Ketergantungan klien, Auditor sering mengandalkan klien untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk melakukan audit. Ada kemungkinan audit menjadi tidak akurat dan tidak lengkap jika klien tidak mau atau tidak dapat memberikan informasi yang akurat.
5. Kegagalan Mendeteksi Penipuan Meskipun Upaya Terbaik Auditor Penipuan atau kesalahan mungkin masih terjadi meskipun Auditor telah melakukan upaya terbaik. Kurangnya deteksi penipuan atau kesalahan dapat memiliki efek negatif pada kredibilitas auditor.

Untuk mengatasi tantangan dan risiko ini, auditor harus terus memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka, sambil mengawasi sifat teknologi dan peraturan yang berlaku yang terus berkembang. Selain itu, auditor harus melakukan audit dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, serta menjaga komunikasi yang konstan dengan klien untuk menjamin keakuratan audit..

BAGIAN 6
AKUNTANSI PUBLIK
(Sigit Mareta, S.E., M.Ak)

A. ORGANISASI PUBLIK

Akuntansi sektor publik berbeda secara luas dengan akuntansi sektor privat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik lingkungan organisasional diantara keduanya. Untuk memahami akuntansi sektor publik, kita perlu mengetahui karakteristik dari entitas organisasinya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan yang khusus dan berbeda dengan sektor privat. Berikut adalah perbedaan antara organisasi sektor publik dan privat.

Tabel 6.1 Perbandingan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Privat

Variabel Organisasi	Sektor Publik	Sektor Privat
Tujuan	Motif nonlaba	Motif laba
Karakteristik	Sangat kompleks, domain luas, Multifungsional Ketidakpastian tinggi	Lebih spesifik Pembagian fungsi lebih jelas <i>Controllable uncertainty</i>
Struktur	Birokrasi, kaku, hierarkis	Fleksibel
Proses	Penuh nuansa politis	Nuansa politis lebih tidak sebesar sektor publik
Sumber Dana	Publik	Pemilik, kreditur, investor (<i>shareholders</i>)

Tujuan organisasi publik mempengaruhi misi, strategi dan program yang akan dilaksanakan. Permasalahan sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas karena tidak setiap kegiatan dapat diukur secara andal karena organisasi sektor publik tidak berorientasi pada maksimalisasi keuntungan seperti pada organisasi bisnis. Pada sektor bisnis/swasta tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, penegakan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik seperti kebutuhan bahan pokok masyarakat, sehingga pada organisasi swasta lebih menekankan pada tujuan finansial daripada organisasi sektor publik. Meskipun demikian organisasi sektor publik tetap memperhatikan tujuan finansial, meskipun memiliki perbedaan filosofi, konsep, dan operasional dengan tujuan finansial pada organisasi bisnis. Pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak, devisa, pendapatan asli daerah, pembagian laba dari BUMN atau BUMD. Namun, upaya tersebut tetap ditunjukkan untuk sebesar-besarnya peningkatan pelayanan publik. Domain publik, yang begitu luas dan kompleks, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan dan inisiatif program dapat memiliki efek dari perspektif yang berbeda, seperti: Aspek sosial, ekonomi dan politik untuk organisasi dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam proses internal organisasi, lebih banyak nuansa politik dalam organisasi sektor publik daripada organisasi kehidupan komersial, sehingga diperlukan kompetensi politik para aktornya selain keterampilan teknis seperti di sektor swasta. Politik dapat didefinisikan sebagai upaya yang terdiri atas penempatan masalah pada agenda publik. Setelah diterima sebagai tanggung jawab publik yang mengikat, pengelola organisasi publik menyelenggarakan kegiatan rutin. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diperlukan alokasi sumber daya secara tepat, mengenai subjek partisipan, objek, waktu, dan anggaran dananya. Dalam kesuksesan pengelolaan organisasi publik, para manajer dan pengambil keputusan membutuhkan keahlian negosiasi dan politis yang tinggi dikarenakan sifat dari lingkungan organisasi dengan pemangku kepentingannya yang sangat kompleks dan mengandung potensi konflik kepentingan yang besar.

B. PERAN AKUNTANSI DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Akuntan publik mencakup proses dan tanggung jawab manajemen. Proses manajemen meliputi proses perencanaan, penganggaran dan persetujuan anggaran, yang meliputi penentuan fungsi kerja dan anggarannya. Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana karena berfokus pada pencarian sumber pendanaan dan pengalokasian dana ke dan dari publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntan publik, anggaran merupakan

titik awal untuk operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional), organisasi publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan. Sehingga, sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah *mandatory*.

Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditujukan pada organisasi publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakberpihakan (pada golongan), dan prediktabilitas (Christensen dkk., 2007). Isu yang menjadi perhatian pada reformasi organisasi publik saat ini dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif adalah implementasi *new public management* (NPM) untuk mencapai kinerja organisasi secara optimal dengan mempertimbangkan aspek *value for money* :

1. efisien,
2. ekonomi,
3. efektif.

Tujuan NPM terkait efisiensi terutama apakah pengambilan keputusan yang efektif merupakan bentuk lain dari efisiensi teknis atau efisiensi dalam hal biaya dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Akuntansi publik modern dengan konsep NPM dan *value for money* merupakan solusi atas buruknya pengelolaan organisasi publik yang sebelumnya terkesan tidak efisien dan tidak bertanggung jawab.

Implementasi konsep *national choice theory* dalam mengatasi *bounded rationality* yang terjadi dalam organisasi public dalam kaitannya dengan keterbatasan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan yang tak terbatas terjembatani oleh pelaksanaan akuntansi sektor publik yang akuntanbel dan transparan. Tuntutan pembaharuan (reformasi) system keuangan pada organisasi publik memiliki tujuan agar pengelolaan uang public dilakukan secara transparan berdasarkan konsep *value for money* sehingga dapat menciptakan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

C. ENTITAS DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

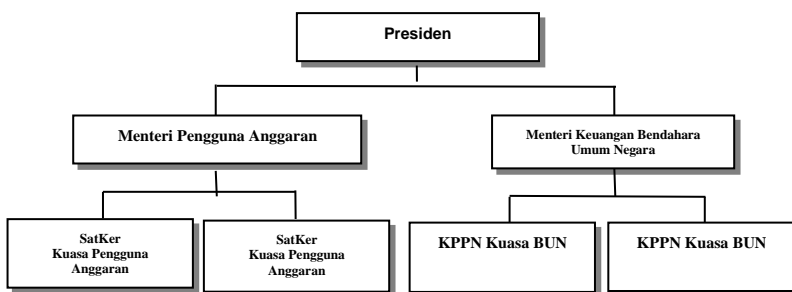
Akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, dibagi menjadi dua entitas, yaitu

1. Entitas pelaporan

Unit dalam struktur pemerintahan (pusat atau daerah) yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan (Ritonga, 2010). Entitas pelaporan pada pemerintah pusat menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan setelah berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat berubah menjadi entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap

organisasi kementerian negara dan lembaga lainnya wajib menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Dengan adanya perubahan entitas, kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat yang awalnya sebagai entitas akuntansi menjadi entitas pelaporan. Oleh karena itu, terdapat pengaruh PP Nomor 71 Tahun 2010 terhadap struktur organisasi pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintah pusat. Dampak apabila kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan instansi. Pada PP Nomor 24 Tahun 2005 penggunaan anggaran biasanya sebagai entitas akuntansi bukan entitas pelaporan. Berikut keterkaitan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Berikut ini adalah struktur organisasi pengelolaan keuangan negara :



Gambar 6.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Sumber : Suwadi, 2010, hlm. 76.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan*”. Dilanjutkan pada ayat (2) (poin a) bahwa *sebagian kekuasaannya tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan, dan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya* (poin b). Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan bertugas untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (pasal 8 poin g). Sementara itu, PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan penjabaran UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak mungkin menyimpang dari aturan di atasnya, sehingga dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan negara, presiden tetap sebagai pemegang kekuasaan.

Entitas pelaporan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar wajib menyusun laporan keuangan sektor publik, ada beberapa komponen laporan keuangan yang wajib untuk disajikan sesuai dengan SAP Berbasis Akrua, yaitu LRA, Laporan Perubahan SAL, neraca, Laporan Operasional, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta CaLK.

CaLK merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik.

2. Entitas akuntansi.

Entitas unit akuntansi unit pemerintah Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Keuangan (Ritonga, 2010). Entitas akuntansi ditingkat SAI adalah Sekjen, Ditjen, Badan, Eselon 2, dan Eselon 3, yang dilaksanakan oleh unit Akuntansi Eselon I (UAE 1) dan Unit Akuntansi Wilayah (UAW). Sedangkan pelaksana akuntansinya untuk tingkat kementerian atau Lembaga adalah sekjen, UAE 1 adalah pejabat eselon I dan UAW adalah Kakanwil (Asrori, 2010). Entitas akuntansi untuk tingkat pemerintah daerah adalah pengguna anggaran/barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran dalam akuntansi berada didalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2009) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Mardiasmo 2009 menyatakan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya;
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missppropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup

untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavorable variances*);
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians;
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik (*political skill*), membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang

memadai oleh para manajer publik. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena itu, anggaran adapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*, maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat

dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai Alat untuk menciptakan Ruang Publik

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

BAGIAN 7

AKUNTANSI PEMERINTAH

(Henky Hendrawan, Drs., M.M., M.Si)

A. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Untuk dapat memahami akuntansi pemerintahan, maka hendaknya kita juga memahami pola keuangan yang digunakan dalam pemerintahan. Karena sejak bergulirnya pola reformasi, pola keuangan di negara kita pun mengalami perubahan (terkait bahasan Keuangan Negara, dapat dilihat pada buku saya yang berjudul "Keuangan Negara"). Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan keuangan dalam rangka reformasi. Paket tersebut adalah:

1. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).

Dari kumpulan regulasi diatas, nampak bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pun mengalami perubahan. Dan untuk memahami Sistem Akuntansi Pemerintahan, sebaiknya juga memahami pengertian, karakteristik, prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.

Merunut PP no 71 tahun 2010, yang dimaksud dengan Akuntansi Pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian pelaporan informasi ekonomi yang sesuai dengan aturan ketatanegaraan dan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pemerintahan (*PP No 71 Tahun 2010 - Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010*).

Sedangkan pengertian Akuntansi Pemerintahan berdasarkan beberapa para ahli diantaranya adalah :

- Menurut Kustadi Arinta, akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan (Arinta, 1996).

- Menurut Revrisond Baswir, Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba (Baswir, 2006).
- Menurut Bachtiar Arif mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif et al., 2002).
- Menurut Abdul Halim menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan (Halim, 2004).

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah aktifitas (kegiatan) yang dimulai dari proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian pelaporan yang menyediakan informasi keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan atau pihak-pihak yang membutuhkan.

B. MODEL DAN CIRI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tentunya dalam memahami Akuntansi Pemerintahan ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui dalam menentukan model akuntansi nya. Pertimbangan tersebut adalah (Yusra, 2016):

1. Struktur Pemerintahan, umumnya dibutuhkan untuk melindungi dan melayani kebutuhan rakyatnya. Biasanya berdasarkan sistem check dan balance antar ketiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
2. Sifat dari Sumber Daya, dalam pemerintahan tidak terdapat keterkaitan langsung antara berbagai sumber daya. Sehingga akan sulit mengukur secara nilai uang antara pemberi uang dengan kenikmatan natura yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Proses Politik memegang peranan penting, dalam penentuan kebijakan arah pembangunan. Dan ini tentunya akan mempersulit akuntansi pemerintah dalam menyediakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang dapat memuaskan semua pihak baik yang pro maupun yang kontra pemerintahan.

Dengan adanya pemahaman akan model akuntansi pemerintahan, maka ini akan membawa ciri-ciri sebagai berikut (Hasanah & Fauzi, 2017):

1. Akuntansi pemerintah tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran perolehan laba seperti akuntansi komersial, akan tetapi lebih pada penggambaran tentang penggunaan dana

- pemerintah atas biaya-biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
2. Akuntansi pemerintah tidak diperlukannya penyesuaian untuk penyusutan sebagai metode alokasi biaya tetapi sebagai pengurangan nilai atas pengkonsumsian manfaat aset atau pengurangan nilai karena keusangan, biaya dibayar dimuka ataupun biaya yang masih harus dibayar.
 3. Akuntansi pemerintah mempunyai tanggung jawab tertentu yang melebihi beban pada akuntansi komersial, dimana dalam perkiraan-perkiraan akuntansi pemerintah harus menyediakan data keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah.

C. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN AKUNTANSI KOMERSIAL

Terkait dengan pemahaman akan Akuntansi Pemerintahan, maka ada baiknya kita juga mengetahui perbedaan dan persamaan antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial (Yusra, 2016).

- Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial:
 - Akuntansi Pemerintahan
 1. Kegiatannya tidak ditujukan untuk mencari laba.
 2. Bersifat kaku dan banyak aturan yang mengikatnya.
 3. Tidak membuat catatan kepemilikan pribadi.
 4. Pembuatan anggaran harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

5. Tidak melaksanakan perkiraan biaya penyusutan sebagai metode alokasi biaya
- Akuntansi Komersial
 1. Kegiatannya ditujukan untuk mencari laba.
 2. Bersifat luwes dan fleksibel.
 3. Membuat catatan kepemilikan pribadi.
 4. Pembuatan anggaran harus mendapat persetujuan Dewan Direksi / Dewan Pemilik (RUPS).
 5. Harus melakukan/melaksanakan perkiraan biaya penyusutan sebagai metode alokasi biaya.
- Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial:
1. Baik akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial sama-sama mempunyai tujuan sebagai penyedia informasi keuangan yang lengkap, cermat dan tepat waktu.
 2. Dalam pemenuhan kebutuhan informasi, akuntansi pemerintah menggunakan konsep-konsep akuntansi, konvensi-konvensi, praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang sama seperti pada akuntansi komersial.
 3. Untuk akuntansi pemerintah dan juga akuntansi komersial menggunakan siklus akuntansi yang sama.
 4. Baik akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial, keduanya menggunakan istilah-istilah akuntansi yang sama, seperti buku besar, buku harian, neraca dan lain sebagainya
 5. Konsep akuntansi yang diakui secara luas seperti konsistensi, objektivitas, biaya, full disclosure, materialitas dan konservatif

sama-sama dipakai di akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial.

Dari perbedaan dan persamaan diatas maka untuk pelaporan keuangannya pun ada perbedaan, seperti berikut:

Akuntansi Pemerintahan	Akuntansi Komersial
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran	2. Laporan Ikhtisar Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan	4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dari gambaran diatas, maka didapat bahwa yang terjadi perbedaan adalah pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Ikhtisar Laba Rugi.

D. Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan

Ditilik dari Peraturan Pemerintahan no 71 tahun 2010, maka prinsip-prinsip berikut yang harus dipahami dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami apa yang tersaji dalam laporan tersebut. Berikut prinsip-prinsip yang harus ditaati, sebagai berikut (*PP No 71 Tahun 2010 - Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010*):

1. Basis Akuntansi.

Dalam Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang dipergunakan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Tapi dalam penyusunan LRA, basis yang digunakan adalah basis kas terkecuali hal-hal tertentu yang diharuskan berbasis akrual.

2. Nilai historis.

Dalam pencatatan kegiatan akuntansinya hendaknya mengandung nilai historisnya. Namun bila tidak terdapat nilai historisnya maka digunakan nilai wajar.

3. Realisasi.

Dalam penyusunan LRA merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (*matching-cost with revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal.

Informasi yang disajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

5. Periodisitas.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode. Periode pelaporan sehingga

kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Konsistensi.

Perlu konsistensi dalam perlakuan akuntansi di tiap periode nya, kecuali bila dibutuhkan adanya perubahan.

7. Pengungkapan Lengkap

Dalam penyajian laporan keuangan perlu adanya pengungkapan yang lengkap sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran atas laporan keuangan tersebut. Dan ini biasanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian wajar

Pada laporan keuangan, semua penyajian pos-pos akun dilakukan dengan penyajian yang wajar dengan mengutamakan unsur kehati-hatian dan pertimbangan sehat akan pelaporan keuangan.

E. JENIS DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dari pemahaman, model dan ciri pada Akuntansi Pemerintahan maka ada 3 jenis akuntansi yang digunakan dalam kegiatannya.

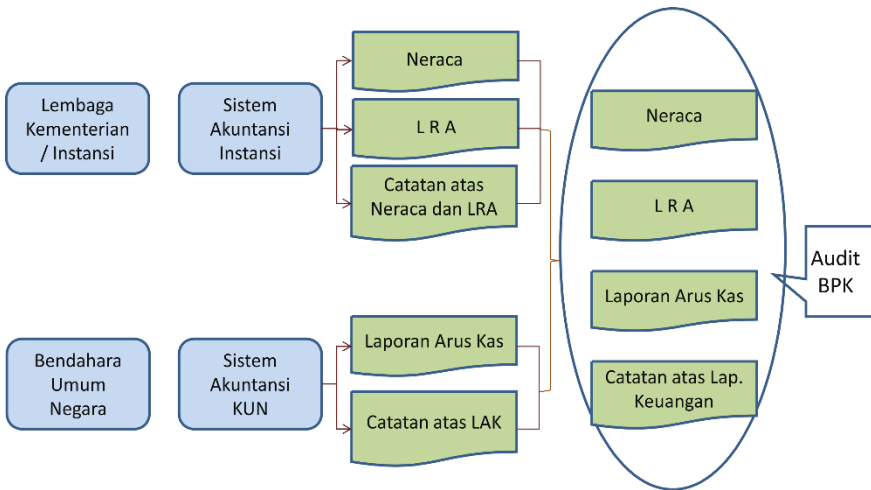
Ketiga jenis akuntansi tersebut adalah (Solihin, 2006):

1. Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary Based), akuntansi yang dilaksanakan atas dasar anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Dalam laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan atau pengeluaran akrual saj

tapi harus ada pembandingnya dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based), akuntansi yang mengakui dan mencatat hanya pada saat transaksi keuangan kas. Fokus pengukuran hanya pada saat saldo kas dan perubahan saldo kas.
3. Akuntansi Berbasis Akrua (Accrual Based), akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Dan sistem ini lah yang paling baik, karena informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap.

Demikian pula dengan sistem yang dipergunakan pada Akuntansi Pemeritahan nampak pada bagan berikut (Nur Afiah, 2020):



Gambar 7.1. SAP - Pusat

Di gambar diatas , nampak bahwa terdapat 2 sistem akuntansi yakni: (a) Sistem Akuntansi Kemernterian/Instansi; dan (b) Sistem Akuntansi

KUN (Keuangan Umum Negara). Dari kedua sistem tersebut akan dikonsolidasikan menjadi laporan yang utuh dan siap untuk diaudit.

F. CONTOH PENJURNALAN DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Berikut akan ditampilkan beberapa contoh penjurnalan atas transaksi dalam Akuntansi Pemerintahan. Yang mana sebagai bahan gambaran saja.

Contoh pertama, misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 300.000.000 secara tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara:

Keterangan	Debet	Kredit
Belanja Kendaraan	300.000.000	
Kas		300.000.000

Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan disajikan dalam Neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah, dibutuhkan jurnal tambahan yaitu

jurnal korolari sebagai solusi penerapan basis kas menuju akrual ini. Masih mengacu pada transaksi di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah:

Keterangan	Debet	Kredit
Belanja Kendaraan	300.000.000	
Kas		300.000.000
Jurnal Korolari		
Kendaraan	300.000.000	
Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap		300.000.000

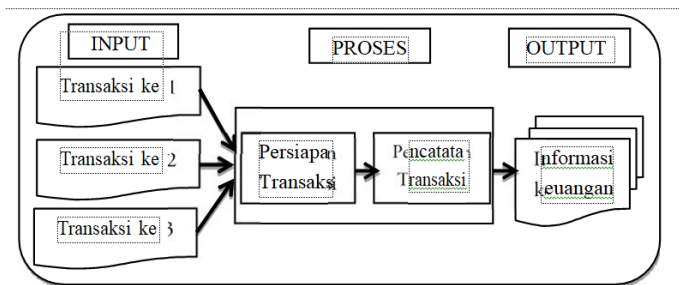
Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disisi lain, Neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikan dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti kendaraan.

Dari kedua contoh di atas, nampak bahwa dari sejak awal penjurnalan sudah terdapat perbedaan cara pencatatannya dibandingkan dengan akuntansi komersial. Sehingga dalam penyajian akan laporan keuangannya pun harus dipahami jika terdapat perbedaan.

BAGIAN 8
AKUNTANSI UMKM
(Rita Andini S.E., M.M)

A. AKUNTANSI UMKM

Di dalam arti yang sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penggunaan data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2013). Ringkasnya proses akuntansi dapat dituangkan seperti Gambar 8.1 di bawah ini:



Gambar 8.1. Proses Akuntansi

UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. Namun saat ini masih banyak UMKM

yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit akibat tidak jelasnya sistem akuntansi mereka. Oleh karenanya, UMKM perlu melakukan perbaikan sistem akuntansi. Praktik akuntansi yang baik dan penggunaan informasi akuntansi yang tepat guna akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan usaha UMKM.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain:

1. UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan
2. UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik
3. UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya
4. UMKM dapat membuat anggaran yang tepat
5. UMKM dapat menghitung pajak
6. UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu.

Melihat manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi perusahaan mereka. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM

khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Adanya tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya.

Metoda praktis dan manjur dalam pengelolaan dana di perusahaan bisnis, termasuk UMKM, adalah dengan mempraktikkan akuntansi secara baik. Pada prinsipnya, akuntansi adalah sebuah sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM jika mempraktikkan akuntansi dengan baik dan benar, yaitu:

a. Informasi kinerja perusahaan

Akuntansi menghasilkan laporan laba/rugi (*income statements*) yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Informasi ini sangat penting karena UMKM dapat menggunakan laporan laba/rugi sebagai bahan evaluasi secara periodik. Jika laporan laba/rugi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami rugi atau penurunan laba dibanding periode sebelumnya maka perusahaan menganalisis penyebab-penyebab terjadinya kerugian atau penurunan laba. Sebaliknya, jika laporan laba/rugi menunjukkan bahwa UMKM memperoleh laba atau

kenaikan laba dibanding periode sebelumnya maka perusahaan dapat mempertahankan proses bisnis yang telah dilakukan, atau mengembangkan proses bisnis agar laba meningkat.

b. Informasi penghitungan pajak

Berdasar laporan laba/rugi yang dihasilkan akuntansi, UMKM dapat secara akurat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar untuk periode tertentu, atau bahkan dapat mengajukan restitusi pajak.

c. Informasi posisi dana perusahaan

Akuntansi menghasilkan neraca (*balance sheets*) yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset (disebut harta atau aktiva) dan sumber-sumber pemerolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas. Informasi ini penting karena memberi gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Berdasar informasi keuangan yang terdapat di neraca, perusahaan maupun pihak lain dapat mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh perusahaan pendanaannya sebagian besar berasal dari utang atau dari ekuitas. Perusahaan dengan komposisi utang yang sangat besar berisiko tinggi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa bunga utang.

d. Informasi perubahan modal pemilik

Akuntansi menghasilkan laporan perubahan ekuitas (*statements of equity changes*) yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. Pemilik

perusahaan membutuhkan informasi ini untuk mengetahui perkembangan modal yang telah ditanamkan ke perusahaan. Pemerolehan laba yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesuksesan perusahaan jika ternyata pengambilan dana oleh pemilik melebihi laba yang dihasilkan

e. Informasi pemasukan dan pengeluaran kas

Akuntansi menghasilkan laporan arus kas (*statements of cash flow*) yang mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset utama berupa kas. Pengelolaan dana perusahaan lazimnya berhubungan positif dengan keberhasilan perusahaan; semakin baik pengelolaan kas maka semakin besar kesuksesan yang diraih perusahaan, dan sebaliknya.

f. Informasi perencanaan kegiatan

Akuntansi menghasilkan laporan anggaran (*budget*) yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan perusahaan selama periode tertentu, beserta pendanaan yang akan dibutuhkan atau yang diperoleh.

g. Informasi besaran biaya

Akuntansi menghasilkan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta informasi lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tersebut. Sebagai contoh, akuntansi dapat menyediakan informasi tentang fluktuasi biaya yang harus ditanggung perusahaan per hari, minggu, bulan, dst.

B. BUDGETTING UNTUK UMKM

Budgetting diperlukan sebagai fungsi perencanaan, operasional dan pengendalian bagi sebuah entitas. UMKM sebagai salah satu bentuk entitas juga memerlukan *budgetting* meskipun dalam tingkatan yang lebih mudah dan sederhana. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep penganggaran dan bagaimana UMKM dapat menerapkan konsep tersebut untuk diimplementasikan. Salah satu karakteristik UMKM adalah adanya keterbatasan sumber daya, baik sumberdaya finansial maupun non finansial, seperti sumber daya manusia, meskipun hal ini tidak dapat digeneralisir. Seperti pebisnis pada umumnya, pelaku UMKM juga sebaiknya dari awal melakukan suatu perencanaan yang baik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Salah satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah *budget*.

Budgetting adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka *budgetting* seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Pentingnya *budgetting* bagi UMKM antara lain sebagai berikut:

a. *Budgetting* sebagai alat perencanaan.

UMKM biasanya memiliki keterbatasan finansial. Adanya keterbatasan finansial, pelaku UMKM seharusnya melakukan perencanaan yang cermat mengenai apa yang akan dilakukan

dengan uang yang terbatas tersebut. Jangan sampai keterbatasan finansial menjadi kendala bagi UMKM untuk maju dan berkreasi. Uang yang terbatas tersebut juga harus direncanakan dengan cermat sehingga digunakan dengan efektif dan efisien. Anggaran bagi UMKM sebagai alat perencanaan ini juga digunakan untuk menetapkan target usaha misalnya berapa target penjualan selama satu bulan dan berapa kisaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penjualan tersebut.

b. *Budgetting* sebagai alat koordinasi.

Pelaku UMKM harus mampu memadukan dan menyeimbangkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik finansial maupun non finansial untuk mencapai target usaha yang diinginkan. Misalnya pemilihan *supplier* yang dapat memberikan harga yang paling murah, dan sebagainya.

c. *Budgetting* sebagai alat pengendalian.

Budgetting bagi pelaku UMKM juga dapat difungsikan sebagai alat pengendalian bagi aktivitas usaha. Misalnya, pelaku UMKM dapat melakukan pengamatan secara fisik terhadap jumlah barang yang ada di toko kemudian membandingkannya dengan data persediaan. Pelaku UMKM dapat memonitor pula sejauh mana target usaha telah tercapai dengan membandingkan penjualan real dengan anggaran penjualan.

Berdasarkan penjelasan di atas yang ada terkait budgeting pada UMKM dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan anggaran

dalam suatu entitas bisnis tidak terkecuali UMKM sangat penting. Di dalam beberapa literatur disebutkan pula bahwa ada beberapa jenis anggaran, baik yang dikategorikan menurut dasar penyusunan anggaran, cara penyusunan, jangka waktu, bidang anggaran, fungsi dan ruang lingkup.

C. PEMBIAYAAN UNTUK UMKM

Pembahasan mengenai pembiayaan bagi UMKM sangat penting dalam kaitannya untuk mewujudkan kegiatan yang menjadi inti bisnis dari UMKM itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan bagi UMKM bisa berasal dari:

1. Koperasi
2. Baitul Mal Wa' Tamwil (BMT)
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah
4. Bank pemerintah dan swasta, serta asing
5. Lain-lain

Berikut akan dibahas satu per satu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lembaga tersebut dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembiayaan bagi UMKM.

1. Koperasi

Sejak dahulu koperasi sudah sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang murah dan mudah bagi UMKM karena syarat yang tidak sesulit bank. Koperasi yang dimaksud dalam konteks ini tentu adalah

koperasi simpan pinjam. Apabila dibandingkan dengan bank, koperasi biasanya menawarkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan bank. Selain itu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku UMKM juga tidak terlalu sulit dibandingkan pengajuan pinjaman ke bank.

2. Baitul Maal Wa' Tamwil (BMT)

BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah Islam. Pengawasan BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Keunggulan BMT sebagai lembaga pembiayaan bagi UMKM adalah penerapan sistem bagi hasil yang diharapkan dapat mengurangi diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya. Selain itu, sebagai lembaga keuangan mikro, BMT juga memiliki keunggulan berupa kemudahan akses bagi pelaku UMKM karena persyaratan pembiayaan yang mudah dan murah.

3. BPR dan BPRS

BPR dan BPRS adalah bank yang melayani golongan pengusaha UMKM dengan lokasi yang umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Apabila dibandingkan dengan koperasi dan BMT, BPR dan BPRS pada umumnya memiliki keunggulan karena kemampuan finansialnya yang lebih besar, sehingga pelaku UMKM dapat meminjam kredit dengan jumlah yang relatif lebih besar. Dibandingkan dengan bank umum, BPR dan BPRS biasanya memiliki suku bunga pinjaman dan atau bagi hasil atas pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan bank umum.

4. Bank umum (pemerintah, swasta, asing)

Bank umum memiliki kapasitas dana yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya. Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dana yang besar maka pilihan pengajuan pembiayaan kepada bank bisa dilakukan. Namun demikian, persyaratan pinjaman di bank biasanya lebih rumit dan lebih kompleks.

5. Lain-Lain

Sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM sebenarnya sangat banyak, termasuk yang tidak dicantumkan dalam penjabaran di atas. Sumber pembiayaan lain-lain dapat pula bersifat informal. Beberapa tahun belakang ini, banyak pula bermunculan UMKM berbasis *start-up*. Yaitu perusahaan yang baru berkembang dan biasanya bergerak di bidang teknologi dan informasi. Perbedaan karakteristik utama UMKM pada umumnya dengan yang berbasis *start-up* adalah pada risiko dan potensi pengembangannya. Perusahaan *start-up* biasanya memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi karena kebanyakan dari mereka masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Namun demikian, potensi pengembangannya juga sangat besar. Di Indonesia, UMKM berbasis *start up* diantaranya adalah Wahyoo, Warung Pintar, Moka, Majoo, Olsera, dan masih banyak yang lainnya. Sumber pembiayaan bagi *start-up* biasanya berasal dari modal ventura (*venture capital*) dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan swasta besar untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, untuk membantu para pemilik UMKM, Kementerian Negara

Koperasi dan UKM membentuk suatu lembaga yang disebut sebagai Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam pemberian pinjaman serta pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM.

D. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK UMKM

Output akuntansi berupa laporan keuangan (*financial statements*) umumnya terdiri dari 4, yaitu:

1. Laporan laba/rugi,
2. Neraca (laporan posisi keuangan),
3. Laporan perubahan ekuitas, dan
4. Laporan arus kas.

Laporan laba/rugi menyajikan penghitungan laba/rugi UMKM selama 1 (satu) periode tertentu. Laporan laba/rugi mencerminkan kinerja keuangan UMKM dalam melakukan aktivitas bisnisnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang diakui. Bentuk laporan Laba Rugi ada 2, yaitu :

Langkah tunggal (*single step*) dan Langkah bertahap (*multiple step*). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, menyajikan informasi pada tanggal tertentu tentang aset yang dikuasai UMKM dan sumber pendanaan terhadap aset tersebut baik yang berasal dari utang maupun modal. Sesuai dengan namanya, neraca terdiri dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi kiri (debit) dan sisi kanan (kredit). Informasi keuangan

tentang aset lazimnya ditempatkan di sisi kiri, sedangkan informasi utang dan ekuitas ditempatkan di sisi kanan.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas UMKM selama satu perioda. Bagi pemilik atau investor, laporan ini menjadikan mereka dapat mengetahui perubahan ekuitas, baik yang berupa penambahan setoran modal pemilik, pengembalian ekuitas ke pemilik, laba ditahan (*retained earnings*), dsb.

Laporan arus kas (*cash flow statement*) menyajikan informasi tentang kas, baik berupa aliran masuk kas maupun aliran keluar kas UMKM. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Mencermati laporan ini maka para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kemampuan UMKM dalam mengelola kas yang dianggap sebagai salah satu aset utama dan sebagai prediktor kemampuan UMKM di masa datang.

E. KOPERASI DAN PERKEMBANGANYA DI INDONESIA

Koperasi merupakan himpunan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan otonom dalam rangka mencukupi kebutuhan dan aspirasi. Tujuan perusahaan koperasi adalah melayani anggota memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga profit atau laba bukan orientasi (tujuan utama) dari perusahaan koperasi. Di dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU),

yaitu sebuah sisa dari proses bisnis. Di dalam tradisi Eropa dan Amerika, perusahaan koperasi termasuk dalam model perusahaan sosial/*social enterprise*. sehingga laporan laba/rugi menggunakan pendekatan *double/triple bottom line*. Sedangkan di Indonesia, ketimpangan sosial ekonomi sangat tinggi. Pendapatan 4 milyarder terkaya di Indonesia setara dengan konsumsi pokok 100 juta penduduk miskin Indonesia (OXFAM, 2017). Dan dilihat dari segi kekayaan, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 77 persen kekayaan di negeri ini. Lebih kontras lagi, 1 persen orang terkaya tersebut menguasai 50,3 persen kekayaan bangsa ini. Sisa kekayaan yang 50 persen lagi diperebutkan oleh 99 persen penduduk alias 247,5 juta jiwa (Bank Dunia, 2019). Dan, cara untuk mengatasi suatu ketimpangan yaitu melalui konsep *Growth Through Equity* yang artinya pertumbuhan melalui pemerataan. Suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila syarat pemerataan tersebut dipenuhi terlebih dahulu. Apabila pemerataan tidak bisa terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terjadi.

F. AKUNTANSI KOPERASI

Akuntansi adalah suatu seni tentang pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan mengenai peristiwa-peristiwa keuangan yang terjadi di dalam rumah tangga perusahaan atau lembaga usaha dengan cara yang sistematis serta penafsiran hasil-hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan,

pelaporan dan penafsiran. Akuntansi koperasi adalah suatu seni tentang pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan mengenai peristiwa-peristiwa keuangan yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya, yang terjadi di dalam Perusahaan Koperasi dengan cara yang sistematis serta penafsiran hasil-hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penafsiran.

Selain itu, mengapa koperasi berbeda dalam akuntansinya adalah, karena filosofi moralnya berbeda dengan perusahaan swasta kapitalis. Koperasi adalah suara kemanusiaan yang menghendaki kebahagiaan dalam hidup bersama dengan menolak keserakahan (*greedy*), eksploitasi (*exploitation*) pada manusia lain dan konsentrasi kekayaan (*concentration*) pada segelintir orang. Hal ini juga dikarenakan koperasi *benefit oriented* dan bukan *profit oriented*. Pada umumnya sebuah perusahaan didirikan bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga akuntansi merupakan alat untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Tetapi berbeda dengan koperasi, tujuan koperasi didirikan adalah untuk memberikan nilai lebih bagi para anggota, membantu anggota menolong dirinya sendiri (*self help*) mencapai kesejahteraan, sehingga akuntansi harus menjadi alat untuk mengetahui seberapa besar *benefit* yang diterima anggota koperasi.

Modal koperasi diperoleh dari simpanan anggota. Hal ini berbeda dengan modal akuntansi komersil lainnya, yaitu dalam hal permodalan, akuntansi komersil memperoleh modal dari penjualan

saham, langsung melalui perusahaan atau bursa. Permodalan pada koperasi dapat berwujud simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang masuk unsur permodalan. Diantara simpanan-simpanan tersebut, yang paling erat hubungannya dengan keanggotaan adalah simpanan pokok. Persyaratan seseorang untuk menjadi anggota koperasi minimal harus sanggup untuk melunasi simpanan pokoknya, yang dibayar pada saat masuk menjadi anggota. Sementara Simpanan Wajib dibayar setiap periode selama menjadi anggota, dimana besarnya tidak harus sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, apa yang membuat akuntansi koperasi itu berbeda. Antara lain , akuntansi Koperasi harus :

- Menyajikan setiap transaksi yang terjadi baik dari aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya.
- Menominalkan setiap kegiatan yang dilakukan koperasi.
- Menyajikan informasi secara akurat atas semua transaksi yang dilakukan oleh anggota maupun bukan anggota.
- Menyajikan informasi perihal partisipasi anggota.
- Harus melakukan pemisahan yang jelas antara biaya operasional dan biaya perkoperasian.
- Memisahkan dengan jelas antara Laba Usaha dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).
- Menyajikan informasi (dinominalkan) perihal manfaat/benefit yang diterima setiap anggota koperasi.

- Menyajikan informasi perihal kekayaan anggota koperasi berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib maupun simpanan lain yang masuk kedalam kekayaan.
- Menyajikan informasi distribusi dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.

BAGIAN 9

AKUNTANSI PERBANKAN

(Ika Wulandari, S.E., M.M)

A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI BANK

Akuntansi perbankan merupakan pencatatan, penyajian dan pengikhtisaran dari transaksi keuangan yang terjadi pada bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya terdiri atas penghimpunan dana, penyaluran dana dan perantara dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan penghimpunan dana meliputi penghimpunan dana dari nasabah atau disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito. Persamaan Dasar Akuntansi dalam Bank menggambarkan hak dan kewajiban bank yaitu antara kekayaan dan sumber dana atau kewajibannya. Persamaan dasar akuntansi secara umum adalah :

Aktiva = Pasiva

Aktiva = Utang + Modal

Aktiva = Utang + Modal + Pendapatan – Biaya

Ilustrasi 1

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Bank Sentosa pada tahun 2022 :

1. Didirikan Bank Sentosa dengan setoran modal Rp 5.000.000.000 secara tunai

2. Dibuka rekening tabungan a.n Hafidz Gibran sebesar Rp 10.000.000
3. Dibuka rekening Deposito a.n Zhafran Rasya sebesar Rp 25.000.000
4. Diambil rekening tabungan Hafidz Gibran sebesar Rp 5.000.000
5. Diberikan kredit kepada Rafaizan sebesar Rp 50.000.000 tunai

Dari ilustrasi di atas, persamaan dasar akuntansi yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tabel Persamaan Dasar Akuntansi (dalam ribuan rupiah)

No	Kas	Kredit diberikan	Tabungan	Deposito	Modal
1	+5.000.000	-	-	-	+5.000.000
2	+10.000	-	+10.000	-	-
3	+25.000	-	-	25.000	-
4	(5.000)	-	(5.000)	-	-
5	(50.000)	+50.000	-	-	-
	4.980.000	50.000	5.000	25.000	5.000.000
	5.030.000			5.030.000	

Berdasarkan persamaan dasar yang telah dibuat jumlah antara yang di sisi Aset dan di sisi Kewajiban ditambah Modal adalah sama yaitu sebesar Rp 5.030.000.000,00.

B. AKUNTANSI GIRO NASABAH

Giro nasabah merupakan simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro. Giro dianggap sebagai utang jangka pendek yang harus segera dibayarkan kapanpun pemilik giro mengambilnya. Sehingga dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) giro terletak di sebelah Pasiva di sisi Kewajiban atau Utang. Apabila giro bertambah dimana terjadi penyetoran oleh nasabah, maka oleh bank akan dicatat di sebelah kredit. Jika giro berkurang, dimana terjadi penarikan, maka giro akan dicatat di sebelah debit.

Ilustrasi 2

Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Bank Sentosa Yogyakarta atas rekening Giro Tuan Akma pada bulan April 2022

1 April 2022 Dibuka rekening Giro a.n Tuan Akma sebesar Rp 70.000.000,00 untuk itu Tuan Akma dikenai biaya pengganti barang cetakan sebesar Rp100.000,-

6 April 2022 Tuan Akma melakukan penyetoran giro di Bank Sentosa Yogyakarta sebesar Rp 10.000.000,-

8 April 2022 Tuan Akma melakukan penarikan giro dengan menggunakan cek No. 123 sebesar Rp 30.000.000,-

11 April 2022 Tuan Akma melakukan penyetoran giro sebesar Rp 20.000.000 melalui Bank Sentosa Semarang.

30 April 2022 diperhitungkan jasa giro sebesar 1% per tahun kepada Tuan Akma yang didasarkan pada saldo giro terendah. PPh atas jasa

giro 20% dan Tuan Akma dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,00.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat dibuat Jurnal sebagai berikut :

BANK SENTOSA CABANG YOGYAKARTA
JURNAL UMUM
April 2022

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1 April 2022	Kas Giro-Akma Barang cetakan (mencatat pembukaan giro)		70.100.000	70.000.000 100.000
6 April 2022	Kas Giro -Akma (mencatat setoran giro)		10.000.000	10.000.000
8 April 2022	Giro – Akma Kas (mencatat penarikan cek No.123)		30.000.000	30.000.000
11 April 2022	RAK Cabang Semarang Giro-Akma (Mencatat setoran giro melalui Cabang Semarang)		20.000.000	20.000.000
30 April 2022	Beban jasa giro Giro – Akma Utang PPh		50.000	40.000 10.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	(untuk mencatat jasa giro)			
30 April 2022	Giro-Akma Pendapatan administrasi (mencatat pendapatan administrasi)		50.000	50.000

Perhitungan Jasa Giro

- ✓ Saldo terendah Giro terjadi pada tanggal 8 April 2022 sebesar Rp 50.000.000
- ✓ Pajak dikenakan jika saldo giro di atas Rp 7.500.000,00

$$\text{Jasa Giro} = \text{Rp } 50.000.000 \times 1,2 \% \times 30/365 = \text{Rp } 50.000,00$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 50.000 = \underline{\text{(Rp } 10.000,00)}$$

$$\text{Jasa giro bersih} = \text{Rp } 40.000,00$$

C. AKUNTANSI TABUNGAN NASABAH

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan kartu ATM atau slip penarikan tabungan. Tabungan nasabah berada di sisi Kewajiban/Utang jangka pendek. Saldo normal Tabungan berada di sebelah kredit, yang berarti jika tabungan bertambah akan dikredit dan jika berkurang akan didebit.

Ilustrasi 3

Berikut adalah mutasi rekening Tabungan SIAP a.n Zhafran pada bulan Juni 2022 di Bank Sentosa Yogyakarta:

1 Juni 2022 Dibuka rekening tabungan SIAP a.n Zhafran sebesar Rp 5.000.000,00

8 Juni 2022 Diambil rekening tabungan SIAP a.n Zhafran Rp 2.000.000,-

16 Juni 2022 Zhafran mengambil tabungan SIAP sebesar Rp 750.000,00

22 Juni 2022 Zhafran menyetorkan tabungan sebesar Rp 1.000.000 melalui Bank Sentosa Bandung

30 Juni 2022 Diberikan bunga tabungan kepada Zhafran sebesar 2% per tahun berdasarkan saldo rata-rata. Pajak 20% dikenakan jika saldo tabungan di atas Rp 7.500.000,00. Zhafran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000 atas tabungannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

BANK SENTOSA CABANG YOGYAKARTA

JURNAL UMUM

Juni 2022

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1 Juni 2022	Kas Tabungan SIAP- Zhafran (mencatat setoran perdana tabungan)		5.000.000	5.000.000
8 Juni 2022	Tabungan SIAP-Zhafran Kas (mencatat penarikan Tabungan)		2.000.000	2.000.000
16 Juni 2022	Tabungan SIAP-Zhafran Kas (Mencatat penarikan tabungan)		750.000	750.000
22 Juni 2022	RAK Cabang Bandung Tabungan Siap- Zhafran (mencatat setoran tabungan melalui Cabang Bandung)		1.000.000	1.000.000
30 Juni 2022	Beban Bunga Tabungan SIAP- Zhafran		5.547.95	5.547.95

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	(mencatat pembayaran bunga kepada nasabah)			
30 Juni 2022	Tabungan SIAP-Zhafran Pendapatan administrasi (mencatat biaya administrasi yang dibayarkan nasabah)		10.000	10.000

Perhitungan :

Mutasi Rekening

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1 Juni	Setoran perdana	-	5.000.000	5.000.000
8 Juni	Penarikan	2.000.000	-	3.000.000
16 Juni	Penarikan	750.000	-	2.250.000
22 Juni	Setoran		1.000.000	3.250.000

Saldo rata-rata adalah =

$$\frac{Rp\ 5.000.000 + Rp\ 3.000.000 + Rp\ 2.250.000 + Rp\ 3.250.000}{4}$$

$$= Rp\ 3.375.000,00$$

$$\text{Perhitungan bunga} = Rp\ 3.375.000 \times 2\% \times 30/365 = Rp\ 5.547,95$$

Tidak ada pajak, karena saldo tabungan tidak lebih dari Rp 7.500.000,00

D. AKUNTANSI DEPOSITO BERJANGKA

Deposito Berjangka adalah simpanan nasabah yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu pada saat jatuh tempo. Deposito berjangka masuk dalam kategori kewajiban, dimana saldo normal berada di sebelah kredit. Apabila deposito berjangka bertambah, maka akan dikredit dan jika berkurang maka akan didebit.

Ilustrasi 4

5 Juli 2022 Tuan Dwinanto membuka deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan di Bank Sentosa Yogyakarta. Nominal deposito adalah Rp 20.000.000,00 dengan bunga deposito adalah 6% per tahun. Untuk pembukaan deposito, nasabah dibebani materai Rp 10.000,00. Bunga deposito diberikan keseluruhan saat jatuh tempo

5 Januari dicairkan deposito berjangka Tuan Dwinanto

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah :

BANK SENTOSA CABANG YOGYAKARTA
JURNAL UMUM

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5 Juli 2022	Kas Deposito Berjangka Persediaan materai (mencatat pembukaan deposito)		20.010.000	20.000.000 10.000
5 Januari	Deposito Berjangka		20.000.000	

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	(mencatat pengambilan deposito sebelum jatuh tempo)			

Perhitungan

Nominal Deposito	Rp 20.000.000,00
Beban bunga = $Rp\ 20.000.000 \times 6\% \times 2/12$	Rp 200.000,00
Utang PPh = $20\% \times Rp\ 20.000.000,00$	(Rp 40.000,00)
Penalty = $1,5\% \times Rp\ 20.000.000,00$	(Rp 300.000,00)
Jumlah kas yang diterima nasabah	Rp 19.860.000,00

E. AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN

Kegiatan bank selain melakukan penghimpunan dana juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk Kredit. Kredit merupakan salah satu jenis Aset Produktif bank yang dapat menghasilkan pendapatan, berupa pendapatan bunga, provisi, komisi, fee dan lainnya. Saldo normal Kredit yang Diberikan berada di sisi debit. Artinya jika kredit yang diberikan bertambah, maka akan didebit dan jika berkurang maka akan dikredit. Akad kredit yang terjadi antara bank dan pihak nasabah dicatat pada rekening administratif yang termasuk pada rekening Komitmen. Komitmen kredit merupakan transaksi off balanced yaitu transaksi yang belum mempengaruhi

Neraca atau L/R dan harus dicatat dalam rekening administratif komitmen kewajiban.

Ilustrasi 6

Tanggal 26 Juli 2022 dilakukan akad Kredit antara Bank Sentosa Cabang Yogyakarta dan Nyonya Haryati sebesar Rp 15.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun. Nyonya Haryati dikenakan bunga 12% per tahun

Tanggal 1 Agustus 2022 dilakukan pencairan kredit Nyonya Haryati. Untuk itu Nyonya Haryati dikenakan biaya provisi dan komisi sebesar Rp 100.000. Biaya materai Rp 10.000 dan biaya penggantian barang cetakan sebesar Rp 20.000,00

Tanggal 1 September 2022 dilakukan pembayaran angsuran pertama oleh Nyonya Haryati dengan menggunakan metode flat rate.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka jurnal yang dibuat adalah :

**BANK SENTOSA CABANG YOGYAKARTA
JURNAL UMUM**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
26 Juli 2022	RAR - Fasilitas kredit diberikan dan belum dicairkan (Mencatat rekening administratif komitmen kredit)		-	15.000.000

BAGIAN 10

AKUNTANSI PERPAJAKAN

(Lestari, S.E., Ak., M.Ak)

A. TAHAPAN AKUNTANSI PAJAK

Transaksi pajak adalah transaksi ekonomi yang menjadi objek akuntansi untuk dihitung, dicatat, dilaporkan, disajikan, dan diungkapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kekeliruan atau bahkan kesalahan yang disengaja atau penghilangan pencatatan transaksi ekonomi yang menjadi objek pajak akan berimplikasi pada koreksi dan sanksi fiskal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transaksi pajak memerlukan akuntansi dan berkembang istilah akuntansi pajak.

Akuntansi pajak dimulai pada saat terjadinya transaksi yang berimplikasi pada kewajiban dan hak pajak sampai dengan pelaporannya. Tahapan atau siklus akuntansi pajak pada dasarnya sama dengan akuntansi keuangan yaitu:

1. Identifikasi transaksi keuangan yang berimplikasi kepada perpajakan
2. Pencatatan transaksi ke dalam program aplikasi keuangan
3. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi
4. Pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
5. Administrasi dokumen pajak.

1. Identifikasi transaksi keuangan yang berimplikasi kepada perpajakan

Tahap identifikasi adalah penting sebab jika tidak mampu mengidentifikasi suatu transaksi apakah berimplikasi pada pajak akan mengakibatkan koreksi pajak dan sanksinya oleh DJP sebagai otoritas pajak pusat atau Dinas Pendapatan Daerah sebagai otoritas pajak daerah. Pada akuntansi pajak, identifikasi suatu peristiwa ekonomi yang membawa implikasi terhadap hak dan kewajiban perpajakan harus dicatat aspek perpajakannya. Penguasaan Wajib Pajak (WP) terhadap ketentuan perpajakan sangat dibutuhkan.

2. Pencatatan transaksi ke dalam program aplikasi keuangan

Untuk dapat melakukan pencatatan (jurnal) yang tepat, sesuai konsep akuntansi, WP harus melakukan (1) pengukuran atau penghitungan, dan (2) klasifikasi. Dalam melakukan pengukuran WP harus mampu menghitung besarnya hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.

a) Kewajiban pajak untuk dirinya sendiri

Kewajiban ini meliputi menghitung PPh Badan atau PPh Orang Pribadi yang harus dilakukan setahun sekali, angsuran PPh bulanan (PPh Pasal 25), PPN atas penyerahan kena pajak kepada PKP atau pembeli, termasuk PPN atas penggunaan JKP atau BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan kegiatan membangun sendiri, PPN impor dan selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Termasuk menghitung

kewajiban pajak untuk dirinya sendiri seperti PPh final atas selisih revaluasi aktiva tetap atau PPh Pasal 22 impor dan PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah.

b) Kewajiban pajak untuk pihak atau WP lain

Kewajiban ini meliputi menghitung besarnya PPh final atau PPh non-final atau PPN atas objek pajak yang harus dipotong atau dipungut PPh dan/atau PPN-nya. Termasuk PPh non-final yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22. PPh final yaitu Pasal 4 ayat (2).

Pengukuran hak dan kewajiban perpajakan terkait dengan kemampuan WP atas akuntansi keuangan karena kebanyakan aspek perpajakan mengikuti identifikasi dan pengukuran yang dianut oleh akuntansi keuangan, contoh: penjualan secara angsuran atau penghasilan jasa konstruksi. Tetapi, ada transaksi yang sudah diatur secara jelas oleh ketentuan perpajakan, yaitu penyusutan dan amortisasi, atau sewa guna usaha.

Setelah kewajiban pajak teridentifikasi dan dapat diukur (dihitung) besarnya atau nilainya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, WP harus melakukan klasifikasi yakni menentukan pada akun-akun buku besar apa yang akan digunakan untuk mencatat (menjurnal) transaksi tersebut. Setelah nilai transaksi dan akun sudah dipastikan, maka transaksi dijurnal ke dalam program aplikasi atau pembukuan.

Dalam hal transaksi terkait dengan pemotongan atau pemungutan PPh dan/atau PPN dimana WP wajib menyiapkan bukti potong atau bukti pungut pada saat terutangnya pajak maka WP bukan hanya membuat penjurnalan tetapi juga harus melakukan administrasi pajak berupa pembuatan dan penyerahan bukti potong atau bukti

3. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi

Pada umumnya penyetoran pajak mendahului pelaporan pajak. Untuk itu, WP harus memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang yang timbul dari selisih PPN keluaran dan PPN masukan, PPN BM sehubungan penjualan barang mewah, PPh final dan non final yang telah dipotong sudah semua dihitung atau direkapitulasi dengan cara:

- Menjumlahkan seluruh bukti potong PPh final dan non-final
- Memverifikasi kembali dan menelusuri fisik semua faktur pajak apakah telah dihitung dan direkapitulasi
- Membandingkan rincian kewajiban berupa rincian pajak yang telah dipotong, pajak yang dipungut yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan hasil verifikasi faktur pajak dan bukti potong atau bukti pungut pajak.
- Membandingkan atau merekonsiliasi akun-akun utang pajak dengan SPT Masa

Setelah itu disiapkan SSP untuk penyetoran pajak yang terutang. Pajak terutang harus disetor dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan. Pada saat penyetoran

dilakukan, jurnal penjabatan atas akun-akun utang pajak juga harus dilakukan.

4. Pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Tahap berikutnya dari siklus akuntansi keuangan adalah pelaporan yang meliputi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan Keuangan komersial terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian dan pengungkapan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan entitas pelapor kepada para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menjadi lampiran SPT Tahunan. Pelaporan pajak harus mengikuti standar (aturan) perpajakan yaitu pelaporan pajak dilakukan setiap bulan takwim (masa pajak) melalui SPT Masa dan setiap tahun melalui SPT Tahunan. Format, isi, lampiran SPT sebagai media penyajian dan pengungkapan keterbukaan dan akuntabilitas perpajakan harus mengikuti ketentuan perpajakan.

5. Administrasi dokumen pajak

Seperti halnya akuntansi keuangan, penyimpanan bukti transaksi, catatan, dan laporan baik dalam bentuk elektronik atau kertas yang dihasilkan dan digunakan dalam siklus akuntansi keuangan harus disimpan dengan baik selama sepuluh tahun sesuai dengan Undang-undang Dokumen Perusahaan. Dokumen tersebut juga diharuskan disimpan oleh Undang-undang KUP dalam rangka

pembuktian apakah WP telah patuh menjalankan *self assessment*. Termasuk dokumen yang harus disimpan dan dipelihara adalah bukti-bukti pemenuhan kewajiban perpajakan seperti : SSP, SPT, bukti potong dan dokumen perpajakan lainnya.

B. BAGAN AKUN (*CHART OF ACCOUNTS*)

Akun yang digunakan tergantung pada *chart of account* yang dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan oleh WP. *Chart of account* untuk akuntansi pajak adalah sama dengan yang dipakai pada akuntansi keuangan atau komersial. Untuk kepentingan manajemen atau perencanaan pajak, sebaiknya disediakan akun pada *chart of account* yang memudahkan untuk mencari, mencatat, dan merekonsiliasi kewajiban pajak. Berikut ini adalah contoh akun khusus yang digunakan dalam akuntansi perpajakan :

Nama Akun	Saldo Normal	Peruntukan Penggunaan
Utang PPn.BM	Kredit	Mencatat kewajiban PPn.BM yang berasal dari penjualan barang mewah dalam daerah pabean. Akun ini didebet saat disetor ke kas negara
PPN Dibayar Dimuka (PPN Masukan)	Debet	Mencatat PPN yang dipungut PKP lain atas perolehan barang dan JKP atau dipungut DJBC atas impor. Akun ini dikredit saat

		dilakukan pengkreditan PPN masukan dengan PPN keluaran.
Utang PPN (PPN Keluaran)	Kredit	Mencatat PPN yang dipungut atas penyerahan barang atau JKP kepada PKP lain di dalam daerah pabean, atau kegiatan membangun sendiri, atau penyerahan kepada pemungut. Akun ini didebet saat dilakukan pengkreditan PPN masukan dengan PPN keluaran.
Utang PPN (Selisih PPN Keluaran - PPN Masukan)	Kredit	Mencatat PPN yang harus disetor ke kas negara yang disebabkan karena PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan. Akun ini didebet karena adanya penyetoran ke kas negara atau karena adanya kompensasi pajak.
Piutang PPN (Selisih PPN Keluaran - PPN Masukan)	Debet	Mencatat PPN yang dapat dikompensasi atau direstitusi yang disebabkan karena PPN Keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan. Akun ini dikredit karena dikompensasi ke massa pajak berikutnya atau direstitusi.

Utang PPh Pasal 21, Utang PPh Pasal 23, Utang PPh Pasal 26, Utang PPh Pasal 22, Utang PPh Pasal 15, Utang PPh Pasal 4 (2)	Kredit	Mencatat PPh yang telah dipotong WP atas imbalan penghasilan yang diberikannya kepada WP lain yang harus dikenakan pemotongan PPh. Akun ini didebet jika PPh yang telah dipotong disetorkan WP ke kas negara.
PPh Pasal 21 Dibayar Dimuka, PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka, PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka, PPh Pasal 25 Dibayar Dimuka, PPh Pasal 24 Dibayar Dimuka.	Debet	Mencatat PPh yang telah dipotong WP lain atas imbalan penghasilan yang diterima dari WP lain yang harus dikenakan pemotongan PPh. Akun ini dikredit jika telah dilakukan penghitungan dan penyetoran PPh Badan atau PPh Orang Pribadi ke kas negara.
Utang PPh Final Pasal 4(2), Utang PPh Final Pasal 15, Utang PPh Final Pasal 19 (Revaluasi)	Kredit	Mencatat PPh final yang harus dipotong WP atas penghasilan yang diterima atau dibayarkan kepada WP lain yang menjadi objek PPh final. Akun ini didebet jika telah dilakukan penyetoran ke kas negara.

Beban PPh Final	Debet	Mencatat PPh final yang dipotong WP Lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP yang menjadi objek PPh final. Akun ini tidak dapat dikreditkan ke PPh Badan/Orang Pribadi dan juga bukan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung PPh Badan/Orang Pribadi.
Beban pajak tidak dapat dikreditkan	Debet	Mencatat sanksi perpajakan atau pembayaran pajak diluar PPh final yang tidak dapat dibiayakan. Akun ini tidak dapat menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung PPh Badan/Orang Pribadi.
Taksiran PPh Badan/Orang Pribadi	Debet	Mencatat beban PPh Badan selama satu tahun. Akun ini dikredit pada saat penutup.
Aktiva Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan	Debet Kredit	Mencatat aktiva dan pendapatan yang timbul karena adanya beda waktu yang disebabkan perbedaan metode antara akuntansi keuangan dan

		perpajakan yang mengurangi beban pajak kini atau taksiran PPh Badan/Orang Pribadi.
Beban Pajak Tanggihan dan Kewajiban Pajak Tanggihan	Debet Kredit	Mencatat utang dan beban yang timbul karena adanya beda waktu yang disebabkan perbedaan metode antara akuntansi keuangan dan perpajakan yang menambah beban pajak kini atau taksiran PPh Badan/Orang Pribadi.

Contoh Pajak Tanggihan (*Deferred Tax*)

Di dalam beban upah, gaji, dan tunjangan sebesar Rp 100.000.000 terdapat *reserve* (penyisihan) sebesar Rp 15.000.000 yang dibentuk untuk pemutusan hubungan kerja baik karena usia pensiun, pensiun dipercepat atau sebab lain sesuai PSAK Nomor 24. Laba bersih sebelum PPh adalah Rp 250.000.000. Andai koreksi fiskal karena beda waktu hanya disebabkan penyisihan tersebut, maka:

Laba komersial	Rp250.000.000
Koreksi fiskal	Rp 15.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp265.000.000
Tarif PPh 25% x Rp265.000.000	Rp 66.250.000

Aktiva Pajak Tangguhan/Pendapatan Pajak Tangguhan

25% X Rp 15.000.000	(Rp 3.750.000)
Taksiran PPh Badan	Rp62.500.000

Diketahui beban penyusutan menurut akuntansi Rp20.000.000, sedangkan menurut fiskal adalah Rp25.000.000. Jika laba sebelum pajak menurut akuntansi adalah Rp125.000.000, andaikan koreksi fiskal karena beda waktu hanya disebabkan penyusutan tersebut, maka :

Laba komersial	Rp125.000.000
Koreksi fiskal	(Rp 5.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp120.000.000
Tarif PPh 25%	Rp30.000.000

Kewajiban Pajak Tangguhan/Beban Pajak Tangguhan

25% X Rp 5.000.000	Rp1.250.000
Taksiran PPh Badan	Rp31.250.000

Diluar akun khusus yang berkaitan dengan perpajakan, WP sebaiknya merancang *chart of account* yang memuat akun-akun yang khusus dengan **mudah dapat mengidentifikasi dan mencatat serta merekonsiliasi :**

- a. Transaksi penghasilan atau pendapatan atau keberuntungan yang dikenakan pemotongan PPh final. Seluruh transaksi dimaksud tidak dihitung sebagai objek PPh Badan/Orang Pribadi (penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak), tetapi

hanya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi. Misal : pendapatan sewa gedung.

- b. Beban operasional dan harga pokok penjualan yang terkait dengan penghasilan atau pendapatan atau keuntungan yang dikenakan pemotongan PPh final. Karena penghasilan atau pendapatan atau keuntungan dikenakan pemotongan PPh final, maka beban yang terkait dengannya juga tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan bruto. Misal: beban pemeliharaan dan perawatan Gedung yang disewakan.
- c. Beban operasional dan harga pokok penjualan yang tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan bruto, misalnya beban jamuan dan representasi.

C. AKUNTANSI PEMOTONGAN PPH

Untuk objek PPh tertentu terdapat kewajiban bagi WP untuk mengenakan pemotongan pajak kepada WP lain. Kewajiban ini diletakkan kepada WP yang memberikan penghasilan kepada WP lainnya yang menjadi mitra bisnisnya. Contoh: PT Anabul menyewa mobil untuk keperluan operasionalnya dari PT Sumber Jaya. Setiap bulan PT Anabul harus membayar sewa kendaraan sebesar Rp90.000.000 tidak termasuk PPN.

Jawab: dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari DPP. Jadi PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar $2\% \times \text{Rp}90.000.000 = \text{Rp}1.800.000$.

Jurnal untuk PT Anabul adalah:

Beban sewa kendaraan	Rp90.000.000
Utang PPh Pasal 23	Rp1.800.000
Utang usaha	Rp88.200.000

Jurnal untuk PT Sumber Jaya setelah PT Anabul membayar adalah:

Bank	Rp88.200.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp1.800.000
Piutang Usaha	Rp90.000.000

D. AKUNTANSI PEMUNGUTAN PPH

Pada transaksi tertentu, WP diwajibkan memungut PPh atas transaksi yang dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 22.

Contoh: PT Makmur Hidayah adalah perusahaan yang mengimpor dan menjual mobil mewah. Pada tanggal 17 Maret, PT Makmur Hidayah menjual satu mobil mewah Tesla kepada seorang artis ternama dengan harga jual Rp 4 Milyar, tidak termasuk PPN dan PPhBM. Nilai impor mobil Tesla adalah Rp3,4 Milyar. PT Makmur Hidayah memiliki API.

Jurnal antara PT Makmur Hidayah dengan produsen mobil Tesla:

Persediaan barang dagang – Tesla	Rp3.400.000.000
Utang usaha	Rp3.400.000.000

Jurnal saat PT Makmur Hidayah mengeluarkan mobil dari daerah pabean:

PPh Pasal 22 dibayar dimuka	Rp85.000.000
Bank	Rp85.000.000

(2,5% x Rp3.400.000.000)

Jurnal saat PT Makmur Hidayah harus membayar pembelian mobil Tesla dengan L/C dan fee bank untuk pembiayaan impor ini adalah Rp20.000.000:

Utang Usaha	Rp3.400.000.000
Persediaan barang dagang – Tesla	Rp 20.000.000
Bank	Rp3.420.000.000

Jurnal pada saat PT Makmur Hidayah menerbitkan faktur pajak kepada sang artis:

PPh Pasal 22 dibayar dimuka	Rp200.000.000
Bank	Rp200.000.000

(5% x Rp4.000.000.000)

Bank	Rp4.000.000.000
Penjualan	Rp4.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp3.420.000.000
Persediaan barang dagangan-Tesla	Rp3.420.000.000

BAGIAN 11

AKUNTANSI KOPERASI

(Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak., CA)

A. KOPERASI

Sebelum masuk ke akuntansi koperasi secara khusus, penulis memberikan acuan definisi koperasi di Indonesia. Definisi koperasi adalah sebuah wadah atau kumpulan orang-orang atau usaha sejenis untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kumpuloan individu dan usaha sejenis tersebut berusaha untuk bersinergi membentuk sebuah koperasi yang dimana mengacu pada aspek badan hukum pendirian koperasi. Hal ini membuat koperasi itu unik karena koperasi berbeda dengan badan usaha yang lain. Ambil saja contoh perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT) dimana PT didirikan melalui dana yang disetor oleh pemilik modal dan investor. Di samping itu ada struktur hierarki organisasi yang menjabat di PT. keuntungan perusahaan atas dividen akan dibagikan kepada investor.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang mengorganisasikan para anggotanya dengan cara kerja ekonomi kekeluargaan dengan memberdayakan sumber daya manusia guna meningkatkan taraf anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasakan azas kekeluargaan (Departemen Koperasi, 1992).

Koperasi mengutamakan kebersamaan dengan mengambil peran sebagai wadah berkumpulnya para anggota yang secara musyawarah dan mufakat bersama yang memiliki tujuan sinergis untuk kepentingan bersama, senasib sepenanggungan, yang disatukan dalam koperasi. Usaha koperasi dijalankan oleh pengurus sebagai perpanjangan tangan dari anggota koperasi. Jika suatu saat pengurus tidak mampu untuk mengurus atau mengemban amanah usaha koperasi maka pihak pengurus akan mengangkat pengurus yang baru melalui rapat anggota koperasi. Pada segi struktur organisasi, Kewenangan pada organisasi koperasi berada di tangan pengurus koperasi. Pengurus melaksanakan mandat dari rapat anggota untuk diimplementasikan dalam bentuk nyata sebagai pengendalian internal koperasi. Sistem pengendalian intern meliputi struktur-struktur organisasi, cara, dan alat yang dikoordinasikan di dalam suatu perusahaan untuk menjaga keamanan asetnya, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. terjadi antara principal dan agent (Mahayani, 2017)

Apabila pengurus memiliki tugas lain maka perlu adanya optimalisasi operasional koperasi dengan baik dalam melayani anggota. Koperasi dapat juga mengangkat orang yang memiliki pengalaman profesional di dunia organisasi. Individu yang profesional tersebut dapat setara dengan level manajer dalam

koperasi. Manajer koperasi memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola secara operasional baik internal dan eksternal koperasi. Manajer koperasi selain bertanggungjawab pada pengawasan tugas pokok terutama dalam pengembangan dan pengelolaan koperasi di saat ini hingga masa mendatang. Manajer koperasi yang professional akan meningkatkan kinerja / performance koperasi. Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012)

B. RUANG LINGKUP PERATURAN KOPERASI

Koperasi memiliki Dasar hukum yang paling utama yang tertuang dalam UU Pasal 25 tahun 1992 tentang koperasi yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang / individu. Koperasi memiliki badan hukum yang berlandaskan pada gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan. Pergantian UU koperasi sempat terjadi pada tahun 2012 yakni UU 17 tahun 2012 namun pergantian pasal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang mirip dengan prinsip sebuah Korporasi. Prinsip koperasi yang menganut musyawarah dan mufakat bersama dengan seluruh anggota dan pengurusnya. Pada saat koperasi seluruh Indonesia Kopin Provinsi Jawa Timur didorong untuk mengembalikan UU 17 tahun 2012 menjadi UU no 25 tahun 1992

sambil menunggu UU yang baru. hal ini turut mengubah logo koperasi yang semula Logo koperasi dahulu adalah Pohon beringin dan timbangan berubah seiring UU 17 tahun 2012 menjadi Limas segi empat warna hijau kuning. Saat ini logo koperasi dikembalikan kembali ke pohon beringin. Ada beberapa komponen Koperasi antara lain

1. Koperasi didirikan oleh sekumpulan orang-orang yang berada di dalam 1 komunitas pada sebuah lingkungan. Koperasi sangat mendukung sebuah visi dan misi strategis yang memiliki tujuan sbg peningkatan kesejahteraan untuk kepentingan bersama yakni untuk semua anggota termasuk pengurus bagian dari anggota. Pengurus diangkat dari anggota dan diberhentikan oleh anggota serta diperuntukkan anggota.
2. Kegiatan usaha berlandaskan Prinsip koperasi yang usahanya berasal dari anggota Koperasi didirikan berdasarkan UU perkoperasian berlandaskan asas kekeluargaan yang saling bersinergi dan mendukung satu sama lain sesuai dengan kapasitas masing-masing. Anggota memiliki kepentingan tertentu dan berkaitan dengan anggota lainnya. Terutama dalam bersinergi untuk kepentingan anggota lainnya.
3. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka tidak ada pemaksaan sebagai anggota. Anggota boleh meminjam dana dari koperasi namun dengan syarat menjadi anggota terlebih dahulu. Di samping itu dalam menjadi anggota, tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi, Individu

yang ingin menjadi anggota koperasi harus memiliki sikap sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun. Anggota juga wajib mengetahui dan mengikuti syarat yang diajukan oleh koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan lainnya.

4. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan terbuka. Koperasi dijalankan oleh pengurus sesuai dengan ketetapan dalam rencana anggaran pendapatan dan anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Rapat anggota pengurus Koperasi merupakan sebuah wadah untuk musyawarah. Setiap saran, masukan, hingga sinergi organisasi harus disepakati bersama. Rapat anggota akan menentukan kebijakan dilaksanakannya keputusan / kebijakan organisasi. Anggota koperasi tidak boleh melakukan intervensi secara mendalam dalam kepengurusan, kecuali melalui rapat anggota yang menentukan kebijakan pengurus.
5. SHU (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan disesuaikan dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Laba pada koperasi merupakan selisih dari pendapatan yang diterima dikurangi dengan modal yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Pendapatan juga harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya menjadi biaya bersih. SHU akan dibagikan pada anggota. Laba koperasi dibagikan berdasarkan anggaran dasar koperasi masing-masing anggota. Beban SHU dibagikan dari beberapa komponen berupa cadangan 25%,. Dana partisipasi anggota, dana penyertaan usaha. Anggota koperasi yang melakukan transaksi dihitung dari peran dan

jasanya dalam menghidupkan koperasi disesuaikan dengan banyaknya ia menerima SHU. Tidak ada istilah bagi rata, anggota yang mendapat SHU harus sesuai dengan usaha, jasa, dan sumbangsih perannya dalam menghidupkan organisasi koperasi. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi memiliki keadilan terhadap anggotanya.

6. Koperasi memiliki simpanan wajib, apabila terdapat anggota lama memiliki simpanan yang besar jika dibandingkan dengan anggota yang baru bergabung. maka simpanan wajibnya masih kecil. Anggota koperasi baik yang lama maupun yang baru mendapatkan pembagian SHU secara berkeadilan. SHU tidak boleh sama karena komponen SHU diantaranya adalah jasa modal sebesar 25% dibagikan berdasarkan untuk dana cadangan, partisipasi modal 20%, partisipasi usaha anggota berdasarkan transaksi 20%, disamping itu ada dana pendidikan 5%, dana pengurus sebesar 10%, dana karyawan manajer 5%. Dana tersebut dibentuk bersumber dari anggaran dasar koperasi
7. Koperasi merupakan organisasi yang bersifat kemandirian, mengelola secara independen dan mandiri serta tidak ada campur tangan pengelolaan dari pihak lain. Koperasi karyawan tidak ada penyertaan dari induk, induk hanya sebatas pendukung jalannya koperasi serta tidak ada campur tangan kecuali diminta.
8. Koperasi berperan dalam Pendidikan karena koperasi harus memiliki prinsip sebagai pengawas sekaligus anggota dan

komponen lainnya yang harus paham pengelolaan dan pengorganisasi koperasi. Pendidikan Koperasi diselenggarakan secara formal baik di tingkat sekolah umum , Perguruan Tinggi, Pemerintahan melalui dinas koperasi baik tingkat Provinsi, kota dan Kabupaten. Pendidikan koperasi dapat berasal dari dana dari pemerintah. Pendidikan yang dilakukan oleh koperasi secara mandiri memang sangat diperlukan namun sangat jarang mengingat koperasi dalam menyelenggarakan pendidikan diperlukan anggota yang mampu dan berpengalaman dalam membagikan ilmu praktis koperasi di lapangan secara mandiri .

9. Kerjasama koperasi untuk membesarkan dan saling mendukung serta saling menguntungkan sehingga dibentuk forum kerjasama koperasi. Koperasi sekunder menggabungkan wadah koperasi primer supaya kedudukan lebih kuat dibangun dengan menggabungkan anggotanya.

C. JENIS KOPERASI

Koperasi dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa jenis yang diperuntukkan bagi para anggota maupun non anggota. Jenis kegiatan koperasi ini menentukan kegiatan operasionalnya dalam kegiatan ekonomi. Jenis koperasi antara lain

1. Koperasi Simpan pinjam merupakan sebuah usaha koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam. Ketika sebuah koperasi mengajukan badan hukum sebagai koperasi simpan pinjam maka

koperasi tersebut hanya boleh bergerak di bergerak di 1 jenis usaha yakni koperasi simpanan pinjaman. Koperasi tidak boleh bertentangan dengan jenis koperasi yang lain dengan kata lain Koperasi ini tidak diperkenankan membuka usaha lain selain simpan pinjam

2. Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang sifatnya umum, banyak usaha yang dijalankan oleh koperasi konsumen diantaranya adalah pelayanan produk dan jasa yang dipasarkan kepada distributor dan supplier. Koperasi konsumen melayani konsumen baik itu anggota tetap koperasi atau umum (non anggota).
3. Koperasi Pemasaran merupakan koperasi yang memasarkan produk anggota koperasi yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) atau produk lain yang dipasarkan di berbagai sektor koperasi.
4. Koperasi produsen merupakan koperasi yang sifatnya memproduksi sebuah produk dan jasa yang siap di jual kepada konsumen. koperasi produsen misalnya saja koperasi produsen pengrajin mebel, produsen tahu tempe produsen pertanian, perikanan, serta koperasi yang memproduksi barang atau jasa didalamnya
5. koperasi serba usaha merupakan koperasi yang menggabungkan dari semua jenis usaha.

Jenis koperasi diatas merupakan jenis koperasi yang ada di Indonesia. Ada syarat yang harus dipenuhi terutama badan hukum dan jenis

usaha yang koperasi gerakan. Koperasi yang tertera diatas boleh menyelenggarakan unit simpan pinjam namun hanya sebatas pendukung dari usaha yang ada.

D. PERMODALAN KOPERASI

Pada segi permodalan koperasi, modal koperasi berasal dari anggota berupa simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal utama koperasi antara lain modal anggota, modal sumbangan, modal cadangan, sisa hasil usaha.

1. Simpanan pokok dan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang hanya berlaku pada saat pertama kali individu menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib yang diberikan kepada anggota bersifat rutin dan berkelanjutan sesuai dengan jenis iuran. Apabila dikemudian hari anggota keluar dari keanggotaan koperasi maka simpanan pokok dan wajib akan diberikan setelah dipotong dengan biaya-biaya lainnya yang ditarik.
2. Modal anggota diantaranya adalah modal sumbangan, hibah pemerintah, perusahaan induk, biaya hibah tidak boleh dihilangkan pencatatannya dari neraca, karena hibah akan dipakai harus dijelaskan melalui pencatatan di neraca.
3. Modal penyertaan merupakan saham modal kerjasama. Modal penyertaan induk disimpan bersifat berjangka, diluar dari simpanan pokok dan wajib. Simpanan sukarela dapat diambil kapan saja, dan tidak boleh digabung dengan komponen

parameter pembagian SHU. Simpanan sukarela tidak dijadikan komponen pembagi SHU karena sangat berbahaya.

4. Cadangan : pengisian 2-0% dari sisa hasil usaha yang sebagian masuk kategori permodalan yang belum dibagikan kepada anggota.
5. SHU

E. AKUNTANSI KOPERASI

Akuntansi dapat diibaratkan sebuah bahasa penerjemah dalam sebuah organisasi bisnis yang sangat berperan besar dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan utamanya yakni mendapatkan profit / laba. Akuntansi digunakan secara global tidak hanya di sebuah korporasi, industry, hingga pemerintahan semata. Koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Akuntansi koperasi diimplementasikan pada koperasi secara praktisi. Para pengurus koperasi dapat menerapkan prinsip akuntansi koperasi sesuai standar SAK (standar akuntansi keuangan). Pemerintah Negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang berisi “Mengingat Koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas public, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP” (Peraturan Menteri Negara KUKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012). Koperasi dan akuntansi tidak dapat terpisahkan mengingat penerapan usaha koperasi di Indonesia yang semakin kompetitif serta tantangan ke depan dalam menghadapi era digital

Akuntansi secara harfiah merupakan alat dalam kegiatan bisnis. Akuntansi merupakan bahasa karena akuntansi memuat beragam informasi keuangan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Akuntansi diterjemahkan dalam sebuah angka dan bahasa pelaporan sehingga dalam pengelolaan koperasi dapat menghitung laba dan bagi hasil yang akan dibagikan kepada anggota koperasi. Pengelolaan keuangan merupakan sebuah hal yang wajib dalam entitas bisnis salah satunya adalah koperasi. Akuntansi koperasi akan membuat laporan posisi keuangan secara menyeluruh dan akan dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan koperasi kepada pemilik. Pemilik koperasi adalah anggota koperasi yang masuk dalam catatan koperasi. Pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang dituangkan dalam bentuk akuntansi akan mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana penilaian keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Laporan keuangan koperasi terdiri dari beberapa transaksi yang ada di jurnal buku besar dan neraca laba rugi, serta laporan keuangan pendukung lainnya. Melalui laporan keuangan koperasi maka pengurus akan memberikan kebijakan usaha yang harus dilakukan oleh koperasi untuk jangka waktu ke depan.

Koperasi dapat memantau perkembangan usaha melalui laporan keuangan koperasi. Informasi keuangan juga membantu pengelola mengambil beragam keputusan serta memberikan masukan dalam rapat anggota. Keputusan dan kebijakan koperasi yang memuat informasi kondisi koperasi akan memudahkan para pengelola dalam

memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Koperasi merupakan simbol dari ekonomi kerakyatan dimana peranan koperasi yang memiliki tujuan mensejahterakan ekonomi para anggotanya secara bersama-sama dan saling tolong menolong.

Aspek yang paling penting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kualitas laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (Arismawati, 2017). Pengelola koperasi merupakan pihak internal yang akan mengelola dokumen dan laporan keuangan, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga serangkaian ketentuan dan. Kebijakan koperasi. Pihak eksternal koperasi antara lain adalah kreditur, nasabah, investor yang akan menanamkan sahamnya pada koperasi, serta pemerintah baik itu kementerian / Dinas dibawah kementerian perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM hingga pengurusan Pajak. Akuntansi koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga kinerja keuangan koperasi dapat dilihat dari besaran nilai nominal untuk permodalan di saat ini hingga masa yang akan datang. Adapun beberapa indikator keuangan koperasi yang sehat.

1. Kinerja keuangan koperasi menunjukkan keuntungan / kerugian. Para pengelola dapat melihat posisi dan pos keuangan yang telah dibuat oleh pengelola. Pengelola juga dapat mengevaluasi setiap pemasukan dan pengeluaran hingga beban dan operasional.

2. Perkembangan koperasi saat ini, mengingat modal dan asset yang telah dimiliki oleh koperasi. Perencanaan dan target koperasi yang telah dilakukan sebelumnya, saat ini, dan di saat mendatang.
3. Keefektifan kinerja koperasi terutama keaktifan kinerja koperasi yang selama ini dikerjakan dengan melihat nilai keuangan, bukti perkembangan koperasi saat ini, efek keuangan, asset meningkat, nilai neraca keuangan, SDM yang mumpuni, anggota yang bertambah, kepercayaan dari pihak lain.
4. Pajak yang harus dibayarkan karena dalam akuntansi perhitungan biaya pajak dan nilai dimasukkan ke dalam akuntansi
5. Kepemilikan kredit di bank jika koperasi membutuhkan suntikan modal. syaratnya harus menyertakan laporan keuangan yaitu akuntansi keuangan dan nilai dituangkan dalam akuntansi investor, dalam penanaman modal di koperasi untung / tidak serta mampu mengembalikan / tidak.

Prinsip dasar laporan keuangan koperasi secara umum sama dengan laporan keuangan pada usaha lainnya melalui beberapa rekapan transaksi diantaranya adalah

1. Jumlah dana yang diterima
2. Jumlah dana yang dikeluarkan
3. Jenis dan tanggal transaksi yg dilakukan

F. LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Termasuk dalamnya terdapat jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, contohnya saja informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. Adapun elemen laporan keuangan koperasi

1. Asset merupakan segala sesuatu yg dapat digunakan untuk usaha
2. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan
3. Ekuitas adalah hak atas asset setelah dikurangi kewajiban. Kekayaan bersih yang dimiliki koperasi, volume usaha, hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva .
4. Pendapatan merupakan segala sesuatu yang menjadi penghasilan koperasi dari aktivitas umum. Pendapatan koperasi dihitung dari selisih modal perusahaan ,
5. Biaya merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan
6. Pengembalian ekuitas merupakan pengembalian sesuatu dari kepentingan pemilik atau mengembalikan kekayaan kepada pemilik.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi (SAK, 2007). Adapun Akun yang terdapat dalam koperasi diantaranya :

1. Asset : kas (kekayaan dalam bentuk nominal / fisik), piutang anggota (kekayaan dalam bentuk catatan), perlengkapan ((inventaris, meja kursi, komputer gedung kendaraan), peralatan.
2. Utang : utang usaha (konsinyasi, suplier menyimpan brg, pinjaman bank), utang bank,. Simpanan sukarela (utang menitipkan dananya dalam bentuk sukarela dalam bentuk akuntansi utang) baik jangka pendek maupun panjang
3. Ekuitas : simpanan pokok (modal koperasi), simpanan wajib, modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dana , SHU
4. Pendapatan : partisipasi bruto, pendapatan non anggota, pendapatan global (dikurangi beban operaisonal koperasi)
5. Beban : beban operasional (segala sesuatu yang menimbulkan dana) , beban pokok (sifatnya rutin), beban perkerperasian (timbul dana-dana terbentuknya koperasi, pendirian proses, perpajakan)

Persamaan akuntansi dalam koperasi memiliki ciri khas dalam proses perhitungan aktivitas yang terjadi di koperasi

- a. $\text{asset} + \text{biaya} = \text{utang} + \text{ekuitas} + \text{pendapatan}$
- b. $\text{used of fund} : \text{source of fund}$
- c. $\text{sisi kiri (debet)} = \text{sisi kanan (kredit)}$

d. laba = pendapatan – biaya

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 menyatakan bahwa akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis dan mencerminkan pengelolaan koperasi yang bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. pedoman ini mengakui bahwa pelayanan koperasi tertuju pada anggota dan non anggota. Transaksi koperasi dengan anggota memiliki hubungan yang sangat khusus terutama dalam pelayanan. Hubungan koperasi dengan non anggota merupakan hubungan yang bersifat bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul harus dipisahkan dan diimplementasikan karena tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Laporan keuangan koperasi berpedoman dengan UU Koperasi Pasal 25 tahun 1992 dimana koperasi setelah tahun tutup buku maka paling lambat dalam 1 bulan harus menyusun laporan tahunan.

Kasmir (2008) mengungkapkan bahwa Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Sadeli (2010) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan koperasi dibuat dengan tujuan untuk mengelola keuangan koperasi kepada pihak intern maupun ekstern. Untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten

dalam bidang akuntansi. PSAK no 27 menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan system informasi akuntansi keuangan dengan aktivitas yang melakukan analisis dan penyajian laporan keuangan dalam bentuk angka, mencatat, meringkas transaksi dalam bentuk informasi keuangan. Siklus akuntansi koperasi sama seperti badan usaha lainnya. Berikut gambar siklus dari akuntanais secara umum

Dok bukti transaksi → jurnal → buku besar → laporan keuangan

Standar kualitas laporan keuangan bersifat Relevan, dapat dipahami, memiliki daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Adapun beberapa asumsi yang melandasi struktur akuntansi koperasi di Indonesia.

1. Entitas ekonomi

Prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi untuk entitas harus terpisah dari akuntansi pemilik entitas tersebut. Asumsi ini merupakan sumber daya kewajiban ekonomi yang disajikan pada laporan posisi keuangan bagi pengguna yang dapat dibedakan oleh pemilik.

2. Berkelanjutan

Sebuah bisnis / koperasi akan beroperasi seumur hidup, selama tidak ada bukti bahwa koperasi tidak mengalami pailit / bangkrut. Prinsip ini berdampak pada prinsip akuntansi lain misal penyusutan, evaluasi asset, berdasarkan arus kas yang akan datang, prinsip berkelanjutan / *going concern*

3. Moneter

Transaksi bisnis yang bisa dinyatakan dalam acuan moneter / finansial. Untuk prinsip moneter dalam koperasi maka setiap transaksi bisnis dilakukan dalam satuan uang.

4. Periode waktu

Laporan keuangan merupakan ukuran aktivitas keuangan disusun berdasarkan periode waktu tertentu misal 1 bulan hal ini mengingat bahwa pengguna akuntansi membutuhkan laporan periodik selama koperasi dijalankan

Konsep dasar penyusunan laporan keuangan koperasi merupakan sebuah kerangka konseptual ketika koperasi menyusun laporan keuangan dalam setiap periode. Penyusunan laporan keuangan koperasi juga harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

1. Prinsip biaya historis

Sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan harga akuisisi, menginginkan / menghendaki harga perolehan dalam mencatat asset utang modal.

2. Prinsip pengakuan pendapatan

Prinsip aliran masuknya harta / asset yg timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh unit usaha selama 1 periode tertentu. Jumlah kas yang diterima dari transaksi penjualan dari entitas, pendapatan sewa, laba penjualan asset, semua perubahan dalam semua jenis aset

3. Prinsip perbandingan

prinsip ini mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut, besarnya penghasilan bersih setiap periode karena biaya harus dipertemukan dengan pengakuan pendapatannya.

4. Prinsip konsistensi

prinsip ini agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka metode prosedur yang digunakan dalam proses ini harus konsisten.

5. prinsip pengungkapan

prinsip ini menyajikan informasi laporan keuangan dengan ringkasan transaksi 1 periode dan saldo rekening tertentu. Tidak semua transaksi perlu keterangan tambahan untuk diinput. pada catatan kaki. lampiran keterangan, perubahan informasi modal, dan kontrak.

Laporan keuangan adalah sebuah hasil dari keseluruhan proses transaksi akuntansi yang didalamnya berisi informasi mengenai kondisi keuangan sebuah koperasi (Adiputra, 2017). Proses transaksi akuntansi terjadi sampai menjadi satu laporan keuangan yang utuh dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Arismawati, 2017). Siklus akuntansi koperasi sama dengan siklus akuntansi perusahaan pada umumnya.

1. Bagan diperlukan sebagai bentuk sistem informasi akuntansi koperasi dimana pembaca dapat melihat siklus akuntansi yang

lazim dilakukan oleh perusahaan. Siklus akuntansi koperasi pada umumnya digunakan pada jenis koperasi Simpan pinjam

2. Bukti transaksi keuangan dan penjualan dicatat sesuai tanggal kejadian
3. Semua kejadian secara periodik dikelompokkan pada buku besar
4. Buku besar pembantu tambahan sebagai kontrol kebenaran dari buku besar saldo yang dapat dipindahkan ke neraca lajur
5. Menghasilkan laporan keuangan :
 - a. Neraca ; suatu daftar yang berisi ringkasan harta kewajiban dan modal dari suatu perusahaan. Neraca menggambarkan posisi keuangan koperasi pada saat tertentu biasanya pada akhir tahun. Adapun komponen neraca antara lain
 - 1) Harta/aktiva/asset : asset lancar, asset tetap, asset lainnya → dilihat dari likuiditas tingkat pencairannya.
 - 2) Kewajiban, liabilitas, hutang : hutang lancar, hutang jangka pendek, dan hutang panjang, klasifikasi jatuh tempo.
 - 3) Modal : dari anggota dari sisa hasil usaha yg tidak dibagi → sifat kekelannya
 - b. Laporan Laba rugi (laporan sisa hasil usaha) : salah satu laporan keuangan yang wajib dilaporkan sebagai acuan finansial yang terjadi di saat itu. Koperasi melakukan evaluasi data secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Ringkasan pendapatan biaya dalam jangka waktu tertentu 1 tahun / 1 semester.

- 1) Pendapatan operasional : beban operasional, pendapatan / beban non operasional, sisa hasil usaha
 - 2) Penerimaan : kegiatan usaha, koperasi penjualan, hasil jasa, hasil sewa
 - 3) Pengeluaran / beban : biaya produksi upah, bahan baku, transport, biaya pemasaran, administrasi, dan sebagainya
- c. Laporan arus kas : laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama periode tertentu.. Peran penting laporan arus kas adalah sebagai dasar atas sumber keuangan kas berasal, selama 1 periode. Laporan perubahan kas memiliki klasifikasi
- 1) Aktivitas operasi : pengaruh kas dari transaksi kas dalam penentuan laba bersih
 - 2) Aktivitas investasi : pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik hutang maupun ekuitasnya serta property pabrik, dan peralatan.
 - 3) Aktivitas pendanaan : pos-pos kewajiban dari pemilik aktivitas perolehan, sumber daya dari pemilik, serta peminjaman uang dari kreditur selama pelunasannya
- d. Laporan promosi ekonomi anggota
- Laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yg diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun. Wujud dari pencapaian koperasi oleh pihak didalam dan luar koperasi dalam mengevaluasi kinerja. Unsur :

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang / pengadaan jasa bersama
 - 2) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
 - 3) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku
- e. Catatan atas laporan keuangan
- Merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan serta pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

BAGIAN 12

AKUNTANSI PENDIDIKAN

(Imam Hasan, S.Pd., M.Pd., CAAT)

A. HAKITAT PENDIDIKAN

Setiap negara memiliki sistem pendidikan masing-masing. Sistem tersebut merupakan dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan di negaranya. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut resmi berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen tersebut antara lain pendidik/guru, lembaga pendidikan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan, peserta didik, dan masyarakat umum. Tujuan pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik apabila semua komponen dapat saling

membantu dan kooperatif mencerdaskan peserta didik, sehingga nantinya mereka dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing dalam persaingan global.

Pendidikan memiliki peran penting dalam keberhasilan manusia di masa depan. Pendidikan membantu setiap manusia untuk membangkitkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Agar potensi ini dapat dioptimalkan, setiap manusia dapat memilih jalur pendidikan yang ingin mereka ambil. Pendidikan dapat diadakan baik dalam jalur formal, jalur non-formal, dan in-formal. Tiga jenis pendidikan tersebut memiliki peran masing-masing dalam membentuk manusia menjadi individu yang berpengetahuan dan beradab. Adapun bentuk pendidikan di jalur formal, yaitu pendidikan yang diadakan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga lembaga tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Sementara itu, pendidikan di jalur non-formal mencakup lembaga kursus, dan jalur in-formal adalah lingkungan keluarga, karena keluarga memiliki peran dalam mendidik anak-anak mereka.

B. PENTINGNYA KEUANGAN PENDIDIKAN

Pendidikan yang maju ditopang dengan keuangan pendidikan yang memadai. Posisi keuangan pendidikan sangat vital dalam mengembangkan pendidikan, tujuan pendidikan dapat tercapai

dengan keuangan pendidikan. Di Indonesia sendiri, UUD 1945 mengamanatkan 20% dari APBN untuk pendidikan di Indonesia. Melihat pentingnya keuangan pendidikan dapat dari dua sudut pandang. Secara makro dan secara mikro. Pentingnya keuangan pendidikan secara makro dapat digunakan sebagai bahan untuk dilakukan pemerintah dalam menghitung rata-rata keluarga dalam menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana pendidikan yang harus dikeluarkan. Selain itu secara makro, pemerintah juga dapat mengambil kebijakan dalam menentukan besarnya dana BOS yang harus didistribusikan.

Secara mikro, pentingnya keuangan pendidikan yaitu bagi rumah tangga konsumen dapat menyusun alokasi anggaran untuk dana pendidikan yang harus disiapkan untuk investasi dalam pendidikan itu sendiri. Rumah tangga konsumen juga dapat melakukan kegiatan menabung juga untuk pembiayaan pendidikan. Selain itu, bagi sekolah atau sektor pendidikan digunakan untuk menyusun bagaimana mengalokasikan anggaran sekolah untuk perbaikan pembelajaran, gedung sekolah, menambah guru, mengembangkan mata pelajaran serta pendukung ekstra kurikuler.

C. KONSEP AKUNTANSI PENDIDIKAN

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keberhasilan pendidikan harus mencakup semua sistem didalamnya, tidak terlepas dari kegiatan pendanaan untuk keberlangsungan proses pendidikan. Pendanaan

atau keuangan pada sektor pendidikan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan men-support proses pendidikan berjalan dengan baik juga. Oleh sebab itu perlu didukung akuntansi yang memadai. Selain alasan tersebut, juga ada alasan lain yang kuat yaitu sektor pendidikan adalah sektor fundamental yang harus jaga suistanable nya dari perilaku tercela atau penyelewengan pendanaan pendidikan. Atas dasar tersebut mendorong adanya akuntansi di sektor pendidikan atau sering disebut akuntansi pendidikan.

Akuntansi pendidikan merupakan bidang ilmu akuntansi yang diterapkan dalam sektor pendidikan. Keuangan yang ada pada sektor pendidikan harus dikelola dan dicatat dengan ilmu akuntansi pendidikan. Cakupan akuntansi pendidikan dari proses penerimaan, pengeluaran hingga pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi pendidikan ini berbeda dengan akuntan pendidik. Akuntansi pendidikan lebih kepada pencatatan keuangan di sektor pendidikan, sedangkan akuntan pendidik mereka yang memiliki tugas dalam pengajar, melakukan penelitian dalam mengembangkan akuntansi, serta membuat kurikulum pendidikan akuntansi di suatu perguruan tinggi.

IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) memberikan standar akuntansi yang digunakan oleh sektor pendidikan yaitu ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh

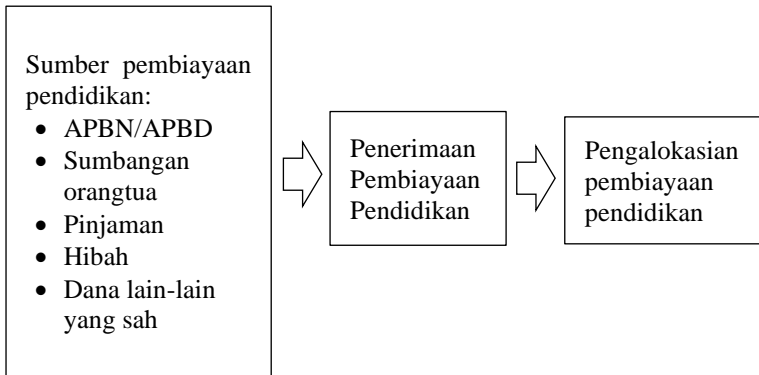
swasta dalam hal ini yayasan pendidikan. Sedangkan bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negeri mengacu pada PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

D. SISTEM AKUNTANSI PENDIDIKAN

Proses akuntansi pendidikan tertuang dalam sistem. Sistem tersebut menjelaskan tentang alur akuntansi di sektor pendidikan. Adapun sistem akuntansi pendidikan dapat dibagi menjadi 4 bagian, pertama tentang pembiayaan pendidikan, kedua tentang penganggaran pendidikan dan ketiga tentang realisasi anggaran pendidikan, dan keempat/terakhir tentang pelaporan.

a. Pembiayaan pendidikan

Proses pendidikan tidak lepas dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan menjadi *row input* yang penting untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan. Pendidikan dipastikan membutuhkan biaya untuk operasionalnya. Oleh sebab itu, pembiayaan pendidikan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh insan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Berikut ini sistem akuntansi pembiayaan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 12.1. Sistem pembiayaan pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sumber-sumber pembiayaan pendidikan berasal dari banyak sumber, antara lain:

1) APBN/APBD

Perintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan bantuan berupa BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dari PAUD sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. BOSP sendiri merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. BOSP terdiri dari: Dana BOP PAUD; Dana BOS; dan Dana BOP Kesetaraan. Bantuan tersebut dapat digunakan oleh sektor pendidikan membiayai kegiatan operasionalnya.

2) Sumbangan Orangtua

Orang tua disini merupakan orang tua wali dari siswa/siswi dan mahasiswa. Sumbangan orangtua dapat berupa SPP, uang pengembangan institusi/ uang pembangunan, dan sumbangan

lain menyesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang ada pada satuan pendidikan tersebut.

3) Pinjaman

Satuan pendidikan juga diperbolehkan untuk melakukan pinjaman pada lembaga perbankan atau sejenisnya untuk memenuhi pembiayaan pendidikan. Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

4) Hibah

Hibah merupakan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat dan diperuntukan untuk membantu meningkatkan proses pendidikan. Hibah untuk sektor pendidikan juga diperbolehkan asalkan dana yang dihibahkan *auditable* serta sah untuk dipergunakan.

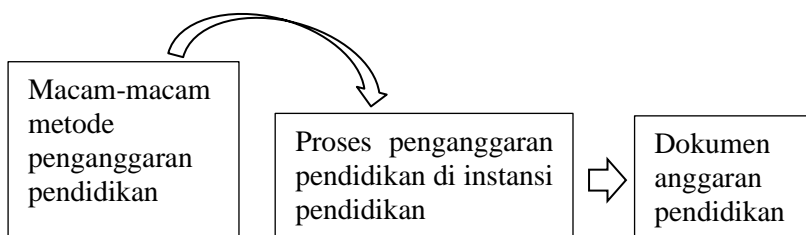
5) Dana lain-lain yang sah

Dana lain yang sah selain di atas juga diperbolehkan, misalnya dana yang digelontorkan oleh investor atau pemilik yayasan (bagi pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta) juga diperbolehkan.

b. Penganggaran pendidikan

Setelah diketahui sumber-sumber pembiayaan yang sah untuk sektor pendidikan apa saja, selanjutnya satuan pendidikan melakukan penganggaran pendidikan. Penganggaran pendidikan merupakan perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan pendidikan secara terpadu yang dinyatakan

dalam bentuk satuan uang dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran pendidikan dituangkan dalam sistem penganggaran yang dapat dilihat pada gambar 12.2 di bawah ini.



Gambar 12.2. Sistem penganggaran pendidikan

Berdasarkan gambar 12.2 di atas, dapat dilihat bahwa proses penganggaran pendidikan dimulai dari menghitung terlebih dahulu anggaran pendidikan dengan berbagai macam metode. Adapun metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: *line-item budgeting*, *incremental budgeting*, *program-planing budgeding system (PBBS)*, *zero based budgeting*, *performace budgeting*, dan *medium term budgeting framework (MTBF)*.

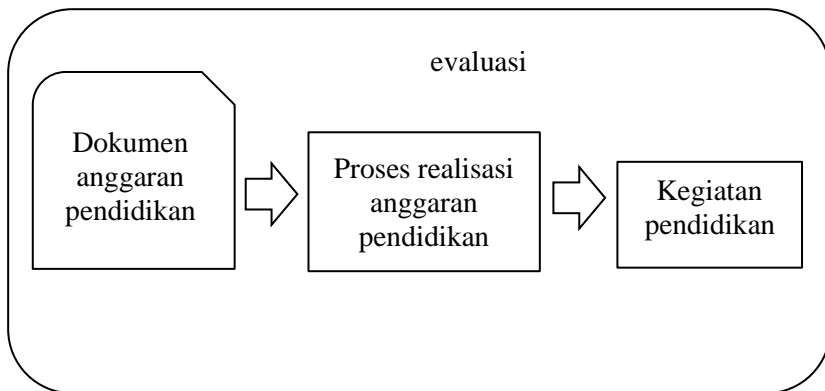
Setelah instansi pendidikan menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari instansi tersebut, selanjutnya penganggaran pendidikan dibuat. Dalam menyusun anggaran pendidikan harus memperhatikan visi dan misi dari institusi, distribusi sumber daya, serta anggaran tersebut harus implementatif relevan dengan lingkungan di sekitar institusi tersebut. Selanjutnya, hasil dari penganggaran tersebut menjadi dokumen anggaran pendidikan. Dokumen tersebut yang nantinya

menjadi acuan selama periode tertentu bagi institusi pendidikan tersebut berjalan.

c. Realisasi anggaran pendidikan

Berdasarkan dokumen anggaran pendidikan yang telah disusun, selanjutnya proses realisasi anggaran pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan merupakan proses dimana sumber daya keuangan yang telah disusun, dituangkan dalam bentuk kinerja yang sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Proses realisasi anggaran harus menaati anggaran pendidikan yang telah disusun sebelumnya, agar alokasi sumber daya keuangan yang ada sesuai.

Proses terpenting dari kegiatan realisasi anggaran ini yaitu transparansi dan akuntabel. Transparansi berarti pos-pos keuangan yang keluar harus terbuka kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Sedangkan akuntabel berarti kegiatan yang telah dijalankan dan menggunakan sumber daya keuangan dari institusi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika kedua prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh semua pemakai sumber daya keuangan yang ada pada anggaran pendidikan, maka dapat dipastikan tujuan dari institusi pendidikan dapat terlaksana dan yang terpenting lagi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Berikut ini sistem penganggaran pendidikan dapat dilihat pada gambar 12.3 di bawah ini:



Gambar 12.3. Sistem realisasi anggaran pendidikan

Berdasarkan gambar 12.3 di atas, dapat diketahui bahwa proses realisasi anggaran pendidikan bersumber dari dokumen anggaran pendidikan, sehingga hasil dari kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana di awal. Yang terpenting dari kegiatan realisasi anggaran pendidikan disetiap tahapnya harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi dan selalu ada perbaikan disetiap tahapnya.

E. LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI PENDIDIKAN

Instansi pendidikan merupakan organisasi/entitas yang berorientasi nonlaba pada kegiatan operasionalnya. Organisasi ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan organisasi profit pada umumnya. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangannya juga memiliki ciri khas sendiri. Berdasarkan ISAK No. 35 terdapat 5 jenis laporan

keuangan yaitu (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan penghasilan komprehensif, (3) laporan perubahan aset neto, (4) laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan.

- 1) Laporan posisi keuangan yaitu laporan yang berisi informasi berupa aset, liabilitas dan ekuitas serta informasi mengenai hubungan unsur tersebut pada periode tertentu. Contoh laporan posisi keuangan dapat dilihat pada gambar 12.4.
- 2) Laporan penghasilan komprehensif yaitu laporan yang berisi informasi penghasilan dari kegiatan operasional pendidikan. Contoh laporan penghasilan komprehensif dapat dilihat pada gambar 12.5.
- 3) Laporan perubahan aset neto yaitu laporan yang berisi informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Contoh laporan penghasilan komprehensif dapat dilihat pada gambar 12.6.
- 4) Laporan arus kas yaitu laporan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contoh laporan penghasilan komprehensif dapat dilihat pada gambar 12.7 dan 12.8.
- 5) Catatan atas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang tidak terpisah dari laporan-laporan keuangan di atas. Bertujuan memberikan informasi material dalam laporan keuangan.

ENTITAS XYZ			
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2			
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>			
	20X2		20X1
ASET			
<i>Aset Lancar</i>			
Kas dan setara kas	XXXX		XXXX
Piutang bunga	XXXX		XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX		XXXX
Aset lancar lain	XXXX		XXXX
Total Aset Lancar	XXXX		XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>			
Properti investasi	XXXX		XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX		XXXX
Aset tetap	XXXX		XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX		XXXX
TOTAL ASET	XXXX		XXXX
LIABILITAS			
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>			
Pendapatan diterima di muka	XXXX		XXXX
Utang jangka pendek	XXXX		XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX		XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>			
Utang jangka panjang	XXXX		XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX		XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX		XXXX
Total Liabilitas	XXXX		XXXX
ASET NETO			
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions)</i>			
<i>dari pemberi sumber daya</i>			
Surplus akumulasian	XXXX		XXXX
Penghasilan komprehensiflain*)	XXXX		XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions)</i>			
<i>dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX		XXXX
Total Aset Neto	XXXX		XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX		XXXX

Gambar 12.4. Contoh laporan posisi keuangan

ENTITAS XYZ			
Laporan Penghasilan Komprehensif			
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2			
(dalam jutaan rupiah)			
	20X2		20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
<i>Pendapatan</i>			
Sumbangan	xxxx		xxxx
Jasa layanan	xxxx		xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx		xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx		xxxx
Lain-lain	xxxx		xxxx
Total Pendapatan	xxxx		xxxx
<i>Beban</i>			
Gaji, upah	xxxx		xxxx
Jasa dan profesional	xxxx		xxxx
Administratif	xxxx		xxxx
Depresiasi	xxxx		xxxx
Bunga	xxxx		xxxx
Lain-lain	xxxx		xxxx
Total Beban (catatan E)	xxxx		xxxx
Kerugian akibat kebakaran	xxxx		xxxx
Total Beban	xxxx		xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx		xxxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
<i>Pendapatan</i>			
Sumbangan	xxxx		xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx		xxxx
Total Pendapatan	xxxx		xxxx
<i>Beban</i>			
Kerugian akibat kebakaran	xxxx		xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx		xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxxx		xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx		xxxx

Gambar 12.5. Contoh laporan penghasilan komprehensif

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Total	xxxx	xxxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
TOTAL ASET NETO	xxxx	xxxx
***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).		

Gambar 12.6. Contoh laporan perubahan aset neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	xxxx	xxxx
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(xxxx)	(xxxx)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(xxxx)	(xxxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxxx	xxxx

Gambar 12.7. Contoh laporan arus kas metode langsung

ENTITAS XYZ			
Laporan Arus Kas			
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2			
(dalam jutaan rupiah)			
	20X2		20X1
AKTIVITAS OPERASI			
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:			
Surplus	xxxx		xxxx
Penyesuaian untuk:			
Depresiasi	xxxx		xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx		xxxx
Penurunan dalam utang jangka pendek	xxxx		xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx		xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	xxxx		xxxx
AKTIVITAS INVESTASI			
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx		xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)		(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx		xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)		(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(xxxx)		(xxxx)
AKTIVITAS PENDANAAN			
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>			
Investasi dalam dana abadi (endowment)	xxxx		xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx		xxxx
	xxxx		xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>			
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx		xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)		(xxxx)
	(xxxx)		(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(xxxx)		(xxxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxxx		xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxxx		xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxxx		xxxx

Gambar 12.8. Contoh laporan arus kas metode tidak langsung

BAGIAN 13

AKUNTANSI FORENSIK DAN INVESTIGASI

(Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak.,CA., CTA., ACPA)

A. PENGANTAR FORENSIK DAN INVESTIGASI

Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Tahun 2018 menunjukkan bahwa kerugian yang dialami suatu perusahaan karena *fraud* sekitar 5% dari pendapatan kotor suatu perusahaan (Indonesia, 2020). *Fraud* merupakan bentuk dari kejahatan *white-collar* yang bersifat tidak terlihat karena terjadi pada lingkungan yang tertutup. Selain itu *fraud* memiliki kecenderungan sulit untuk diidentifikasi karena pelakunya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan terkait aset dan sumber daya perusahaan. *White-Collar Crime* diperkenalkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland di Tahun 1939, yang dimaknai sebagai kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih yang terdiri atas orang-orang bisnis dan profesional terhormat, atau paling tidak dihormati (Tuanakotta, 2012).

Tabel 13.1. Hasil Survey ACFE Indonesia Chapter

Jenis Fraud	Fraud yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia (%)	Fraud Paling Merugikan di Indonesia (%)	Nilai Kerugian Akibat Fraud Paling Merugikan di Indonesia					
			Nilai Kerugian (Rp)	%	Nilai Kerugian (Rp)	%	Nilai Kerugian (Rp)	%
Korupsi	64,4	69,9	≤ 10 juta	48,1	10 juta - 10 Milyar	46,5	> 10 Milyar	5,4
Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan	28,9	20,9	≤ 10 juta	63,6	10 juta - 10 Milyar	31,4	> 10 Milyar	5,0
Fraud Laporan Keuangan	6,7	9,2	≤ 10 juta	67,4	10 juta - 10 Milyar	28,0	> 10 Milyar	4,6

Sumber: ACFE Indonesia Chapter, 2019

Audit Keuangan secara umum tidak bertujuan untuk mengidentifikasi adanya *fraud*, tetapi menguji kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya tahapan di dalam organisasi untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Hal tersebut menjadi tanggung jawab manajemen sebagai pemilik bisnis sekaligus pemilik risiko yang dapat dilakukan dengan cara membentuk pengendalian internal.

The National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) menegaskan pentingnya pengendalian internal dalam upaya mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan (Commission, 1987). Akan tetapi pengendalian internal yang memadai tidak selalu menjamin bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai karena pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melemahkan pengendalian internal tersebut. Hal tersebut mendorong adanya Akuntansi Forensik yang mengintegrasikan teknik audit dan investigasi ke dalam bidang akuntansi dan berfokus pada pencegahan dan penentuan kecurangan akuntansi (Torres, 2018).

Fraud memiliki potensi untuk menghancurkan pemerintahan, bisnis, pendidikan, departemen maupun sektor-sektor lainnya. *Fraud* dapat terjadi antara lain karena pengendalian internal yang tidak efektif, lemahnya sistem dan kepatuhan, tidak adanya *Good Corporate Governance (GCG)*, lemahnya bidang penegakan hukum, standar akuntansi dan lain-lain. Salah satu metodologi yang dapat digunakan untuk meminimalkan *fraud* adalah dengan audit yang handal yang

dikenal sebagai Akuntansi forensik ataupun Audit Forensik. Istilah awal yang digunakan adalah Akuntansi Forensik, bukan Audit Forensik. Hal ini disebabkan karena bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum.

B. AKUNTANSI FORENSIK DAN AKUNTAN FORENSIK

Akuntansi Forensik adalah tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasi ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. Data historis digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang, atau dengan kata lain akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum (D. Larry Crumbley, 2015).

Akuntansi Forensik adalah area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit, mengintegrasikannya dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks, melaksanakan investigasi penipuan (Oberholzer, 2002). Akuntansi Forensik biasanya berfokus pada area-area tertentu yang diduga terdapat gejala tindak kecurangan (*red flags*, kondisi atau situasi yang memberi isyarat terjadinya *fraud*). *Red flags* dapat berasal dari pihak internal organisasi maupun dari pihak eksternal perusahaan/pihak

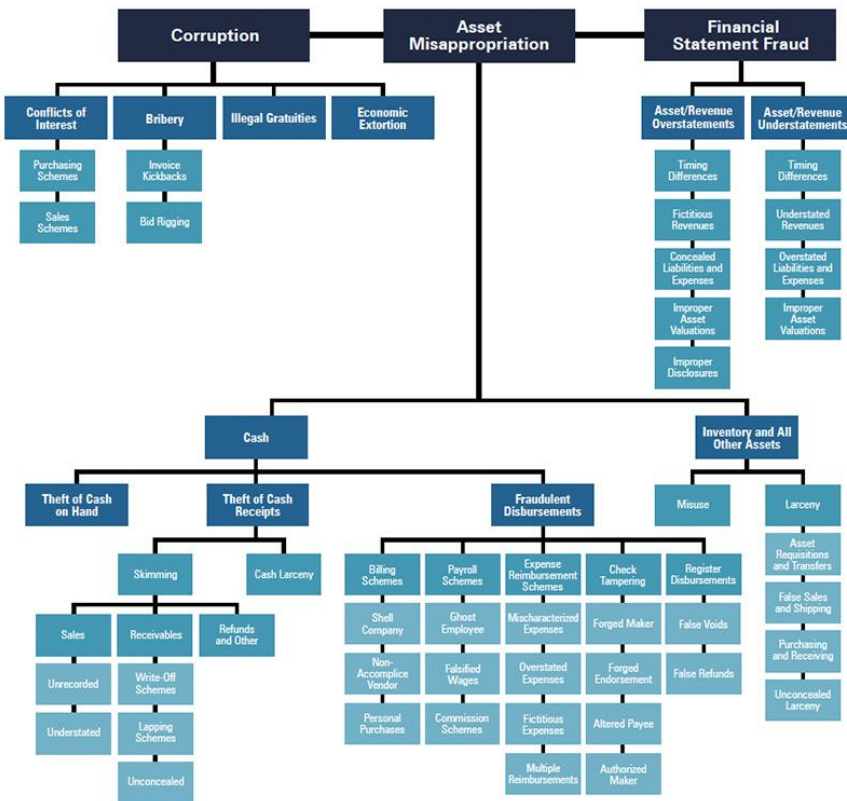
ketiga (*tip off*). Sebagian besar tindak kecurangan terbongkar karena *tip off* dan ketidaksengajaan (*accident*).

Akuntan Forensik memberikan dukungan dalam pengadilan (*litigation*) dan di luar pengadilan (*non litigation*). Akuntan Forensik membantu membuktikan bahwa suatu tuduhan terbukti atau tidak terbukti. Sehingga bukti-bukti yang diperoleh ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengadilan. Pendapat yang diberikan Akuntan Forensik di luar pengadilan misalnya membantu merumuskan penyelesaian perkara sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak.

Akuntan Forensik harus memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Selain itu diperlukan mengenali pola perilaku manusia dan perusahaan (*human dan organization behaviour*), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (*opportunities pressure, rationalization*) pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (*profiling*) pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*). Pengetahuan dan kompetensi tersebut membantu Akuntan Forensik untuk menemukan adanya *fraud*.

C. FRAUD TREE

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan *fraud* dalam hubungan kerja dalam bentuk *Fraud Tree*. *Fraud Tree* memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu *Corruption* (Korupsi), *Asset Misappropriation* (Penyimpangan Aset) dan *Financial Statement Fraud* (Kecurangan Laporan Keuangan). *Fraud Tree* membantu Akuntan Forensik untuk mengidentifikasi *fraud*.



Gambar 13.1. Fraud Tree

Sumber: ACFE, 2014

1. Corruption (Korupsi)

a. *Conflict of Interest* (Benturan Kepentingan)

Jenis korupsi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi karyawan atau manajer atas kegiatan atau transaksi bisnis dalam perusahaan dimana karyawan atau manajer tersebut bekerja dengan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan dapat terjadi pada Skema Pembelian (*Purchasing Schemes*) dan Skema Penjualan (*Sales Schemes*).

b. *Bribery* (Suap)

Jenis korupsi ini terjadi karena adanya pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai (bisa berupa uang, pelunasan hutang, fasilitas, keuntungan bisnis dan lain-lain) untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya. Suap dapat terjadi misalnya dengan pemberian komisi (*Invoice Kickbacks*), kecurangan untuk memenangkan lelang (*Bid Rigging*).

c. *Illegal Gratuities* (Pemberian Tidak Sah)

Jenis korupsi ini terjadi karena adanya pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang di ambil oleh seseorang. Pemberian tersebut memiliki dampak yang menguntungkan bagi pemberi sesuatu yang bernilai tersebut. *Illegal Gratuities* adalah bentuk terselubung dari suap karena keputusan yang diambil tidak harus dipengaruhi sebelumnya.

d. *Economic Extortion* (Pemerasan Ekonomi)

Jenis korupsi ini terjadi karena karyawan atau manajer meminta pembayaran dari rekanan (*vendor*) atas keputusan yang akan di ambil oleh karyawan atau manajer tersebut. Keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang menguntungkan pihak *vendor*. Misalnya dengan ancaman, bujukan, menakut-nakuti.

2. Asset Misappropriation (Pengambilan Aset Secara Ilegal)

a. *Cash* (Kecurangan Kas)

Kecurangan kas dapat terjadi pada kas yang ada di bank (tabungan, giro, deposito) dan uang tunai, yang dapat langsung digunakan pelakunya. *Fraud* jenis ini paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang *tangible* dan dapat diukur/dihitung (*defined value*). Contoh kecurangan kas yaitu *Skimming* (kas yang disalahgunakan sebelum kas tersebut secara fisik masuk ke perusahaan/kas yang belum dicatat dalam pembukuan organisasi), *Cash Larceny* (kas yang disalahgunakan setelah kas tersebut secara fisik masuk ke perusahaan/kas yang sudah dicatat dalam pembukuan organisasi) dan *Fraudulent Disbursements* (pencurian kas melalui pengeluaran yang tidak sah).

b. *Inventory and All Other Assets* (Kecurangan Persediaan dan Aset Lain)

Kecurangan dapat terjadi pada persediaan dan aset lain selain kas. Contoh kecurangan jenis yaitu *Misuse* (penyalahgunaan persediaan dan aset lain, sulit dikuantifikasikan akibatnya karena pelaku misalnya menggunakan peralatan organisasi pada saat jam kerja untuk kegiatan sampingan) dan *Larceny* (pencurian persediaan dan aset lain, dengan misalnya dengan penjualan fiktif, pemindahan aset ke lokasi lain, memalsukan penerimaan aset, membuat jurnal fiktif, menghapus aset, dan lain-lain).

3. Financial Statement Fraud (Kecurangan Laporan Keuangan)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat dilakukan dengan cara menyajikan Laporan Keuangan secara *understatement* (lebih rendah/buruk dari yang seharusnya) dan *overstatement* (lebih tinggi/bagus dari yang seharusnya). Selain itu kecurangan Laporan Keuangan juga dapat dilakukan dengan cara menekan laba yang bertujuan menghindari atau memperkecil pajak yang seharusnya dibayarkan. Cara-cara yang bisa digunakan misalnya mencatat pendapatan fiktif, menyembunyikan kewajiban dan biaya, mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tidak tepat dan lain-lain.

D. FRAUD TRIANGLE

Banyak teori-teori yang bisa menggambarkan dorongan pelaku *fraud* untuk melakukan *fraud*, tetapi teori *Fraud Triangle* ini digunakan

pula pada praktik Akuntan Publik melalui Statement of Auditing Standard (SAS) No. 99, *Consideration of Fraud in Financial Statement Audit* yang menggantikan SAS No. 82 (Priantara, 2013). Donald R. Cressey, salah seorang pendiri ACFE adalah pencetus *Fraud Triangle* (Teori Segitiga *Fraud*). Teori tersebut menggambarkan perilaku pelaku *fraud* yang mendorongnya melakukan *fraud*.



Gambar 12.2. Fraud Triangle
Sumber: Donald R. Cressey, 1953

1. Opportunity (Kesempatan/Peluang)

Opportunity adalah kesempatan/peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi karena pelaku *fraud* merasa bahwa perbuatan mereka tidak akan terdeteksi. Secara umum *opportunity* disebabkan karena pengendalian internal perusahaan yang lemah untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang, tidak berjalannya GCG, tidak adanya komitmen manajemen yang tinggi untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera pada pelaku *fraud*. Di antara 3 (tiga) elemen

Fraud Triangle, *opportunity* memiliki kesempatan yang paling memungkinkan untuk meminimalkan terjadinya *fraud* melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini *fraud*.

2. Pressure (Tekanan)

Pressure adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Tekanan ini merupakan tekanan yang terjadi pada pelaku *fraud* tetapi tidak bisa *dishare* kepada pelaku lain (*perceived non-shareable financial need*). Pada umumnya tekanan berupa tekanan finansial tetapi bisa juga disebabkan karena keserakahan. Tekanan tersebut dapat terjadi pada karyawan dan manajer dalam perusahaan. Tekanan dapat berupa (a) Tekanan Keuangan, misalnya hutang, gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial, (b) Kebiasaan buruk, misalnya judi, narkoba, (c) Tekanan Lingkungan Kerja, misalnya tidak/kurangnya penghargaan atas kinerja, gaji rendah, dan (d) Tekanan Lain, misalnya kegagalan bisnis, tidak mau kalah dengan orang lain.

3. Razionalization (Pembenaran)

Rasionalisasi adalah proses dimana pelaku *fraud* mencari pembenaran dalam melakukan tindakannya. Alasan pelaku *fraud* meyakini tindakannya benar adalah karena menganggap sesuatu tersebut adalah haknya, merasa banyak berjasa untuk organisasi, tindakan tersebut wajar karena orang lain juga melakukan. Rasionalisasi adalah elemen *Fraud Triangle* yang sulit untuk diukur.

E. FRAUD AKUNTANSI

Perusahaan menginginkan kinerjanya baik, terutama pada kinerja keuangan. Sehingga jika kinerja keuangan perusahaan tidak baik maka manajemen meminta akuntan melaporkan kinerja keuangannya agar terlihat baik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui *financial numbers game*. *Financial numbers game* merupakan permainan angka (*accounting irregularities*) sehingga pembaca laporan keuangan melihat bahwa kinerja keuangan perusahaan baik (Comiskey, 2002).

Jenis-jenis *financial numbers game* adalah sebagai berikut (Comiskey, 2002):

1. Aggressive Accounting

Perusahaan memilih dan menerapkan prinsip akuntansi yang bertujuan agar laba tahun berjalan lebih tinggi, terlepas apakah praktik tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau tidak (Priantara, 2013). *Aggressive accounting* dilakukan dengan menunda atau menghilangkan kerugian atau meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan *overstating earnings*. *Overstating revenue* dapat dilakukan dengan cara menyajikan pendapatan kotor dan menanggukhan pengakuan beban.

2. Earning Management

Manajemen melakukan intervensi pada proses pelaporan keuangan karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh

sering dikaitkan dengan prestasi manajemen. Hal yang lazim bila besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh. *Earning management* dilakukan dengan metode akuntansi atau perubahan metode, pengakuan transaksi sesaat yang tidak berulang, menanggukkan atau mempercepat beban atau pendapatan, atau penggunaan metode lain untuk mempengaruhi laba jangka pendek (Michael D. Akers, 2007).

3. Income Smoothing

Manajemen melakukan upaya menstabilkan laba sehingga tidak berfluktuasi tajam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggeser pendapatan dan beban periode berjalan ke beberapa periode. *Income Smoothing* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu (1) perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi, (2) perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu dan (3) perataan melalui klasifikasi (Priantara, 2013).

4. Fraudulent Financial Reporting

Manajemen melakukan proses penyajian kondisi finansial perusahaan yang disengaja salah atau penghilangan suatu nilai/jumlah atau pengungkapan di Laporan Keuangan yang bertujuan menyesatkan penggunaannya. Disebut juga *Management Fraud* karena proses ini merupakan inisiasi manajemen untuk kepentingan manajemen. *Fraudulent financial reporting* dapat dilakukan melalui (1) manipulasi, pemalsuan atau perubahan

catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, (2) representasi yang salah atau penghilangan peristiwa dari laporan keuangan, transaksi, atau informasi signifikan, (3) serta salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi dan cara pengungkapannya (Devanus Abellingga, 2021).

5. Creative Accounting

Perusahaan menerapkan *creative accounting* salah satunya karena bervariasinya prinsip akuntansi atau penerapan prinsip akuntansi yang agresif. Penerapan prinsip akuntansi yang agresif cenderung melanggar prinsip agar kinerja finansial perusahaan terlihat baik. *Creative accounting* merupakan langkah yang digunakan untuk memainkan angka-angka laporan keuangan, yang mencakup *aggressive accounting*, *earning management*, *income smoothing* dan *fraudulent financial reporting* (Priantara, 2013).

BAGIAN 14

AKUNTANSI SYARIAH

(Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA)

A. PERKEMBANGAN KONTEMPORER AKUNTANSI SYARIAH

Bangsa Romawi dan Persia, dua negara kuat dengan kerajaan yang luas, memerintah peradaban sebelum kedatangan Islam. Perdagangan orang Arab Mekah dibatasi hanya di Yaman pada musim dingin dan Suriah pada musim panas. Pedagang pada periode itu menggunakan akuntansi dengan melacak inventaris mereka sejak mereka mulai bertransaksi sampai mereka pulang. Untuk memastikan perubahan, keuntungan, atau kerugian, perhitungan dilakukan. Pada kenyataannya, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu menggunakan akuntansi untuk operasi utang mereka selain perdagangan dan penyelesaian. Begitu Allah memerintahkan untuk mencatat transaksi nontunai (Al-Baqarah 282) dan membayar zakat melalui Al-Qur'an, metode akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai bermunculan. Petunjuk yang diberikan Allah dalam surat Al-Baqarah 282 ini telah menganjurkan setiap orang untuk selalu menggunakan surat-surat atau bentuk-bentuk verifikasi transaksi lainnya. Mengenai perintah Allah untuk membayar zakat, hal itu menginspirasi umat Islam saat itu untuk menginventarisasi dan mengevaluasi harta mereka. Hasil logis dari persyaratan membayar zakat, yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari

harta yang dimiliki oleh seseorang yang memenuhi kriteria nisab dan haul, adalah terciptanya praktik pencatatan dan penilaian harta.

Al-Qur'an, Sunnah Nabwiyyah, Ijma, Qiyas, dan Uruf yang tidak bertentangan dengan syariah Islam menjadi landasan Akuntansi Syariah. Prinsip akuntansi syariah berbeda dari prinsip akuntansi tradisional dalam beberapa cara yang unik. Dasar-dasar akuntansi Islam sesuai dengan nilai-nilai sosial Islam dan mencakup bidang ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan publik di mana akuntansi dipraktikkan. Akuntansi dipandang dari sudut pandang ilmiah sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengukur berbagai transaksi yang muncul dalam akun, perkiraan, atau posting keuangan, seperti aset, utang, pendapatan, biaya, dan keuntungan, untuk mengubah bukti yang disertai dengan data yang ada, berubah menjadi informasi.

Berikut ini adalah kekuatan pendorong utama di balik laju perkembangan akuntansi syariah saat ini:

1. Keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dalam bisnisnya menjadi inspirasi. Keuntungan membuat penting untuk mencatat, mengkategorikan, dan meringkas secara sistematis dan benar.
2. Pemahaman pelaku bisnis tentang pentingnya faktor sosial dalam memaksimalkan keuntungan.
3. Tujuan bisnis adalah mencari keuntungan sebagai sarana, bukan tujuan itu sendiri.

ii.

Prinsip dan konsep akuntansi Islam menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Argumen Gamble dan Karim (Harahap, 1992) adalah karena Islam memiliki syariah, yang diikuti oleh semua anggotanya, maka wajar saja jika pemeluknya menciptakan organisasi keuangan dan akuntansi yang didukung oleh bukti yang terbukti secara agama. . Tiga model juga dikembangkan oleh mereka, salah satunya, yang dikenal sebagai Model Kolonial, meramalkan bahwa jika penduduk Islam mengikuti hukum Islam, akuntansi Islam akan mengikutinya. Mereka juga menyatakan bahwa akuntansi harus menjadi bagian alami dari Islam karena sangat penting untuk menekankan komponen sosial dan melaksanakan sistem zakat dan baitul mal. Akuntansi syariah adalah konsep, sistem, dan metodologi akuntansi yang membantu lembaga dan organisasi dalam memastikan bahwa tujuan dan prosedur operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah, dapat melindungi hak-hak pemangku kepentingan di dalamnya, dan dapat mendorong mereka menjadi lembaga yang benar-benar dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
2. Dr. Scott adalah seorang penulis yang memberikan penekanan kuat pada pertimbangan moral dan etika ketika meneliti topik yang berhubungan dengan akuntansi. Setiap teori akuntansi yang dikembangkan oleh Dr. Scott didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran; model ini dikenal sebagai Teori Etika Akuntansi. Dia berpendapat bahwa ketika menyampaikan laporan keuangan, akuntan harus berhati-hati untuk memperlakukan semua pihak

secara adil dan tepat serta memberikan fakta yang akurat untuk mencegah kesalahpahaman dan bias. Harahap (1991) membuat kasus perlunya akuntansi Islam dalam buku yang sama. Dia membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku untuk akuntansi dengan prinsip dan fitur akuntansi komputer. Eksistensi nilai-nilai Islam juga disebutkan.

3. Dalam karya mereka tahun 1993 berjudul *Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting*, Shaari Hamid, Russell Craig, dan Frank Clarke mengajukan dua gagasan. Yang pertama; Islam, sebagai agama dengan peraturan unik yang mengatur sistem keuangan dan ekonomi (seperti sistem perbankan tanpa bunga), tidak diragukan lagi membutuhkan teori akuntansi unik yang dapat mempertimbangkan persyaratan Syariah. Kedua; Islam sebagai agama yang melampaui batas-batas negara tidak boleh diabaikan, meskipun dalam berbagai penelitian telah ditemukan bahwa faktor budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Islam dapat mendukung harmonisasi dan internasionalisasi akuntansi.

B. ASPEK YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN AKUNTANSI DI NEGARA-NEGARA ISLAM

1. Daftarul nafaqat (Buku Pengeluaran). Buku ini disimpan di diwan nafaqat dan diwan ini bertanggung jawab atas Pengeluaran khilafah, yang mencerminkan Pengeluaran negara.

2. Daftarun Nafaqat Wal Iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan). Buku ini disimpan di Diwanil mal, dan diwan ini bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya.
3. Daftar Amwali Mushadarah (Buku Harta Sitaan). Buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat senior negara pada saat itu.

Umat Islam juga mengenal kitab unik lain yang bernama Al-Auraj, yang disamakan dengan Daftar Usadzil Madinin seperti yang dikenal sekarang. Bahasa Arab menggunakan kata Persia auraj, yang memiliki akar bahasa Persia. Jumlah pajak atas tanah pertanian didokumentasikan di Auraj, di mana setiap halaman diberikan kepada individu yang menanggung beban pajak yang berbeda dan jumlah pajak yang harus dibayar dicatat juga bagian dari jumlah pokok yang telah dibayarkan.

Dalam sejarah Islam telah ada hukum-hukum akuntansi yang menerapkan aspek-aspek perkumpulan perseorangan atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak yang melarang penggunaan harta kekayaan, dan anggaran negara sejak Islam pertama kali menyebar ke Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan pembentukannya. Daulah Islam di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Selama menjabat, Rasulullah SAW berusaha menerapkan profesi akuntan yaitu “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Kehadiran saksi saat transaksi

berlangsung sangatlah penting, serta memahami dasar-dasar dan manfaat muamalah, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menguraikan tentang fungsi pencatatan dalam muamalah.

Al-Qur'an, Sunnah Nabwiyyah, Ijma, Qiyas, dan Uruf yang tidak bertentangan dengan syariah Islam menjadi landasan Akuntansi Syariah. Prinsip akuntansi syariah berbeda dari prinsip akuntansi tradisional dalam beberapa cara yang unik. Dasar-dasar akuntansi Islam sesuai dengan nilai-nilai sosial Islam dan mencakup bidang ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan publik di mana akuntansi dipraktikkan. Akuntansi dipandang dari sudut pandang ilmiah sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengukur berbagai transaksi yang muncul dalam akun, perkiraan, atau posting keuangan, seperti aset, utang, pendapatan, biaya, dan keuntungan, untuk mengubah bukti yang disertai dengan data yang ada dan berubah menjadi informasi.

Berikut adalah elemen-elemen yang hingga saat ini telah mengakselerasi perkembangan akuntansi syariah:

1. Keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dalam bisnisnya menjadi inspirasi. Keuntungan membuat penting untuk mencatat, mengkategorikan, dan meringkas secara sistematis dan benar.
2. Pemahaman pelaku bisnis tentang pentingnya faktor sosial dalam memaksimalkan keuntungan.
3. Tujuan bisnis adalah mencari keuntungan sebagai sarana, bukan tujuan itu sendiri.

Karena gagasan bahwa akuntansi adalah ilmu dan praktik yang bebas nilai (value-free) mulai berkurang pada akhir tahun 1970-an, perkembangan akuntansi mengalami pasang surut. Sebagian besar akuntan dan peneliti akuntansi telah lama beroperasi di bawah anggapan ini. Karena kecenderungan perilaku masyarakat yang didorong oleh era reformasi dan globalisasi saat ini, permasalahan seperti ini semakin menjadi-jadi. Dorongan untuk menyelaraskan berbagai hal adalah karakteristik utama dari era informasi dan globalisasi. Dalam upaya untuk memahami akuntansi dalam konteks yang lebih luas, para peneliti akuntansi mulai memberikan perhatian lebih pada tahun 1980-an. Diakui bahwa memiliki catatan akuntansi dapat memberikan informasi. Islam jelas sangat kaya nilai dalam filsafat, masyarakat, dan kepercayaannya. Akibatnya, struktur akuntansi masyarakat Islam tentu saja harus berubah untuk mencerminkan sifat-sifat ini. Meskipun demikian, harus digarisbawahi bahwa universalitas ajaran Islam menjadikannya sumber yang berharga bagi semua kelompok etnis dan agama, Muslim dan non-Muslim, Timur dan Barat.

C. URGENSI AKUNTANSI SYARIAH

Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis adalah dua aliran utama yang membentuk sistem ekonomi global. Kapitalisme telah mendominasi kegiatan ekonomi di seluruh dunia, sementara sosialisme tampaknya kehilangan pijakan. Akibatnya, banyak negara baru-baru ini terlihat mengarahkan sistem ekonomi mereka ke arah

kapitalisme. Berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan berpedoman pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Pentingnya pengembangan akuntansi ke arah akuntansi dalam perspektif Islam atau Akuntansi Syariah akhir-akhir ini semakin meningkat. Akibatnya, diperlukannya aturan akuntansi yang sesuai untuk bank syariah dan lembaga lainnya. Perlunya alasan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan Islam juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam hal ini. Untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagian besar masyarakat muslim Indonesia saat ini sedang mengantisipasi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah. Hal ini menjadi pertimbangan dalam mendorong pertumbuhan bank syariah. Pertumbuhan perbankan syariah juga bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi keuangan masyarakat yang belum mampu ditangani oleh sektor perbankan tradisional. Selain itu, sebagai bagian dari upaya restrukturisasi industri perbankan, bank syariah yang sedang berkembang menawarkan opsi untuk itu.

Pengadopsian beberapa ide fundamental dan prinsip akuntansi konvensional saat ini bertentangan dengan masyarakat Islam, kebanyakan karena berkaitan dengan bunga atau riba atau bahkan dilarang mengkonsumsi riba. Masalah yang perlu dipecahkan adalah persyaratan akuntansi syariah, yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, kegiatan, pengukuran tujuan, kontrol, dan pelaporan sesuai dengan prinsip

syariah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu berkonsentrasi pada dua konsep fundamental dalam akuntansi konvensional yang diakui bermasalah dan tidak sesuai dengan umat Islam.

Perusahaan-perusahaan berbasis syariah di negeri ini tampaknya mulai berekspansi; ekspansi ini terlihat di industri keuangan. Bisnis syariah adalah bentuk perdagangan yang digerakkan oleh nilai dan kondisional. Bisnis syariah dilakukan dengan maksud untuk menumbuhkan iklim bisnis yang menyenangkan dan bebas dari kegiatan yang tidak jujur, dan telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Organisasi keuangan Islam diharuskan menjalankan bisnis secara ketat sesuai dengan hukum Islam.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan yang disebutkan:

1. Pengecualian bunga dari segala bentuk dan jenis transaksi
2. Kegiatan komersial dan perdagangan yang berfokus pada keadilan dan profitabilitas hukum.
4. mengeluarkan zakat berdasarkan hasil usahanya
5. Larangan beroperasinya monopoli
6. Bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat melalui usaha niaga dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

D. PERBANDINGAN AKUNTANSI SYARIAH & AKUNTANSI KONVENSIONAL

Perbedaan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Investasi	Investasi yang halal saja	Investasi baik yang halal dan haram
Bunga	Prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Menggunakan bunga
Laba	Profit dan “Falah Oriented” (mencari kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat)	Orientasi laba
Hubungan	Hubungan dengan nasabah berupa kemitraan	Hubungan nasabah berupa debitur dan kreditur
Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak adanya dewan sejenis

Sumber : Dadan et,all (2019)

Dilihat dari sudut pandang Aspek sebagai berikut :

Aspek yang Berbeda	Penjelasan
Akad dan Legalitas	Konsekuensi dunia akhirat-pertanggungjawaban yaumul Qiyamah
Lembaga Penyelesaian Sengketa Struktur Organisasi	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia

<p>Bisnis dan Usaha yang Dibiayai Lingkungan dan Budaya Kerja</p>	<p>Terdapatnya Dewan Pengawas Syariah- Operasional dan produk syariah Wajib Halal, tidak mudharat. Etika (Amanah, Shiddiq), skillfull dan profesional (Fathonah), Team work (Tabligh), Reward and Punishment (Adil)</p>
---	---

Sumber : Dadan et,all (2019)

E. AKUNTABILITAS DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

1. Konsep Kejujuran dalam Islam

Cara terbaik bagi seorang Muslim untuk mengubah perilakunya, menebus kesalahannya, dan mencari jalan ke surga adalah dengan jujur pada diri sendiri. Al Mishri (2008) menegaskan bahwa ada tiga kualitas kejujuran, yaitu kejujuran yang bertujuan, kejujuran eksternal, dan kejujuran interior. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama adalah kesetiaan (kejujuran) kepada Allah, Rasul, Kitab, pemimpin umat Islam, dan rakyat.

2. Keadilan Sosial dalam Islam

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan adalah segalanya; jika dijunjung tinggi dalam masalah dunia, maka ia akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki hak suara di kemudian hari. Meskipun pelakunya percaya bahwa mereka akan dibalas di akhirat, jika keadilan tidak ditegakkan, dia tidak akan tegak (Islah, 1997). Seperti yang tertuang dalam QS. Al Hadid ayat 25

dimana tujuan risalah ilahi adalah untuk mewujudkan keadilan di antara manusia

3. Konsep Akuntabilitas

Keadilan merupakan salah satu asas yang dipertahankan secara universal, dan itulah yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun, menurut Alimuddin (2011). Umar bin Abdul aziz, sang khalifah, dengan terkenal menyatakan : "Pertama, para penguasa harus bertindak adil, kemudian rakyat. Jika ini terjadi, menegakkan hukum menjadi kewajiban bersama. Jika seorang raja melakukan ketidakadilan, Abdillah, dan rakyat gagal mengendalikan dan mengawasinya, sama-sama menimbulkan dosa. Pada kenyataannya, jika seseorang menolak untuk mengakui ketidaktaatan atau kezaliman penguasa, mereka harus dikenakan hukuman, menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada kenyataannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa mereka yang menolak memiliki hak untuk menerima hukuman, terutama jika mereka tidak melawan ketidaktaatan atau tirani penguasa. Disimpulkan dari pernyataan Umar di atas bahwa rakyat biasa juga diharapkan menegakkan keadilan, selain penguasa dan penguasa lainnya. Nilai keadilan dalam akuntabilitas memiliki tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu keadilan dalam menerima amanat, keadilan dalam menjalankan amanat, dan keadilan dalam mempertanggungjawabkannya.

F. FILOSOFI PENDIDIKAN AKUNTANSI SYARIAH

Rumusan berikut menangkap ide kesatuan dalam filosofi akuntansi syariah:

1. Pengertian tentang Tuhan. Hanya ada satu Tuhan: Allah (tauhid)
2. Praduga tentang studi akuntansi yaitu :

- a) Sifat manusia.

Orang sadar akan tanggung jawabnya untuk mandiri karena mereka percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta.

- b) Epistemologi

Pendidikan akuntansi terbebaskan dianggap benar jika memasukkan prinsip-prinsip ketuhanan dan mengakui keterkaitan manusia dengan Tuhan dan alam semesta (termasuk dengan manusia lain).

- c) Metodologi pengembangan dan penerapan pendidikan akuntansi harus memungkinkan pendekatan subjektif dan objektif.

3. Asumsi Premis Sosial

Kontrolnya atas dirinya dan masyarakat akan selalu ada, seperti yang terlihat dari penajahan. Untuk menghindari tekanan pada diri sendiri dan masyarakat untuk tujuan tertentu sambil mengabaikan tujuan Tuhan, kekuatan ini harus dikendalikan..

4. Kaitan Teori dan Praktek

Dengan memasukkan kesadaran Tuhan dalam "Diri", pendidikan akuntansi yang dibebaskan bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai ilahi ke dalam instruksi akuntansi. Akibatnya, individu akan merasa perlu untuk membebaskan diri, juga masyarakat, dari segala bentuk penjajahan yang menghalangi mereka untuk berusaha melaksanakan kehendak Tuhan.

G. AKUNTAN ISLAMI

1. Analisis Praktek Tasawuf dalam Perkembangan Ilmu Akuntansi
Empat fase pengalaman dan pemahaman dalam tasawuf, menurut Ibnu Arabi, adalah syariah, tariqah, haqiqah, dan ma'rifah. Level dibangun satu demi satu.

- (a) Syariah: metode Syariah dapat diibaratkan sebagai jalan yang mengarah ke arah yang benar dan merupakan jalan yang aman yang dapat diikuti oleh siapa saja. Ajaran syariah bersifat moral dan etis. Syariah adalah sistem hukum yang pada kenyataannya diciptakan dan diputuskan oleh penciptanya berdasarkan rasa kewajiban moral mereka. Selanjutnya, setiap orang yang menerapkan syariah harus memiliki "sikap mental dan moral" yang baik agar efektif.
- (b) Thariqah: seorang penunjuk jalan atau memberi arahan. Dalam situasi saat ini, panduan dibatasi oleh siapa saja yang memiliki "label agama" bisa menjadi pemimpin, pedagang, pegawai, atau akademisi yang berarti selama dia sadar akan dirinya

sendiri. Menurut Nabi, "Barangsiapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya"

2. Haqiqah : Kebenaran adalah haqiqah. Haqiqah berurusan dengan masalah batin dan halus. Menurut perspektif tasawuf, setiap orang harus mengadopsi dan menjunjung tinggi haqiqah dan syariah. Manusia berfungsi sebagai jembatan antara keduanya. (Haeri, 2003:74) "Seseorang yang mengikuti hukum tanpa memiliki haqiqah maka fasiq. Siapapun yang mengamalkan haqiqah di luar syariah adalah kafir. Barangsiapa menghidupkan kembali keduanya telah mencapai kesempurnaan" (Haeri, 2003:169)

3. Ma'rifah : Aktualitas Ma'rifah adalah pemahaman akan kebenaran spiritual yaitu hikmah. Hanya beberapa orang terpilih yang dapat memperoleh pengetahuan tentang realitas ini. Tingkatan para nabi, rasul, sufi, dan wali yang telah menemui realitas sejati dikenal dengan istilah ma'rifah (Frager: 2005:13).

Wallahu'alam Bishowab..

DAFTAR PUSTAKA

- Acset, P. T., & Tbk, I. (2022). 6.+Jurnal+JAMAN+Agustus+2022+-+Fani,+dyah+palupi,+Dini. 2(2), 41–54.
- Adiputra, I. M. S., Sinarwati, N. K., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Karangasem). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1
- Adiwarman Azwar Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2006. Manajemen Syariah: sebuah kajian Historis Dan Kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- AICPA. (2018). Generally Accepted Auditing Standards. Diambil kembali dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA): <https://us.aicpa.org/>
- AICPA. (2019). Audit Data Analytics Guide. . American Institute of Certified Public Accountants.
- AICPA. (2020). Online Audit Technology Guide. American Institute of Certified Public Accountants.
- Al Haryono Jusup, 2011, “Dasar – Dasar Akuntansi”, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). Sistem Pengendalian Manajemen (Jilid 1) (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Randal J. Elder, & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services. 16th edition. Pearson.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). Akuntansi Pemerintahan Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Salemba Empat.

- Arinta, K. (1996). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Citra Aditya Bakti.
- Arismawati, K. N., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP, Kematangan Usia, Perilaku, dan Efektivitas Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*
- Asana, I. M. D. P., Desmayani, N. M. M. R., Atmaja, K. J., Putra, I. N. T. A., & Ariana, A. A. G. B. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kredit dan Akuntansi Pada Unit Usaha Kredit BUMDes Catur Eka Amertha. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(2), 207–217.
- Bastian, Bustami dan Nurlela. 2009. Akuntansi Biaya. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bastian, I. 2015. Akuntansi Pendidikan: Pengelolaan Organisasi Sekolah. Yogyakarta: BPFE.
- Baswir, R. (2006). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2001. Teori Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Blocher, Edward J., Kung H Chen, dan Thomas W. Lin dalam A. Susty Ambariani. 2007. Manajemen Biaya dengan Tekanan strategis Edisi 3 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- BPFE: Yogyakarta
- Bragg, Steven M dan Burton, E James. Accounting and Finance for Your Small Business; Second Edition.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. (2006). Akuntansi Biaya: Teori dan Aplikasi. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. (2009). Akuntansi Biaya. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Carter, William K and Millon F Usry. 2004. Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Chistensen dkk. 2007. Organization Theory and the Public Sector. New York: Taylor & Francis Group.
- Comiskey, C. W. (2002). The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices. New York: John Wiley and Sons.
- Commission, T. (1987). The National Commission on Fraudulent Financial Reporting.
- COSO. (2013). Internal Control - Integrated Framework. Diambil kembali dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: www.coso.org/Documents/990025P-Internal-Control-Integrated-Framework-Executive-Summary.pdf
- D. Larry Crumbley, L. E. (2015). Forensic and Investigative Accounting. USA: International Kindle Paperwhite.
- Dahlan Siamat. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi keempat. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Devanus Abellingga, P. P. (2021). Deteksi Fraudulent Financial Reporting: Suatu Pendekatan Menggunakan Accrual Based Investment Ratio dan Cash Based Investment Ratio. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen Volume 2 Nomor 2, 115 - 128.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. 2017. Akuntansi Syariah seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Drury, C. (2013). Management and cost accounting. Cengage Learning EMEA.
- DSAK IAI. 2018. ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ernst & Young. (2020). Cloud Computing: Five Considerations for Audit

Committees. .

Examiners, A. o. (2014). Association of Certified Fraud Examiners. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners Inc.

Gabe Richard, & Elizabeth Sugiarto Dermawan. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(3), 1381–1390. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i3.20022>

Garrison, R. H., & Noreen, E. W. (2014). *Managerial accounting*. McGraw-Hill Education.

Gramling, A. A., Steven M. Glover, & Prawitt, D. F. (2018). *Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach*. 10th edition. Wiley.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Halim, Abdul, Syam, Kusufi, Muhammad. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2018). *Cost management: accounting and control*. Cengage Learning.

Hansen, Don R and Maryanne M Mowen dalam Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. 2009. *Akuntansi Manajemen buku 2*, Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Hariyani, D. S. (2016). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)* (Issue Maret 2016).

Harnanto. 2019. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi Offset

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media. www.penerbitinmedia.co.id

hayani, N. P. L., Sulindawati, N. L. G. E., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana).

- Henry. 2018. Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hilton, R. W., & Platt, D. E. (2013). Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment.
- Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2002). Introduction to management accounting (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Horngren, Charles T., Datar, Srikant M., and George, Foster dalam Desi Adhariani. 2008. Akuntansi Biaya Penekanan manajerial. Edisi Sebelas. Jilid 2. Jakarta: Indeks.
- IAI. (2021). Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KAP). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- IAI. 2007. Akuntansi Syariah Apa Yang Ditakutkan? Dikutip dari Majalah AI Akuntan Indonesia. Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007. Jakarta.
- IAI. 2015. Exposure Draf Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Jakarta: Dewan standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan.
- IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Periode 1 Januari 2017. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ibid, Jaridah Ibn Ahmad al-Haritsi, fikih Ekonomi.
- IFAC. (2016). Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants. IFAC.
- IFAC. (2016). International Standard on Auditing (ISA) 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements: . IFAC.
- IFAC. (2020). International Auditing and Assurance Standards Board. Diambil kembali dari IFAC: www.iaasb.org/standards-and-guidance
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. StandarAkuntansi Keuangan per 1 Juni 2012.Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No.8: Pencabutan Keuangan) Nomor 27 Tahun 2007 TentangAkuntansi Perkoperasian.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm>, diakses 18 Maret 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 27 Akuntansi Koperasi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 1 April 2002. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B. dan Priantara, Diaz. 2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indonesia Grha Akuntan, Jalan Sidanglaya No. 1, Menteng, Jakarta.
- Indonesia, A. o. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- ISACA. (2019). Blockchain: An Auditor's Perspective. Information Systems Audit and Control Association.
- Iskandar, Syamsu. 2017. Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing. Bogor: In Media.
- Iwan Triyuwono. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah". Malang: Rajawali Pers.
- Jr, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2018). Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach. McGraw-Hill Education.
- Kashmir, 2008. Analisis Laporan keuangan , Jakarta :Rajawali Press
- Kholmi, Masyiah, dan Yuningsih. 2004. Akuntansi Biaya. Malang: UMM Press.
- KSAP.2010. Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PP Nomor 71 Tahun 2010. Dipresentasikan dalam kegiatan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada tanggal 14 Desember 2010 di Jakarta.

- Label, Wayne A. 2006. *Accounting for Non-Accountants*. USA: Sourcebooks, Inc.
- Louwers, T. J., Robert J. Ramsay, David H. Sinason, Jerry R. Strawser, & Thibodeau, J. C. (2015). *Auditing and Assurance Services*. 7th edition. New York: McGraw-Hill.
- Maher, M. W., Stickney, C. P., & Weil, R. L. (2011). *Managerial accounting: An introduction to concepts, methods and uses*. Cengage Learning.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:CV Andi Offset.
- McGraw-Hill Education Horngren, C. T., Datar, S. M., Rajan, M. V., Beaubien, J. M., & Graham, M. E. (2018). *Cost accounting: A managerial emphasis*. Pearson Education.
- Messier, W. F., Steven M. Glover, & Prawitt., D. F. (2021). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. 11th edition. . McGraw-Hill.
- Michael D. Akers, D. E. (2007). *Earnings Management and Its Implications*. CPA Journal, 64 - 68.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Press
- Moroney, R., Campbell, F., & Hamilton, J. (2020). *Auditing : a practical approach*. Australia: Wiley.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Relevansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2014. *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mursyidi. 2008. *Akuntansi Biaya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nur Afiah, N. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi*. Prenada Media.

Oberholzer, C. C. (2002). *Quality Management in Forensic Accounting*. Africa: Gordon Institute of Business Science.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Permendikbudristek. 2022. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Jakarta: Permendikbudristek.

PP no 71 tahun 2010 - Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Rev. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Radiansyah, Adrian. Ihsan A, Muhammad. dkk. 2023. *Pengantar Akuntansi*. Banten: Sada Karunia Persada.

Raiborn, Cecily A, and Kinney, Michael R. dalam Edward Tanujaya. 2011. *Akuntansi Biaya Dasar dan Perkembangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Sadeli, Lili M., 2010. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Santi H, Diyah. 2016. *Pengantar Akuntansi I (Teori dan Praktik)*. Malang: Aditya Media Publishing.

Sapto P, Wargo an Wulandari, Endang. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Schaltegger, S., & Burritt, R. (2017). *Contemporary environmental*

accounting: issues, concepts and practice. Routledge.

Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). Financial accounting theory and analysis: text and cases. John Wiley & Sons.

Soemarso, S. R. (2011). Akuntansi Biaya Konsep, Analisis, dan Pengendalian untuk Keputusan Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Syafri Harahap. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Solihin, D. (2006). Keuangan Publik - Pendanaan Pusat dan Daerah. Artifa Duta Prakasa.

Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyono. 2011. Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, Buku 1 Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Suwadi. 2010. "Perubahan Sistem pengelolaan Keuangan Negara". Diedit oleh Abdul Halim Yanuar E. Restianto dan I Wayan Karman didalam Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik, Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah-Kapita Selekt Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta STIM YKPN.

Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.

Taswan. 2015. Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Thornton, G. (2019). Artificial Intelligence: A Game Changer in the Audit. Grant Thornton.

Torres, F. J.-L.-D. (2018). Fraud Detection-Oriented Operators in a Data Warehouse Based on Forensic Accounting Techniques. Computer Fraud & Security, 13 - 19.

Tuanakotta, T. M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. (2022). *Financial reporting, financial statement analysis and valuation*. Cengage learning.

Warren, C. S., Jonick, C., & Schneider, J. (2020). *Financial accounting*. Cengage Learning.

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L. (2019). *Accounting Principles, Volume 2*. John Wiley & Sons.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Managerial accounting: Tools for business decision-making*. John Wiley & Sons.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. John Wiley & Sons.

Weygandt, Jerry J. Kimmel, Paul D. And Kieso, Donald E. 2015. *Accounting Principles*. USA: Wiley.

Whittington, R., & Pany, K. (2021). *Principles of Auditing & Other Assurance Services*. McGraw Hill.

Wibowo dan Arif, Abubakar. 2002. *Pengantar Akuntansi I*. Jakarta: Grasindo.

Will, John J. Shaw, Ken W. and Chiappetta, Barbara. 2011. *Fundamental Accounting Principles*. USA-New York: McGraw-Hill Irwin.

Witjaksono, Armanto. (2006). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuningsih dan Masiyah Kholmi. 2003. Akuntansi Biaya. Edisi Satu, Penerbit UMM Press.

Yusra, M. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Universitas Malikussaleh.

TENTANG PENULIS



Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M

Seorang Penulis dan Dosen Program S1 dan S2 Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka (STIE Pertiba) Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) dan program PascaSarjana (S2) di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (FE-Unkris) Jakarta tahun 1995 dan tahun 2000, kemudian menyelesaikan pada program Doktorat (S3) prodi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (IM-SDM) Universitas

Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta tahun 2015. Aktivitas lainnya sebagai konsultan dan praktisi dibidang *Human Capital* dan *Risk Management*, dan juga sebagai mitra dan *Counterpart* kajian penelitian dengan pemerintah daerah dibidang keparakerannya.

Alamat email : adrian_radiansyah@yahoo.com



Fithriah Napu, SE., M.Si

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Lahir di Kendari, 19 Agustus 1980 Propinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak ke-lima dari pasangan bapak H. Djakri Napu, SE., M.Pd. dan Ibu Hj. Deetje Hasan, SE. Penulis menyelesaikan pendidikan program Serjana (S1) di Universitas Halu Oleo - Kendari program studi Akuntansi pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2010 menyelesaikan program

Pascacarjana (S2) di Universitas Halu Oleo pada program studi ilmu manajememn konsentrasi di bidang manajemen keuangan. Dan pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program

Doktoral (S3) pada Universitas Halu Oleo program studi Ilmu Manajemen peminatan Manajemen Keuangan.

Email : fithriah.napu@umkendari.ac.id



Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak

Seorang penulis dan dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Bima. Lahir di Bima 23 September 1992 Kota Bima NTB. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad, S.E dan Ibu Suntiati. Ia menamatkan pendidikan Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima prodi manajemen keuangan dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia prodi Akuntansi jurusan Akuntansi Perpajakan.



Evi Martaseli, SE, MAK

Penulis dilahirkan di Kota Sukabumi Pada Tanggal 23 Maret 1980. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Mata Kuliah yang diampu seperti Analisis Laporan Keuangan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Manajemen Investasi, Kewirausahaan dan lainnya terkait dengan ilmu akuntansi. Dan juga sebagai Tutor Online Pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Terbuka (UT) dari tahun 2018 sampai sekarang. Pendidikan yang telah di tempuh dimulai dengan menyelesaikan Pendidikan Diploma III Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) pada tahun 1998 – 2001 kemudian melanjutkan pendidikan S1 nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Kota Sukabumi pada Tahun 2010, sedangkan pendidikan Magister nya di selesaikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pancasila (UP) pada tahun 2014 – 2016. Sebelum Menjadi Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pernah menjadi Kepala Bagian Administrasi dan Akademik di Perguruan Tinggi Citra Buana Indonesia dari tahun 2001 - 2016. Dan juga mempunyai pengalaman profesional sebagai Manager Cabang Sukabumi pada salah satu perusahaan yang bergerak di Bidang Teknologi Informasi yang berlokasi di Bandung.



Harnavela Sofyan, S.E., M.M., PIA

Penulis sebelumnya telah bekerja sebagai banker di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dan sejak tahun 2020 bekerja sebagai dosen dan melakukan Tridharma. Penulis merupakan dosen tetap di perguruan tinggi vokasi dan dosen tidak tetap di salah satu perguruan tinggi swasta di Tasikmalaya. Saat ini penulis sudah memiliki jabatan fungsional akademik asisten ahli, alumni dari Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Siliwangi dan Program Magister Akuntansi (S2) di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.



Sigit Mareta, S.E., M.Ak

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara Jakarta. Lahir di desa Ledok-Blora, 20 Maret 1986. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suhanto dan Ibu Puniah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Mercu Buana Jakarta prodi Akuntansi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Mercu Buana Jakarta prodi Magister Akuntansi.



Henky Hendrawan, Drs., M.M., M.Si

Lahir di Surabaya, tahun 1965. Saat ini penulis tinggal di Kota Bogor. di Lulus sarjana dari UNJ (IKIP Jakarta), lulus magister dari STIE IPWI Jakarta. Penulis merupakan pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Penulis mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Kewirausahaan.

Penulis merupakan lulusan dari STIE IPWI Jakarta tahun 2001 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan untuk tingkat Pasca Sarjananya.

Lulusan dari IKIP Jakarta (UNJ) tahun 1991 dengan jurusan Pendidikan Akuntansi untuk tingkat Sarjana. Disamping itu penulis juga telah mengikuti Paket Pelatihan Manajemen Ekspor Impor yang diselenggarakan oleh BP PPEI Kementerian Perdagangan tahun 2015 – 2017. Penulis juga sering menulis artikel di bidang manajemen, keuangan dan kewirausahaan di website pribadinya yakni <https://www.hendrawan165.com>.

Buku-buku yang sudah diterbitkan adalah Keuangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, tahun 2020; Modul Ajar: Dasar-dasar Akuntansi 1, tahun 2021; Buku Kolaborasi: Pengantar Manajemen (Revolusi dan Penerapannya), tahun 2022; Keuangan Negara, tahun 2022.

Kegiatan disamping sebagai pengajar, penulis juga pelaku usaha mikro. Juga ikut aktif di beberapa komunitas diantaranya adalah BaKul (Badan Kulineri) Kota Bogor, Koperasi KPEK Menteng. Menjadi anggota (member) dari Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Persatuan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI), dan Forum Dosen Indonesia Semesta (DIS).



Rita Andini S.E., M.M

Lahir di Semarang, 31 Agustus 1981. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Arifin Sugiyanto (Alm) dan Ibu Mariam Astuti (Alm). Lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2003, menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro sejak tahun 2006, saat ini aktif sebagai Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi Universitas Pandanaran Semarang. Pernah berkarir sebagai sebagai Analis

Kredit di Centratama Nasional Bank (CNB) dan Bank Central Asia (BCA) Tbk serta pernah berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat ini sedang menempuh Studi Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Email : ritaandini007@ymail.com

Akun Facebook : Rita Andini

Akun Instagram : ritaandini62



Ika Wulandari, S.E., M.M

Lahir di Gunungkidul pada tanggal 15 Juni 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIENUS Jogja pada tahun 2004 dan S2 di Universitas Gunadarma pada tahun 2006. Saat ini penulis menjadi dosen tetap di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain mengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, penulis juga pernah menjadi dosen di Universitas Gunadarma dan STIENUS Jogja. Mata Kuliah yang diampu adalah Pengantar Perbankan, Manajemen Perbankan, Akuntansi Perbankan, Analisis Laporan

Kuangan, Good Corporate Governance, Akuntansi Sektor Publik, Matematika Ekonomi, Pelaporan Keuangan Perbankan, dan Riset Akuntansi.

Penulis juga mempunyai pengalaman memberikan pelatihan mengenai Risk Management, Analisis Laporan Keuangan, Budgetting, Akuntansi Bendahara untuk beberapa instansi baik dari dalam maupun luar negeri seperti di PT Jamkrida Jawa Barat, PT Bank BRI Jakarta, PT Angkasapura, SMK Makassar, Policia National de Timor Leste, Parlemen National de Timor Leste, MPIE Timor Leste, IPB Timor Leste dan sebagainya.

Buku yang pernah dibuat:

1. Akuntansi Dasar untuk Pemula : Cepat & Mudah
2. Mindset, Marketing and Financial Report of MSMEs
3. Akuntansi Biaya : Teori dan Terapan



Lestari, S.E., Ak., M.Ak

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara Jakarta. Lahir di Jakarta, 24 April 1984. Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara dari pasangan bapak H. Kuwat Ibnu Subroto dan Ibu Hj.Sunarti. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) Akuntansi di STIE Muhammadiyah Jakarta, melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi (S2) di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta, konsentrasi Akuntansi Keuangan.

Camelia Verahastuti, S.E., M.Sc., Ak., CA

Merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Kalimantan Timur. Vera begitu sapaan akrabnya menamatkan jenjang strata 1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman Samarinda. Jenjang Strata 2 pada program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ibu dari 2 orang Putra dan 1 orang Putri ini saat ini masih disibukkan sebagai

Dosen yang menjalankan tridarma perguruan tinggi sekaligus Manager keuangan di perusahaan yang bergerak di bidang sipil dan konstruksi.



Imam Hasan, S.Pd., M.Pd., CAAT

Seorang Penulis dan Dosen Prodi D III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Lahir di Purbalingga, 10 Juli 1993, Jawa Tengah. Penulis merupakan anak desa yang lahir dari pasangan Bapak Syaefudin dan Ibu Maini yang memiliki 2 saudara. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sebelas Maret. Penulis tertarik meneliti di bidang literasi keuangan dan *fintech* untuk edukasi para pelajar. Saat ini penulis sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Alamat IG : *@imam_hasan1*



Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si., Ak.,CA., CTA., ACPA

Penulis menempuh pendidikan S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta, Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan S2 Ilmu Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebutan Chartered Accountant (CA) diperoleh dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan sebutan Certificate in Teaching Auditing (CTA) dan Associate Certified Public Accountant (ACPA) diperoleh dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Keanggotaan organisasi profesi yang diikuti adalah ISEI, IAI dan IAPI. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Email: tututdewiastuti@gmail.com.



Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA

Penulis lahir di Solo, 15 Oktober 1980. Penulis menekuni bidang akuntansi sejak tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 ilmu akuntansi di Trisakti Dan memulai karir mengajar sebagai Asisten Dosen serta dipercaya sebagai koordinator Praktikum. Pernah bergabung juga menjadi Auditor pada Kantor Akuntan Publik. Mulai berkarier sebagai dosen tahun 2006 sekaligus kaprodi akuntansi pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Bung Karno sejak tahun 2010. Pada tahun 2017 diamanahkan kaprodi

akuntansi dan berlanjut sebagai Wakil Dekan bidang akademik pada Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang di Tahun 2021. Beberapa buku sudah di luncurkan terutama bidang Akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Penelitian bidang akuntansi juga dilakukan secara publikasi maupun yang tidak terpublikasi. Aktif tergabung pada Forum Dosen Akuntansi Wilayah Banten dan terlibat menjadi pengurus IAI KAPd tingkat nasional.

Alamat email : asatichasari@unis.ac.id

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com